



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005-2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2010**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**TAHUN 2005-2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**



**Lampiran Peraturan Daerah**

**Tentang**

**Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
Daerah (RPJPD)**

**Kabupaten Rembang tahun 2005-2025**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara sistematis dan terpadu dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2008/2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
Dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2005–2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019 dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 ( lima ) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, misi dan Program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rembang untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025

#### Pasal 2

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005 – 2025 disusun sebagai berikut :

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | : Pendahuluan.  |
| BAB II  | : Kondisi Umum daerah.  |
| BAB III | : Analisis Isu-Isu Strategis Daerah.  |
| BAB IV  | : Visi dan Misi Kabupaten Rembang.  |
| BAB V   | : Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Daerah kabupaten Rembang Tahun 2005-2025. |
| BAB VI  | : Penutup   |



## BAB III

### PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penjabaran RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) RPJP Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi Jawa Tengah.
- (3) RPJP Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.

## BAB IV

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 7 Juli 2010

**BUPATI REMBANG**

**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**HAMZAH FATHONI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR      TAHUN 2010  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005–2025

I. UMUM

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 Tahun (2005-2025).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rembang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kabupaten Rembang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Rembang pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Rembang.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD tahun 2011, 2016, 2021 dan 2026.

Bupati terpilih masa jabatan berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama jabatannya melalui mekanisme perubahan APBD.

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	
PERATURAN DAERAH	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Pengertian .....	I-2
C. Maksud dan Tujuan.....	I-2
D. Landasan Hukum .....	I-2
E. Hubungan Dokumen RPJP-D Kabupaten Rembang Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. ....	I-3
F. Sistematika .....	I-4
<b>BAB II KONDISI UMUM DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
A. Kondisi Geografis dan Administratif .....	II-1
B. Kondisi Sosial Budaya.....	II-1
C. Kondisi Perekonomian .....	II-18
D. Kondisi Tata Ruang .....	II-27
E. Kondisi Sarana dan Prasarana .....	II-28
F. Politik dan Tata Pemerintahan.....	II-36
G. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup .....	II-40
<b>BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	<b>III-1</b>
<b>BAB IV VISI DAN MISI KABUPATEN REMBANG</b> .....	<b>IV-1</b>
A. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang .....	IV-1
B. Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang .....	IV-2
<b>BAB V SASARAN POKOK, ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN, TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 – 2025</b> .....	<b>V-1</b>
A. Sasaran Pokok .....	V-1
B. Arah Kebijakan.....	V-4
C. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah .....	V-7
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>VI-1</b>
<b>MATRIK PRIORITAS RPJPD KABUPATEN REMBANG</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah merupakan kabupaten yang terletak 111<sup>0</sup> 00'-111<sup>0</sup> 30' Bujur Timur (BT) dan 6<sup>0</sup> 30'-7<sup>0</sup> 00' Lintang Selatan (LS). Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten Tuban. Sedangkan batas sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah barat Kabupaten Pati, dan Sebelah Selatan Kabupaten Blora. Wilayah Kabupaten Rembang secara administratif terbagi dalam 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 101.408 Ha.

Semenjak terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Rembang melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang beserta segenap pemangku kepentingan dan masyarakat, dan telah melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan sistem dan kelembagaan pemerintah dan layanan publik serta pembangunan sarana dan prasarana/infrastruktur.

Agar terjadi kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah dari waktu-waktu, diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dalam suatu ketetapan hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Perencanaan pembangunan jangka panjang ini semakin penting dan relevan mengingat adanya ketentuan tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat periode lima tahunan. Dengan adanya rencana pembangunan berdimensi jangka panjang ini diharapkan konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah akan lebih terjamin.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan latar belakang pemikiran seperti tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun. RPJP-D Kabupaten Rembang merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencana pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Daerah yang dimaksudkan disini adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemeirintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian RPJP-D Kabupaten Rembang juga merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah (pusat) pada tahun 2007 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, demikian pula Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan ketentuan perundangan yang berlaku, seperti telah dijelaskan di atas maka Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan kurun waktu tahun 2005-2025, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 halaman 3 alenia 4 bahwa : “Kurun waktu RPJP-Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan Periodisasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tidak mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilakukan bersamaan waktunya.”

## **B. Maksud dan Tujuan**

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud sebagai arah dan acuan pelaku pembangunan daerah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di daerah yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi dalam pola sikap dan tindak bagi pelaku pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan resmi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang, DPRD Kabupaten Rembang, dunia usaha dan masyarakat yang akan dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang.
2. Menjadi pedoman yang berwawasan jangka panjang bagi seluruh stakeholder dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Rembang yang sesuai dengan potensi riil pada masa mendatang.
3. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, tidak diskriminatif dan memberikan perhatian kepada masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Rembang sebagai kota yang maju, mandiri dan sejahtera.

## **C. Landasan Hukum**

Landasan hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Serie D, Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2008/2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).

**D. Hubungan Dokumen RPJP-D Kabupaten Rembang Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah kabupaten atau kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, penyusunan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 mengacu pada RPJP-D Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 hal 4 alenia 4 bahwa: "RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah."
2. RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. RPJP-D Kabupaten Rembang merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang.
4. Dalam proses penyusunan RPJP-D Rembang ini memperhatikan pula dokumen-dokumen perencanaan sektoral jangka menengah dan panjang yang telah disusun antara lain adalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), Rencana Pengembangan Tenaga Kerja Daerah (RTKD), Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (RIPP-PA), serta Rencana Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT).

## **E. Sistematika**

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Rembang ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, Hubungan dokumen RPJPD Kabupaten Rembang dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika.
- Bab II Kondisi Umum Daerah; berisi kondisi geografis dan administratif, kondisi sosial, kondisi perekonomian daerah, kondisi tata ruang, kondisi sarana dan prasarana, kondisi politik dan tata pemerintahan, dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan.
- Bab III Isu-Isu Strategis Daerah; berisi isu-isu strategis pembangunan jangka panjang.
- Bab IV Visi dan Misi Kabupaten Rembang; berisi visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rembang
- Bab V Sasaran Pokok, Arah Kebijakan, dan Tahapan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025; berisi sasaran pokok, arah kebijakan, dan tahapan pembangunan jangka menengah
- Bab VI Penutup, yang didalamnya berisi kaidah pelaksanaan.

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM DAERAH**

#### **A. Kondisi Geografis dan Administratif**

Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 101.408 Ha, yang sebagian besar berupa tanah kering (71.450 ha) dan yang lain berupa lahan sawah (29.958 ha). Penggunaan tanah kering umumnya adalah untuk tegalan dan perkebunan sedangkan lahan sawah lebih banyak dipergunakan untuk pertanian dengan jenis pengairan teknis 5.640,175 ha (18,83%), pengairan  $\frac{1}{2}$  teknis 3.336,790 ha (11,14%), pengairan sederhana 2.893,726 ha (9,66%) dan tadah hujan 18.087,100 ha (60,38%).

Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi antara lain meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 8.34% terletak pada ketinggian 1–7 meter dpl, ketinggian 7-25 m dpl sebesar 12,41% , ketinggian 25-100 m dpl sebesar 42,82 %, ketinggian 100-500 m dpl sebesar 28,08 %, dan ketinggian diatas 500 m dpl sebesar 8,34%.

Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata sebesar 23<sup>o</sup>C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33<sup>o</sup>C. Di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 1.200 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Januari yaitu sebanyak 272 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Juli dan Agustus yaitu sebanyak 11 dan 13 mm/bulan.

#### **B. Kondisi Sosial Budaya**

##### **1. Pendidikan**

Pengembangan dan pembangunan pendidikan merupakan langkah strategis untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, produktif, cerdas dan berakhlak mulia. Pengembangan dan pembangunan pendidikan selama ini telah diarahkan dalam rangka menciptakan pendidikan yang bermutu merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Rembang juga memperhatikan sasaran-sasaran komitmen internasional di bidang pendidikan seperti Sasaran *Millenium Development Goals (MDG's)* dan Kesepakatan Dakkar tentang *Education for All* atau Pendidikan Untuk Semua (PUS).

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Rembang selain dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal juga dilaksanakan melalui jalur pendidikan non formal. Jalur pendidikan formal terdiri dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD Formal) di TK dan RA, satuan pendidikan dasar di SD, MI, SMP, MTs dan SMP Terbuka, satuan pendidikan menengah di SMA, MA, SMK. Sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi satuan pendidikan PAUD non formal (TPA, kelompok bermain), kelompok belajar paket A, Paket B, Paket C, pendidikan kesetaraan, keaksaraan, pendidikan kursus, dan pendidikan non formal lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Penggambaran kondisi pendidikan di Kabupaten Rembang dikelompokkan ke dalam tiga pilar yaitu (a) Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Memperoleh Pendidikan; (b) Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; (c) Tata Kelola dan Pencitraan Publik.

**Aspek pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan** diukur melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Transisi (AT), dan Jumlah Sekolah. APK untuk jenjang pendidikan SD atau sederajat pada tahun 2003/2004 sebesar 103,78% yang terdiri dari APK Laki-laki sebesar 104,9% dan APK Perempuan sebesar 102,66%. Pada tahun 2004/2005 APK SD atau sederajat turun menjadi sebesar 99,59%, APK laki-laki untuk tingkat SD atau sederajat sebesar 115,82% dan APK perempuan untuk tingkat SD atau sederajat sebesar 86,31%. Pada tahun 2005/2006 APK SD atau sederajat turun menjadi sebesar 98,40%, yang terdiri dari APK Laki-laki sebesar 110,98% dan APK perempuan sebesar 90,51%. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia sekolah laki-laki lebih baik dibandingkan dengan perempuan pada jenjang pendidikan SD atau sederajat. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, APK SD atau sederajat Kabupaten Rembang lebih rendah. APK SD atau sederajat Provinsi Jawa Tengah tahun 2004/2005 sebesar 105,67%.

Untuk jenjang pendidikan SMP atau sederajat, APK tahun 2005/2006 meningkat menjadi 84,14% dibandingkan tahun 2003/2004 yaitu sebesar 68,91%, selama kurun waktu 2003 – 2005 APK SMP atau sederajat meningkat rata-rata 4,7% per tahun. APK laki-laki lebih kecil dibandingkan APK perempuan untuk jenjang pendidikan SMP atau sederajat. APK laki-laki pada tahun 2005/2006 sebesar 80,47% dan APK perempuan sebesar 83,75%. APK laki-laki mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2003/2004 yaitu sebesar 73,83%, dan APK perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2003/2004 yaitu 68,55%. APK SMP atau sederajat tersebut lebih rendah dibandingkan APK Provinsi Jawa Tengah tahun 2005/2006 yaitu sebesar 89,57%.

Pada jenjang pendidikan SMA atau sederajat, nilai APK masih rendah. Pada tahun 2005/2006 APK SMA atau sederajat sebesar 38,55% berarti lebih dari separoh penduduk usia 16–18 tahun tidak menempuh pendidikan SMA atau sederajat. APK SMA atau sederajat lebih rendah dibandingkan dengan APK SMA atau sederajat Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama yaitu sebesar 39,56%. APK SMA atau sederajat untuk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2005/2006 APK laki-laki sebesar 38,21% dan APK perempuan sebesar 34,72%. Kondisi tahun 2005/2006 lebih tinggi dibandingkan tahun pada tahun 2004/2005. Pada tahun 2004/2005 APK SMA atau sederajat sebesar 34,79% dengan perincian APK SMA sederajat laki-laki sebesar 36,24% dan APK SMA sederajat perempuan sebesar 33,26%.

APM Kabupaten Rembang untuk semua jenjang pendidikan menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun 2005/2006. APM SD atau sederajat turun dari 88,88% pada tahun 2003/2004 menjadi 83,28% pada tahun 2005/2006, selama dua tahun APM SD turun rata-rata 2,2% per tahun. APM SMP sederajat cenderung fluktuatif pada tahun 2003/2004 APM SMP sederajat sebesar 51,56%, meningkat menjadi 63,4% pada tahun 2004/2005 dan turun menjadi 60,29% pada tahun 2005/2006 dan APM SMA atau sederajat turun dari 26,14% pada tahun 2003/2004 menjadi 24,2% pada tahun 2005/2006.

Pada tahun 2005/2006 angka transisi atau angka melanjutkan untuk masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan angka yang relatif tinggi yaitu 83,32% untuk melanjutkan ke tingkat SMP, koefisien Angka Transisi 16,68% lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP. Angka Transisi dari SMP sederajat ke SMA sederajat sebesar 39,70%. Dengan demikian sebanyak 60,30% lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA.

Jumlah sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Rembang relatif cukup memadai. Jumlah TK pada tahun 2005/2006 sebesar 315 unit, jumlah SD dan MI pada tahun 2005 sebesar 462 unit lebih kecil dari tahun 2004/2005 yaitu sebesar 465 unit. Sedangkan untuk SMP dan MTs pada tahun 2005/2006 sebanyak 80 unit, lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 78 unit. Jumlah SMA, SMK dan MA pada tahun 2005/2006 sebesar 38 unit lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 37 unit.

Kondisi ruang kelas untuk SD/MI sebagian besar rusak ringan dan rusak berat. Sedangkan untuk SMP/MTs menunjukkan bahwa ruang kelas yang rusak ringan maupun berat relatif sedikit. Pada tahun 2005/2006 jumlah ruang kelas SD yang rusak berat sebesar 577 unit (21,86%), rusak ringan 1.076 unit (40,77%) dan kondisi baik 986 unit (37,36%). Ruang kelas SMP rusak berat sebesar 19 unit (3,65%), rusak ringan sebesar 82 unit (15,77%) dan ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 419 unit (80,58%). Sedangkan untuk SMA/SMK/MA ruang kelas rusak berat sebesar 29 unit (7,9%), rusak ringan sebesar 33 unit (8,99%) dan ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 305 unit (83,11%). Pada masa yang akan datang diharapkan kerusakan ruang kelas untuk tingkat pendidikan dasar dapat diperbaiki seluruhnya dengan pembiayaan *sharing* antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pembiayaan ruang kelas yang rusak.

Jumlah murid SD/MI selama kurun waktu 2003/2004 – 2005/2006 cenderung menurun. Pada tahun 2005/2006 jumlah murid SD sebanyak 65.041 siswa lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 67.325 siswa. Meskipun penurunan jumlah murid SD tidak begitu tajam, namun hal ini mengisyaratkan bahwa jumlah anak usia sekolah SD cenderung turun, sehingga ada kemungkinan pada saatnya nanti banyak SD akan kekurangan murid. Sedangkan jumlah murid SMP/MTs dan SMA/SMK/MK selama kurun waktu yang sama cenderung meningkat. Jumlah murid SMP pada tahun 2005/2006 sebesar 21.560 siswa, meningkat dibandingkan tahun 2004/2005 yaitu sebesar 20.292 siswa. Jumlah murid SMA/ sederajat juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2004/2005 jumlah siswa SMA/ sederajat sebesar 12.191 Siswa dan pada tahun 2005/2006 meningkat menjadi 12.701 siswa.

Jumlah guru SD/MI pada tahun 2005/2006 sebesar 4.091 orang, lebih tinggi dibandingkan tahun 2004/2005 yaitu sebesar 3.437 orang. Pada tahun 2005/2006 jumlah guru SMP sederajat 1.757 orang meningkat dibandingkan pada tahun 2004/2005 sebesar 1.574 orang. Sedangkan jumlah guru SMA atau sederajat sebesar 900 orang pada tahun 2005/2006 meningkat daripada tahun sebelumnya sebesar 890 orang.

Pendidikan keaksaraan cenderung mengalami perkembangan. Angka buta huruf pada tahun 2005/2006 sebesar 1,9% dari jumlah penduduk usia 15 – 44 tahun. Pendidikan kesetaraan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Rembang berjalan cukup baik. Pendidikan *life-skill* menjadi muatan lokal pada kurikulum SD, SMP dan SMA. Sarana dan prasarana pendidikan non formal belum memadai. Kelompok Belajar Masyarakat masih belum memiliki panti atau balai tersendiri, sehingga belum dapat secara optimal mendidik para peserta didik karena peralatan terbatas.

**Aspek mutu dan relevansi pendidikan** diukur melalui indikator angka kelulusan dan guru layak mengajar. Angka kelulusan untuk masing-masing satuan pendidikan menunjukkan kecenderungan meningkat untuk satuan pendidikan SMA/MA. Pada tahun 2005/2006 Angka kelulusan SMA sebesar 99,51% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,02%. Sedangkan untuk satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs sedikit mengalami penurunan. Angka lulus SD pada tahun 2005/2006 sebesar 98,85%, sedangkan angka lulus SMP sebesar 98,33% angka tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 100% baik untuk SD maupun SMP/MTs.

Kualitas pendidikan juga ditentukan oleh guru yang mengajar. Semakin banyak guru yang layak mengajar diharapkan mutu pendidikan akan semakin meningkat. Jumlah guru yang layak mengajar pada tahun 2004/2005 sebesar 78,31% untuk SD/MI, sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 75,42% dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 72,11%. Selain itu, kualitas pendidikan juga ditentukan oleh semakin banyaknya sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Sampai dengan tahun 2005, jumlah rintisan sekolah berstandar nasional masing-masing sebanyak 1 sekolah untuk setiap jenjang pendidikan.

**Aspek tata kelola dan pencitraan publik** diukur melalui indikator Angka persentase sekolah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada tahun 2004/2005 sekolah menerapkan Rintisan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Penguatan MBS dilakukan melalui pilot project sekolah rintisan MBS pada jenjang sekolah dasar dan menengah, workshop dan pelatihan masing-masing sebesar 80% untuk jenjang pendidikan SD/MI, 89% untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan 92% untuk jenjang pendidikan SMA/SMK, serta membangun kemitraan dengan lembaga yang kompeten dalam implementasi MBS.

## 2. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu usia harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, penderita gizi buruk, dan angka kesakitan. Usia harapan hidup Kabupaten Rembang pada tahun 2000 sebesar 67,3 tahun dan pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar 69,1 tahun. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Rembang pada tahun 2000 sebesar 196,09 per 100.000 kelahiran hidup menurun pada tahun 2005 menjadi 168,03 per 100.000 kelahiran hidup. Menurunnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan, dan meningkatnya kesadaran kunjungan ibu hamil K4 (kunjungan ke 4). Cakupan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan pada tahun 2000 sebesar 65,95% dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 80,26%. Sedangkan cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2000 sebesar 64,45% meningkat menjadi 78,46% pada tahun 2005.

Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Rembang pada tahun 2005 sebesar 17,50 per 1.000 kelahiran hidup. AKB Kabupaten Rembang ini lebih rendah jika dibandingkan dengan AKB Jawa Tengah (AKB Jawa Tengah sebesar 23,71 per 1.000 kelahiran hidup). Pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas hidup bayi juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya cakupan kunjungan bayi dan kunjungan pelayanan neonatus komplikasi. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2000 sebesar 90,1% meningkat pada tahun 2005 menjadi 95,48% dan cakupan pelayanan neonatus komplikasi yang ditangani tahun 2000 sebesar 90% meningkat pada tahun 2005 menjadi 100%.

Peningkatan kesehatan bayi pada keluarga miskin dilakukan dengan berbagai program, salah satunya adalah pemberian makanan tambahan atau makanan pendamping ASI. Sampai dengan tahun 2005 cakupan pemberian makanan pendamping ASI bagi bayi yang berusia 6-24 bulan dari keluarga miskin adalah 78,46%. Sementara itu cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin pada tahun 2005 adalah sebesar 73,4%.

Cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi tahun 2005 dibandingkan tahun 2000 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari cakupan desa/kelurahan dengan UCI (*universal children immunization*). Cakupan desa/kelurahan dengan UCI pada tahun 2000 sebesar 75% menurun menjadi 43,2% pada tahun 2005.

Kondisi gizi masyarakat di Kabupaten Rembang secara umum dapat dilihat dari gambaran kondisi gizi pada balita. Jumlah balita penderita gizi buruk cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan per tahun sebesar 3,49%. Jumlah penderita gizi buruk pada balita terbanyak pada tahun 2002 yaitu sebesar 1.050 anak. Sampai dengan tahun 2005 jumlah balita dengan gizi buruk sebesar 593 anak. Data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tahun 2005 menunjukkan bahwa 100% balita yang mengalami gizi buruk telah ditangani. Pendataan balita gizi buruk dilakukan dengan pengecekan balita yang ditimbang. Di Kabupaten Rembang persentase jumlah balita yang ditimbang cenderung mengalami peningkatan, rata-rata peningkatan 0,54% per tahun. Pada tahun 2003 persentase balita yang datang untuk ditimbang sebanyak 72 % meningkat pada tahun 2005 menjadi 79 %.

Pola transisi epidemiologi penyakit di Indonesia pada umumnya adalah meningkatnya penderita penyakit tidak menular, munculnya penyakit menular baru dan masih tingginya penyakit menular yang menyebabkan kematian. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2005 muncul kasus penyakit menular baru seperti HIV AIDs, jumlah kasus HIV/AIDS sebanyak 1 orang.

Kasus lain yang masih menjadi permasalahan cukup serius di Kabupaten Rembang adalah meningkatnya jumlah kasus DBD. Pada tahun 2000 *Incident Rate* (IR) DBD sebesar 2,6 per 10.000 penduduk menurun menjadi 2,55 per 10.000 penduduk di tahun 2005. Sedangkan kasus kematian karena DBD pada tahun 2005 tidak ditemukan. Hal lain yang cukup serius adalah meningkatnya kasus diare pada tahun 2005. IR Diare pada tahun 2000 adalah 112,91 per 10.000 penduduk meningkat pada tahun 2005 menjadi 148,78 per 10.000 penduduk. Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Rembang sejak tahun 2003 sampai 2005 mengalami penurunan. KLB terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu 16 kali. Sedangkan pada tahun 2003 jumlah KLB sebanyak 7 kali menurun di tahun 2005 menjadi 4 kali.

Sedangkan kasus TB Paru pada tahun 2005 masih cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan persentase *Case Detection Rate* (CDR) TB Paru yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 persentase CDR TB Paru sebanyak 9,4% meningkat pada tahun 2005 menjadi 40,6%. Sedangkan pada tahun 2005 persentase kesembuhan TB Paru baru mencapai 72%.

Kasus penyakit tidak menular (*non infectious*) meningkat cukup signifikan selama tahun 2000 - 2005. Kasus Penyakit tidak menular yang meningkat sangat tajam adalah kasus Diabetes Mellitus (DM), Stroke dan Hipertensi. Jumlah kasus DM pada tahun 2000 sebesar 103 kasus meningkat pada tahun 2005 menjadi 3.473 kasus. Sedangkan jumlah kasus stroke pada tahun 2005 sebesar 267 kasus lebih tinggi dibandingkan tahun 2000 yang hanya 19 kasus. Demikian juga dengan kasus Hipertensi, pada tahun 2000 jumlah kasus Hipertensi sebesar 957 kasus meningkat pada tahun 2005 menjadi 5.085 kasus. Meningkatnya kasus ini dikarenakan antara lain oleh pola hidup masyarakat yang tidak benar, kurang berolahraga, makan-makanan yang tidak sehat, merokok dan minum-minuman keras.

Status kesehatan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang tidak sehat menyebabkan meningkatnya penyakit di wilayah tersebut. Di Kabupaten Rembang kondisi lingkungan dilihat dari indikator cakupan SPAL, cakupan jamban dan jumlah rumah sehat. Cakupan rumah tangga yang memiliki SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) pada tahun 2005 mengalami

penurunan dibandingkan pada tahun 2004. Pada tahun 2004 cakupan rumah tangga yang memiliki SPAL sebesar 56,65% menurun pada tahun 2005 menjadi 45,69%, sedangkan cakupan keluarga yang memiliki jamban pada tahun 2005 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2004. Pada tahun 2004 cakupan keluarga yang memiliki jamban sebesar 46,14% meningkat pada tahun 2005 menjadi 66,37%. Sedangkan jumlah rumah sehat pada tahun 2005 sebanyak 18.874 unit jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun 2000 yang jumlahnya mencapai 20.382 unit.

Kualitas hidup sehat di Kabupaten Rembang sangat ditunjang oleh peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas. Jumlah Puskesmas pada tahun 2005 sebanyak 16 unit, 10 unit diantaranya merupakan Puskesmas rawat inap. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu sebesar 71 unit, Puskesmas 19 unit dan Poliklinik Kesehatan desa (PKD) sebesar 154 unit. Dari segi jumlah, pelayanan dasar oleh Puskesmas sudah cukup memadai, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Rembang dilakukan oleh rumah sakit. Sampai dengan tahun 2005 jumlah rumah sakit di Kabupaten Rembang hanya 1 unit, yaitu RSUD Kabupaten Rembang.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin. Jaminan kesehatan pemerintah pusat diberikan dalam bentuk Asuransi Keluarga Miskin (Askeskin), sedangkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan melalui program Jaringan Rembang Sehat (JRS). Pelayanan melalui Askeskin dan JRS ini diberikan dalam bentuk layanan kesehatan gratis kepada keluarga miskin untuk Askeskin dan Jaringan Rembang Sehat diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis pada tingkat Puskesmas kepada semua penduduk Kabupaten Rembang.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Rembang apabila dibandingkan dengan rasio penduduk masih sangat kurang. Hal ini sesuai Kepmenkes No.1202/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010. Kondisi rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Rembang per 100.000 penduduk, adalah sebagai berikut:

1. Rasio dokter spesialis adalah 2, kondisi ini memiliki kategori sangat kurang karena berdasarkan ketentuan, rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk adalah 6 dokter spesialis.
2. Rasio dokter umum adalah 7, kondisi ini memiliki kategori sangat kurang karena berdasarkan ketentuan, rasio dokter umum per 100.000 penduduk adalah 40 dokter.
3. Rasio dokter gigi adalah 1, kondisi ini memiliki kategori kurang, hal ini dikarenakan menurut ketentuan, per 100.000 penduduk 11 dokter gigi.
4. Rasio perawat adalah 48, kondisi ini memiliki kategori sangat kurang, dikarenakan berdasarkan ketentuan per 100.000 penduduk 117,5 perawat.
5. Rasio bidan adalah 44, kondisi ini memiliki kategori sangat kurang, karena dalam ketentuan setiap 100.000 adalah 100 bidan.
6. Rasio kesehatan masyarakat adalah 16, kondisi ini memiliki kategori kurang, karena dalam ketentuan per 100.000 penduduk adalah 40 tenaga kesehatan masyarakat
7. Rasio tenaga apoteker adalah 1, kondisi ini memiliki kategori baik, diatas ketentuan yaitu per 100.000 penduduk 10 apoteker.



8. Rasio ahli gizi adalah 3, kondisi ini memiliki kategori kurang karena berdasarkan ketentuan per 100.000 penduduk adalah 20 ahli gizi.
9. Rasio ahli sanitasi lingkungan adalah 6, kondisi ini memiliki kategori kurang karena berdasarkan ketentuan per 100.000 penduduk adalah 40 ahli sanitasi lingkungan.

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang juga dipengaruhi oleh baik buruknya perilaku hidup sehat masyarakat. Dalam rangka mewujudkan perilaku hidup sehat masyarakat dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui peningkatan peran posyandu yang merupakan salah satu bentuk UBKM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat). Sampai dengan tahun 2005 jumlah Posyandu sebanyak 1.217 unit dengan rincian jumlah Posyandu Pratama 12,61%, Posyandu Madya sebesar 56,02%, Posyandu Purnama sebesar 29,99% dan Posyandu Mandiri sebesar 1,37%.

### **3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

#### **a. Keluarga Berencana**

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rembang tahun 2000-2005 meningkat rata-rata sebesar 1,03% pertahun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah, yaitu sebesar 0,86% per tahun. Sedangkan TFR (*Total Fertility Rate*) Kabupaten Rembang tahun 2000–2005 sebesar 1,5% - 2%. TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya.

Pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Keluarga Berencana. Jumlah peserta KB baru tahun 2000–2005 cenderung meningkat dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 1,87%. Pada tahun 2000 jumlah peserta KB baru sebesar 10.460 peserta meningkat pada tahun 2005 menjadi 10.817 peserta. Kondisi ini belum sesuai dengan target yang ditentukan oleh BKKBN. Target dari BKKBN peserta KB Baru untuk kabupaten/kota adalah 12.000 – 13.000 orang per tahun.

Jumlah peserta KB Aktif di Kabupaten Rembang pada tahun 2000–2005 mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan jumlah peserta KB aktif per tahun sebesar 2,36%. Pada tahun 2000 jumlah peserta KB Aktif sebesar 92.726 peserta meningkat pada tahun 2005 menjadi 104.131 peserta. Berdasarkan penggunaan jenis alat kontrasepsi, akseptor KB Aktif banyak menggunakan alat kontrasepsi jenis hormonal. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah akseptor dengan alat kontrasepsi jenis suntik dan pil, sedangkan pengguna alat kontrasepsi non hormonal (IUD, MOW dan Implant) rata-rata mengalami penurunan. Partisipasi pria dalam menggunakan alat kontrasepsi dirasakan belum optimal. Alat kontrasepsi yang digunakan oleh pria jenisnya sangat terbatas yaitu kondom dan MOP (Modus Operasi Pria). Jumlah pria dengan kontrasepsi MOP persentasenya masih sangat kecil. Sampai dengan tahun 2005 jumlah peserta MOP sebesar 737 peserta (0,71%).

Kemandirian dalam program KB juga menjadi tuntutan dalam pembangunan Keluarga Berencana. Peserta KB mandiri di Kabupaten Rembang rata-rata mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,34%. Jumlah peserta KB Mandiri tahun 2000 sebesar 35.874 peserta meningkat pada tahun 2005 menjadi 43.264 peserta. Sebagian besar peserta KB Mandiri menggunakan alat kontrasepsi non hormonal.

Dalam rangka meningkatkan peserta KB dibantu oleh petugas KB dan kader KB/PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa). Jumlah petugas dan kader yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang dilayani. Jumlah petugas KB pada tahun 2005 hanya 95 orang. Sedangkan jumlah kader KB/PPKBD dari tahun 2000 sampai 2005 jumlahnya sama yaitu 294 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah PUS yang akan dilayani, jumlah kader KB masih kurang.

Peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi keluarga berencana dapat dilihat dari jumlah kelompok yang aktif dalam kegiatan keluarga berencana. Kelompok yang aktif dalam mendukung program KB diantaranya Kelompok Kesehatan Remaja, dan Kelompok KB. Kelompok Kesehatan Remaja pada tahun 2005 mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2000 jumlah kelompok kesehatan remaja sebanyak 3 kelompok meningkat pada tahun 2005 sebanyak 24 kelompok. Sedangkan jumlah kelompok KB juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 kelompok KB sebanyak 3.202 kelompok meningkat pada tahun 2005 menjadi 3.241 kelompok. Dalam rangka meningkatkan partisipasi laki-laki dalam Program KB telah dibentuk kelompok Prio Utomo. Pada tahun 2000 jumlah kelompok Prio Utomo sebesar 15 kelompok meningkat pada tahun 2005 sebanyak 23 kelompok.

#### **b. Keluarga Sejahtera**

Jumlah keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Rembang mulai tahun 2000–2004 mengalami peningkatan. Jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2000 adalah 95.357 KK meningkat pada tahun 2004 menjadi 99.068 KK. Sedangkan jumlah keluarga sejahtera I pada tahun 2000 sebanyak 12.451 KK bertambah menjadi 16.074 KK pada tahun 2004.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, tangguh, bermoral, dan berkualitas, dilakukan melalui pengembangan kelompok-kelompok masyarakat yang disebut dengan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL). Kelompok-kelompok ini di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan kuantitasnya. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita pada tahun 2002 sebanyak 567 unit meningkat menjadi 620 unit pada tahun 2005. Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja pada tahun 2000 sebesar 170 unit meningkat menjadi 177 unit pada tahun 2005. Sedangkan jumlah BKL tahun 2000 sebesar 141 unit meningkat menjadi 144 unit pada tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2005 jumlah Pusat Informasi Konseling (PIK) KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) sebanyak 16 kelompok dan PIK BLK (Bina Lingkungan Keluarga) sebanyak 14 kelompok.

#### **4. Ketenagakerjaan**

Penduduk usia kerja sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 mengalami peningkatan, yaitu dari 365.219 jiwa (2002) menjadi 377.264 jiwa (2005). Penduduk usia kerja didominasi oleh golongan umur dibawah 35 tahun. Di Kabupaten Rembang selama periode 2003-2005 telah terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 9.334 orang, dari 189.333 orang (2003) menjadi 198.667 orang (2005). Dari sebanyak 198.667 orang angkatan kerja pada tahun 2005, penduduk yang bekerja sebanyak 182.813 orang sedangkan yang menganggur sebanyak 17.224 orang atau sebesar 7,98%. Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2004 dengan jumlah penganggur 15.526 orang (7,44%) dari sebanyak 194.078 orang angkatan kerja.

Proporsi angkatan kerja di perdesaan lebih besar (298.038 orang atau 77,69%) dibandingkan daerah perkotaan (84.167 orang atau 22,31%). Baik di perkotaan maupun perdesaan angkatan kerja laki-laki lebih dominan dibandingkan angkatan kerja perempuan. Proporsi penduduk bukan angkatan kerja di daerah perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (perdesaan sebesar 67,71%, sedangkan perkotaan sebesar 32,29%). Di daerah perkotaan maupun perdesaan proporsi bukan angkatan kerja perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan proporsi bukan angkatan kerja laki-laki.

Salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk usia kerja adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2005 kualitas penduduk usia kerja di Kabupaten Rembang baik angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja masih rendah, karena 66% (131.120 orang) masih berpendidikan SD. Penduduk usia kerja yang berpendidikan SMU keatas hanya 11,7% (23.244 orang). Angkatan kerja yang bekerja paling banyak berpendidikan SD (127.709 orang), dan yang paling sedikit berpendidikan D1/D2/D3 (4.674 orang), sedangkan pengangguran sebagian besar hanya berpendidikan SLTP (6.766 orang) dan paling sedikit berpendidikan D1/D2/D3 (122 orang).

Pertanian merupakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di Kabupaten Rembang (54,85%), baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Selain sektor pertanian, sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan (16,80%), sektor jasa (9,17%) dan sektor industri (8,80%). Sektor perdagangan lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan dibandingkan tenaga kerja laki-laki (perempuan 27,89%, laki-laki 9,49%). Sebaliknya, sektor pertambangan dan penggalian; industri, listrik, air dan gas; konstruksi; angkutan dan komunikasi; dan keuangan lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki.

Di wilayah perdesaan, sektor yang paling dominan menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian (59,78%). Tenaga kerja di perdesaan sebagian lainnya terserap pada sektor perdagangan (14,56%), industri (8,59%) dan jasa (7,14%). Berbeda dengan wilayah perdesaan, di wilayah perkotaan sektor pertanian tidak terlalu mendominasi penyerapan tenaga kerja, yaitu hanya 37,60%. Di perkotaan sektor yang cukup berkembang adalah sektor perdagangan (24,34%), sektor jasa (16,03%), dan sektor industri (9,47%).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rembang selama 3 tahun menunjukkan adanya kenaikan dari sebesar 66 % tahun 2003 menjadi 68,5% tahun 2005. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rembang selama 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Jumlah penganggur pada kurun waktu tersebut adalah 14.781 orang pada tahun 2003 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 17.224 orang. Dari tahun 2003-2005 sebagian besar angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Rembang bekerja melebihi jam kerja normal, yaitu di atas 35 jam/minggu, dan menunjukkan adanya kenaikan. Pada tahun 2003 tenaga bekerja yang bekerja diatas 35 jam per minggu sebesar 162.096 orang dan pada tahun 2005 menjadi menjadi 162.741 orang. Secara umum, jam kerja penduduk laki-laki lebih panjang dibandingkan jam kerja penduduk perempuan.

Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian kesempatan kerja juga termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diisi maupun yang masih lowong. Berdasarkan prediksi lowongan pekerjaan yaitu kesempatan kerja yang belum terisi, akan timbul kebutuhan tenaga kerja. Rata-rata elastisitas angkatan kerja pada tahun 2004-2005 adalah sebesar 0,52. Angka tersebut menunjukkan kondisi bahwa pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja cenderung in-elastis atau tidak sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka

tersebut dapat diartikan setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu meningkatkan angkatan kerja yang bekerja sebesar 0,52% saja.

Kondisi SDM ketenagakerjaan dari aspek ketrampilan, kapasitas dan kompetensi masih relatif rendah. Upaya yang dilaksanakan secara bertahap yaitu *up grading* instruktur, rehabilitasi gedung serta mengikutsertakan petugas instruktur dalam diklat latihan kerja sesuai dengan jenis kejuruan masing-masing. Selain itu pada saat ini sedang dirintis upaya terpadu yang meliputi aspek infrastruktur, instruktur, manajemen, sarana dan prasarana pelatihan serta program pelatihan untuk mewujudkan Lembaga Pelatihan Ketrampilan Kerja yang berbasis Kompetensi. Hal ini dilaksanakan guna merespon peluang pasar kerja baik lokal, antar daerah maupun antar negara.

Peningkatan ketrampilan tenaga kerja juga dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, namun dari segi kualitas masih lemah. Lemahnya institusi lembaga pendidikan, baik yang ditangani pemerintah (UPT-KLK) maupun yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Ketrampilan Swasta (LPKS), masih merupakan kendala dalam upaya menyiapkan tenaga kerja terampil di daerah.

## 5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang selama tahun 2000-2005 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,03% per tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2000 sebanyak 559.287 jiwa meningkat pada tahun 2005 yaitu menjadi 591.508 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut berdasarkan komposisi jenis kelamin dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki sebanyak 295.170 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 296.338 jiwa.

Berdasarkan kelompok umur, rata-rata penduduk usia produktif Kabupaten Rembang (15-64 tahun) tahun 2001-2005 sebesar 359.322 orang atau 62,89% sedangkan penduduk non produktif (0-14 tahun dan 60 tahun ke atas) sebesar 211.967 orang atau 37,10%. Berdasarkan data jumlah penduduk usia produktif dan non produktif tersebut dapat diketahui besarnya angka beban tanggungan atau rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 58. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 58 orang penduduk non produktif. Sedangkan *sex ratio* atau perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan tidak menunjukkan adanya perbedaan (*gap*), angka *sex ratio* berdasarkan data tahun 2001- 2005 sebesar 99, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 orang laki-laki.

Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dirasakan masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil belum dapat diimplementasikan secara optimal. Tidak optimalnya proses tersebut dikarenakan dukungan data yang akurat dan akuntabel mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah belum sesuai harapan serta pelayanan kebutuhan data secara cepat dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan masih jauh dari harapan, sehingga data base tentang kependudukan dan pencatatan sipil selama tahun 2000-2005 belum dapat menyajikan *trend* atau perkembangan. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan berpengaruh terhadap kualitas pengambilan kebijakan pembangunan kependudukan dan catatan sipil.

Tantangan kedepan penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil semakin besar, dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk

sehingga mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan catatan sipil semakin meningkat, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi permasalahan tersebut antara lain melalui peningkatan kemampuan aparat, dukungan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara elektronik, sehingga pelayanan lebih cepat dan kualitas data semakin akurat serta akuntabel.

## **6. Sosial**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Rembang tahun 2005 mengalami peningkatan dibanding tahun 2002. Jenis PMKS yang meningkat pada tahun 2005 adalah sebagai berikut: penduduk lanjut usia terlantar, korban narkoba, wanita tuna susila dan fakir miskin. Jumlah penduduk usia lanjut yang terlantar pada tahun 2002 sebesar 7.210 orang meningkat menjadi 7.413 orang pada tahun 2005, sedangkan korban narkoba pada tahun 2000 sebesar 1 orang pada tahun 2005 meningkat menjadi 193 orang. Jumlah wanita tuna susila pada tahun 2000 sebanyak 53 orang meningkat menjadi 192 orang pada tahun 2005. Kategori PMKS jenis fakir miskin pada tahun 2000 sebanyak 44.921 KK meningkat menjadi 103.461 KK di tahun 2005

Kategori PMKS yang mengalami penurunan selama tahun 2000–2005 adalah penyandang cacat, balita terlantar, anak korban kekerasan, anak nakal, gelandang dan pengemis, wanita korban kekerasan, keluarga rentan, anak jalanan, dan wanita rawan sosial ekonomi. Jumlah penyandang cacat tahun 2002 sebesar 2.269 orang pada tahun 2005 menjadi 1.618 orang, balita terlantar pada tahun 2002 sebanyak 4.976 orang pada tahun 2005 menjadi 2.577 orang. Sedangkan jumlah anak korban kekerasan pada tahun 2000 sebanyak 919 orang menurun pada tahun 2005 menjadi 193 orang, anak nakal pada tahun 2002 sebesar 547 orang menurun menjadi 193 orang. Jumlah gelandangan dan pengemis tahun 2000 sebesar 203 orang menurun pada tahun 2005 menjadi 50 orang.

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan baik melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian jaminan perlindungan dan fasilitasi penampungan bagi PMKS dengan harapan dapat mengembalikan martabat dan memberikan harapan hidup yang lebih baik. Dalam rangka pemberian jaminan perlindungan dan penampungan PMKS. Kabupaten Rembang memiliki panti sosial sebanyak 10 buah. Panti sosial tersebut terdiri dari 7 unit panti asuhan dengan jumlah penghuni sebanyak 320 orang, Panti Wreda sebanyak 1 buah dengan penghuni 80 orang, Panti Jompo sebanyak 1 buah dengan jumlah penghuni 80 orang dan panti khusus sebanyak 1 buah dengan penghuni sebanyak 100 orang.

Selain panti sosial, Kabupaten Rembang juga memiliki Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang cukup mandiri. Pada tahun 2005 tercatat sebanyak 10 organisasi sosial ada di Kabupaten Rembang dengan jumlah penanganan penyandang sosial yang dilakukan mencapai 20 orang. Sementara itu, jumlah pekerja sosial masyarakat sebanyak 2.039 orang, baik pegawai negeri maupun swasta. Adapun jumlah Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) di Kabupaten Rembang adalah sebanyak 209 orang.

Penanganan PMKS dirasakan masih belum memadai, hal ini disebabkan karena terbatasnya SDM yang menangani Urusan Kesejahteraan Sosial, terbatasnya Ketersediaan data informasi serta belum optimalnya pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meliputi Organisasi Sosial (Panti atau Luar Panti), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat serta tenaga kesejahteraan sosial masyarakat lainnya. Pada tahun 2005 jumlah cakupan penyandang cacat yang

ditangani hanya sebanyak 22 orang, jumlah anak terlantar sebanyak 256 orang, balita terlantar sebanyak 131 orang, anak jalanan 25 orang, tuna susila 15 orang dan pengemis sebanyak 45 orang.

Jumlah korban bencana alam di Kabupaten Rembang tahun 2005 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Rembang adalah kekeringan, puting beliung dan banjir. Pada tahun 2005 jumlah korban bencana alam sebanyak 102 jiwa.

## **7. Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat diketahui dari besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tahun 2005 IPG Kabupaten Rembang sebesar 62,6 termasuk kategori cukup baik. Sedangkan besarnya nilai IDG tahun 2006 sebesar 64,2 juga termasuk kategori cukup baik. Perkembangan dari tahun ke tahun keberhasilan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan meningkat cukup baik. Namun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah besarnya IPG Kabupaten Rembang lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah yang besarnya 62,8.

Dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari telah terbentuknya *Focal Point* dan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) serta banyaknya lembaga swadaya masyarakat pemerhati gender. Pemerintah Kabupaten Rembang telah membentuk lembaga yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui penanganan kasus-kasus tersebut secara terpadu.

Berdasarkan struktur kelompok umur penduduk Kabupaten Rembang termasuk kategori muda, jumlah kelompok umur 0 -18 tahun (anak-anak) cukup besar yaitu 139.689 jiwa (24,38%) dari jumlah penduduk sebanyak 572.879. Permasalahan terkait dengan perlindungan anak antara lain anak terlantar, anak yang tersangkut masalah hukum dan penyalahgunaan Napza perlu diperhatikan, mengingat secara geografis Kabupaten Rembang terletak di jalur utama Pantai Utara di pulau Jawa, yang potensial menjadi tempat transit bagi anak terlantar, anak korban Napza dan penyandang masalah sosial lainnya, sehingga jaminan tumbuh kembang dan perlindungan anak perlu diperhatikan.

## **8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Secara administratif pemerintahan Kabupaten Rembang terbagi menjadi 287 desa dan 7 kelurahan. Masing-masing desa/kelurahan terbagi dalam Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), dimana lembaga ini merupakan jenis lembaga sosial kemasyarakatan yang menjalankan peran menggalang keswadayaan dan partisipasi masyarakat. Jumlah RW yang ada sebanyak 974 unit, sedangkan RT sebanyak 3.310 unit. Jumlah Badan Perwakilan Desa (BPD) sebanyak 287 unit dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) sebanyak 294 unit, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan sebanyak 294 unit.

Dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, selama kurun waktu 2000-2005 dilakukan antara lain melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, peningkatan sarana dan prasarana di perdesaan, pengembangan lembaga keuangan mikro diperdesaan, peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan produktifitas masyarakat perdesaan.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan telah dilakukan

melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis (diklat dan bintek), namun demikian kondisi kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dan kelembagaan pemerintah desa/kelurahan yang ada dirasakan relatif masih kurang sehingga perlu mendapat perhatian di masa yang akan datang. Penguatan kelembagaan desa/kelurahan dilaksanakan melalui fasilitasi peningkatan peran BPD, LPMD/K, PKK dan organisasi Karang Taruna melalui pengembangan kapasitas pengurus.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, telah dilaksanakan berbagai program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. Program-program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa nelayan, dilaksanakan secara terintegrasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan usaha kecil dan mikro di perdesaan.

Peningkatan prasarana dan sarana di perdesaan yang telah dilaksanakan tahun 2003–2005 melalui pendanaan PNPM Mandiri, telah menyelesaikan sebanyak 570 unit prasarana dan sarana desa, antara lain jalan desa, jembatan sebanyak 44 unit, rehabilitasi pasar desa sebanyak 6 unit dan rehabilitasi gedung sekolah 21 unit dan membangun baru sebanyak 22 unit. Rehabilitasi saluran irigasi sepanjang 8.186 meter. Peningkatan air bersih 32 unit dan sanitasi sebanyak 8 unit. Pembangunan prasarana dan sarana tersebut melibatkan tenaga kerja sebanyak 565.138 HOK (Hari Orang Kerja) dengan jumlah tenaga kerja terlibat sebanyak 60.950 orang.

Pengembangan lembaga keuangan mikro di perdesaan, dilakukan melalui pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan usaha ekonomi produktif/ simpan pinjam untuk kaum perempuan sebanyak 372 kelompok dengan jumlah peserta sebanyak 3.217 orang. Jumlah usaha ekonomi produktif sebanyak 198 kelompok dengan jumlah peserta sebanyak 4.270 orang. Demikian pula dengan peningkatan pelayanan Bank Perkreditan Rakyat – Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK) di setiap kecamatan, bank perkreditan rakyat baik yang dikelola secara umum maupun syariah, peningkatan pasar tradisional, pengembangan ekonomi petani dan nelayan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengembangan usaha kecil/mikro di perdesaan.

Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang ekonomi masyarakat dilakukan dengan menumbuhkan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan pasar desa sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan, dengan tujuan untuk merealisasikan gerakan pengembangan ekonomi lokal dengan mengoptimalkan kelompok-kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan pola Pelaju (Petik Olah Jual), Pemaju (Petik Kemas Jual) dan Pengaju (Pengembangan Usaha Jasa), terus dipacu dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peningkatan produktivitas masyarakat perdesaan dilaksanakan melalui penggunaan teknologi tepat guna, inovasi dan pengembangan manajemen usaha serta pemasaran, sehingga produk-produk pertanian, peternakan dan industri kecil/mikro di perdesaan dapat semakin baik hasilnya. Pengembangan kapasitas usaha kecil/mikro di perdesaan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan usaha penduduk usia produktif, lebih inovatif, sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 9. Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan struktur kelompok umur, 26,65% penduduk Kabupaten Rembang atau 85.009 jiwa pada tahun 2005 adalah kelompok pemuda. Jumlah yang cukup besar ini merupakan aset pembangunan di Kabupaten Rembang yang diharapkan mampu menjadi kader pemimpin, pelopor, dan penggerak pembangunan, namun sekaligus tantangan yang membutuhkan keseriusan dalam hal pembinaan dan penyediaan lapangan kerja. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dengan memfasilitasi aktivitas kepemudaan baik lintas internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Fasilitasi aktivitas kepemudaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemuda yang kreatif, inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan. Pembinaan kepemudaan, dilakukan melalui berbagai pendekatan institusional seperti KNPI, Karang Taruna dan kepramukaan, serta organisasi kepemudaan lainnya.

Upaya untuk menciptakan pemuda yang kreatif dan inovatif serta memiliki wawasan berkebangsaan yang baik antara lain melalui kegiatan pertukaran pemuda antar kabupaten. Pembinaan dan pengawasan kegiatan kepemudaan juga dilakukan melalui koordinasi antar dinas instansi terkait maupun dengan lembaga non pemerintah. Sedangkan pembinaan yang berkaitan langsung dengan kepemudaan meliputi pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan dalam melaksanakan kegiatan.

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dilakukan dengan melakukan pendampingan dan pemberdayaan melalui pemberian bantuan baik berupa modal usaha maupun peralatan. Jumlah organisasi kepemudaan pada 2005 sebanyak 84 organisasi. Khusus organisasi kepemudaan karang taruna sejak 5 (tahun) tahun terakhir secara kuantitas tidak mengalami peningkatan. Hal ini terbukti pada sejak tahun 2001 – 2005 jumlah organisasi karang taruna di Kabupaten Rembang sebanyak 15 organisasi. Sedangkan organisasi pemuda non Karang Taruna mengalami peningkatan dari segi kuantitas yaitu dari 57 organisasi pada tahun 2001 menjadi 69 organisasi pada tahun 2005.

Pengembangan kepemudaan juga dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong kreativitas dan jiwa kewirausahaan generasi muda. Kegiatan tersebut adalah mengadakan kerjasama dengan kabupaten lain melalui pertukaran pemuda dan pelatihan bersama. Kegiatan kerjasama kepemudaan selama kurun waktu 2001 – 2005 sebanyak 5 kerjasama kegiatan setiap tahunnya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh organisasi kepemudaan di Kabupaten Rembang bekerjasama dengan kabupaten lain.

Pembinaan kepramukaan dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang dikoordinasikan oleh Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang juga memiliki beberapa saka antara lain Saka Bhayangkara, Saka Bahari, Saka Kencana, Saka Bhakti Husada dan Saka Wanabakti dan didukung oleh sarana prasarana seperti ketersediaan kesekretariatan dan Bumi Perkemahan.

Kondisi keolahragaan di Kabupaten Rembang relatif maju, terutama di bidang sepakbola dan atletik. Pembangunan di bidang olah raga secara kuantitas kelembagaan organisasi menunjukkan peningkatan, jumlah cabang olah raga di Kabupaten Rembang berdasarkan data tahun 2005 sebanyak 15 cabang olah raga, dengan cabang olah raga unggulan sebanyak 7 cabang olah raga yaitu Sepak Bola, Senam, Atletik, Sepak takraw, Catur, Wushu, dan Panjat tebing. Prestasi atlet yang pernah diraih oleh Kabupaten Rembang dalam kejuaraan olah raga antara lain Sepak Bola (Divisi Utama PSSI), Lari (atletik – juara sea games dan PON), Senam (PON dan PORPROV), Sepak Takraw, Catur, Panjat Tebing (PON dan POR PROV).



Jumlah cabang olahraga di Kabupaten Rembang cukup banyak dengan jenis dan jumlah yang relatif memadai. Pembinaan olah raga di Kabupaten Rembang belum berjalan dengan optimal terbukti dengan sedikitnya atlet berprestasi yang berasal dari Kabupaten Rembang. Peningkatan jumlah organisasi olah raga belum diimbangi oleh peningkatan prestasi. Kondisi ini dapat ditingkatkan melalui pembibitan, pembinaan, dan pemanduan bakat yang terarah dan berkesinambungan, yang disertai dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana olah raga yang memadai berstandar internasional. Sarana dan prasarana olah raga yang berstandar internasional di Kabupaten Rembang pada tahun 2005 belum ada. Selain itu peningkatan profesionalisme manajemen organisasi olah raga daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat juga terus dibina. Namun demikian masalah pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olah raga masih menghadapi permasalahan, antara lain minat masyarakat khususnya generasi muda untuk mengembangkan prestasi olah raga masih rendah, kualitas atlet masih rendah serta terbatasnya pemandu bakat olah raga.

Prasarana dan sarana olahraga pada tahun 2005 dirasakan kurang memadai. Di Kabupaten Rembang terdapat 1 buah Stadion Sepakbola, 1 GOR, dan 15 lapangan bulu tangkis, sedangkan prasarana olahraga lainnya belum tersedia. Untuk meningkatkan prestasi olahraga di cabang olahraga yang lain membutuhkan prasarana dan sarana olahraga yang memadai.

Selain olah raga prestasi, dalam rangka menyehatkan masyarakat, juga ada olah raga yang bersifat massal yang dikembangkan di Kabupaten Rembang seperti jalan santai, sepeda santai, senam kesegaran jasmani, senam jantung sehat. Selain itu juga terdapat beberapa kelompok olahraga yang berkembang di masyarakat antara lain kelompok senam aerobic, kelompok Senam Jantung Sehat, kelompok sepeda sehat.

## 10. Pariwisata

Kabupaten Rembang memiliki banyak potensi pariwisata yang Jenis obyeknya cukup beragam, meliputi wisata bahari, wisata agro, wisata hutan, wisata religius, dan wisata sejarah. Terdiri dari 33 obyek wisata, yaitu 14 obyek wisata terletak di Kecamatan Lasem, 5 obyek wisata di Kecamatan Rembang, 4 obyek wisata di Kecamatan Sluke, 3 obyek wisata di Kecamatan Kragan, 2 obyek wisata di Kecamatan Bulu, 2 obyek wisata di Kecamatan Sulang, dan masing-masing hanya 1 obyek wisata di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sale.

Obyek wisata yang paling potensial di Kabupaten Rembang untuk dikembangkan adalah wisata bahari dan wisata sejarah. Wisata bahari didukung oleh keberadaan pantai dan pulau-pulau kecil yang eksotik, antara lain Pantai Kartini, Pantai Pasir Putih Tasikharjo dengan Pulau Gede dan Pulau Marongan (Kec. Kaliori), Pantai Binangun dengan Pulau Putri dan Pulau Karang Gosong (Kec. Lasem), Pantai dan Tugu peringatan pendaratan pasukan Jepang (Kec. Kragan). Potensi wisata bahari ini berpotensi mendukung upaya pemerintah kabupaten dalam mewujudkan Kota Rembang sebagai *Waterfront City*, yaitu konsep pengembangan kota yang berorientasi pada pengembangan potensi bahari.

Kabupaten Rembang juga memiliki potensi wisata peninggalan sejarah kota kuno bernuansa China di Kecamatan Lasem, antara lain Kelenteng Cu An Kiong, Kelenteng Gie Yong Bio, dan Kelenteng Poo An Bio. Bangunan-bangunan peninggalan sejarah ini menjadi potensi untuk pengembangan *heritage tourism*, yaitu pariwisata dengan memanfaatkan daya tarik wisata berupa warisan masa lampau. Disamping potensi tersebut di Kecamatan Lasem juga terdapat tempat ibadah bagi umat Budha yang cukup besar yaitu Vihara Sendangcoyo, vihara ini cukup potensial untuk dijadikan obyek wisata religi.

Potensi pariwisata yang telah memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Rembang baru sebanyak 5 obyek wisata, yaitu Taman Rekreasi Pantai Kartini dan Museum Kamar Pengabdian RA Kartini, keduanya terletak di Kecamatan Rembang, Makam RA Kartini dan Wana Wisata Kartini Mantingan di Kecamatan Bulu, serta Hutan Wisata Sumber Semen di Kecamatan Sale. Salah satu upaya promosi obyek wisata di Kabupaten Rembang antara lain melalui penyelenggaraan event-event pariwisata, antara lain Festival Kartini, Pameran Foto dan Lukisan, Pentas Teater, Haul Sunan Bonang, Penjamasan Bende Becak, Haul Sultan Minangkabau (Sultan Mahmud), Haul KH. Abdullah Chafidz, Syawalan/Kupatan, Festival Thong Thong Lek, Peringatan Hari Jadi Kabupaten Rembang, Haul KH. Syayid Hamzah A.Syato, Haul KH. Bisri Mustofa, Haul KH. Ma'shum Ahmad, dan Haul KH. Baidlawi.

Jumlah wisatawan pada kelima obyek wisata yang telah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Rembang menunjukkan peningkatan walaupun kecil, dari sebanyak 132.977 orang (tahun 1999) menjadi 375.201 orang (tahun 2005). Seiring peningkatan jumlah pengunjung tersebut selama tahun 2002-2005 pendapatan asli daerah dari retribusi obyek wisata cenderung meningkat dari sebesar Rp 187.711.000,00 pada tahun 2002 menjadi Rp 676.745.110,00. Pada tahun 2005 jumlah pengunjung terbanyak terdapat di obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini (294.318 orang), selanjutnya urutan kedua di makam RA Kartini (33.312 orang), dan urutan ketiga di obyek wisata Wana Wisata Kartini Mantingan (29.897 orang).

Beberapa obyek wisata di Kabupaten Rembang masih dimiliki oleh swasta, sehingga belum bisa memberikan kontribusi terhadap PAD, padahal jumlah pengunjungnya cukup banyak. Oleh karena itu perlu dipikirkan upaya untuk pengalihan kepemilikan/pengelolaan dari pihak swasta ke pemerintah daerah.

Perkembangan obyek wisata secara langsung diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar untuk peningkatan pendapatan. Walaupun demikian, pada kurun waktu tahun 1999-2005 peningkatan jumlah pedagang masih sangat sedikit, yaitu dari sebanyak 53 pedagang menjadi 63 pedagang. Jumlah terbanyak terdapat di Taman Rekreasi Pantai Kartini (24 pedagang). Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata di Kabupaten Rembang sementara ini belum memberikan dampak terhadap perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikembangkan di masa-masa yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Rembang, diperlukan pengembangan sarana-prasarana, terutama jalan dan papan penunjuk obyek wisata. Hingga saat ini masih banyak obyek wisata di Kabupaten Rembang yang sulit diakses oleh masyarakat, sehingga tidak banyak diketahui keberadaan dan daya tarik wisatanya.

Keberadaan sarana akomodasi berupa hotel dan restoran di Kabupaten Rembang juga masih terbatas. Jumlah hotel pada tahun 2005 sebanyak 12 unit, semuanya masih berklasifikasi hotel melati, belum ada hotel berbintang. Jumlah pengunjung hotel dalam kurun waktu 1999-2005 menunjukkan peningkatan dari sebanyak 31.352 orang menjadi 35.052 orang. Perkembangan jumlah hotel dan pengunjung hotel yang kecil ini menunjukkan bahwa lama tinggal wisatawan di Kabupaten Rembang relatif singkat, sehingga tidak mampu memacu pertumbuhan jumlah hotel. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhotelan belum dapat diharapkan dalam penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jumlah restoran di Kabupaten Rembang sebanyak 17 buah dengan daya tampung sebanyak 20-80 orang. Terdapat pula sebanyak 14 buah pasar tradisional yang merata di seluruh kecamatan dan pusat perbelanjaan yang ada di 2 kecamatan berupa pertokoan dan toko swalayan.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang selama ini juga didukung oleh keterlibatan 8 asosiasi pariwisata, meliputi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (1 buah), Pramuwisata Khusus (1 buah), Kelompok Sadar Wisata (1 buah), Biro Perjalanan Wisata (2 buah), Agen Perjalanan Wisata (2 buah), dan Saka Pandu Wisata (1 buah). Keterlibatan organisasi masyarakat ini sangat mendukung pengembangan *Community Based Tourism* di Kabupaten Rembang. Melalui pendekatan ini masyarakat lokal diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata, dan memperoleh keuntungan dari kemajuan pariwisata.

#### **11. Kebudayaan**

Kabupaten Rembang memiliki kekayaan seni dan budaya yang muncul dari karakteristik masyarakat yang beragam. Keragaman budaya tersebut memberikan ciri khas budaya Rembang yang merupakan bagian dari budaya Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang antara lain Kethoprak, Wayang kulit, Sholawatan, Campursari, Thong-thong Lek, Dangdut, Karawitan, Tayub, Emprak, Orek-orek, Pathol, Barongan, Reog, Rodhat, Keroncong, Hadroh, Rebana Modern dan Solo Organ. Kesenian tersebut merupakan aset budaya dan kekayaan budaya Kabupaten Rembang. Jumlah kelompok kesenian keseluruhan pada tahun 2005 sebanyak 298 kelompok yang tersebar di seluruh kecamatan di Rembang. Keragaman kegiatan budaya meliputi Sedekah Bumi/Merti Desa, larungan, dan hari jadi Kabupaten Rembang. Selain itu juga ada peringatan Haul banyak kyai yang pernah ada di Kabupaten Rembang. Untuk memperkaya dan memperkenalkan keragaman budaya Kabupaten Rembang pernah mengirimkan duta-duta kebudayaan baik luar daerah, nasional, dan mancanegara.

Aspek budaya Kabupaten Rembang ini merupakan modal kearifan lokal yang sangat penting dan potensial bagi Kabupaten Rembang sebagai bagian dari identitas budaya Jawa Tengah untuk mengembangkan diri dalam jangka panjang. Pembangunan yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif dari budaya asing dan globalisasi yang kontraproduktif dengan nilai-nilai budaya lokal.

#### **12. Agama**

Mayoritas penduduk Kabupaten Rembang merupakan pemeluk agama Islam. Pada tahun 2005 pemeluk agama Islam sebesar 98,71%, Katholik 0.54%, Kristen 0.53%, Budha 0.20%, dan Hindu 0.02%. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi antar umat beragama cukup harmonis. Keharmonisan tersebut salah satunya dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang ada disekitar warga yang majemuk. Jumlah tempat ibadah yang tercatat pada tahun 2005 adalah : masjid sebanyak 498 buah, mushola 2.732 buah, gereja kristen 25 buah, gereja katholik 9 buah, Pura/kuil sebanyak 1 buah serta vihara/klenheng sebanyak 5 buah.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah yang memiliki pondok pesantren yang cukup banyak. Pada tahun 2005 jumlah pondok pesantren sebanyak 86 dengan jumlah santri 15.194 orang.

#### **13. Ketransmigrasian**

Di era otonomi daerah saat ini, penyelenggaraan transmigrasi mengalami perubahan dan memasuki paradigma baru. Paradigma baru penyelenggaraan transmigrasi adalah perubahan dari *supply approach* yang ditangani secara sentralistik menjadi *demand approach* yang perencanaan dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Konsekuensi perubahan kebijakan semacam ini pembangunan transmigrasi

tidak lagi diposisikan sebagai program pemerintah pusat, tetapi sepenuhnya menjadi program pemerintah daerah bersama masyarakat. Pendekatan pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian adalah adanya kebutuhan masyarakat bersama pemerintah daerah provinsi dan atau kabupaten untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

Penyelenggaraan transmigrasi harus melalui kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota daerah asal dengan provinsi dan kabupaten daerah tujuan. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh pemerintah provinsi dan kabupaten daerah asal dengan pemerintah provinsi dan kabupaten daerah tujuan. Dengan demikian wajar apabila kedua pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berpindah (transmigran) sedikit mengalami hambatan, karena banyak pemerintah daerah yang belum siap baik dari sisi SDM maupun keuangan untuk memberangkatkan calon transmigran.

Jumlah transmigran asal Kabupaten Rembang sejak tahun 2004 dan 2005 sebanyak 17 KK (73 jiwa), yaitu tahun 2004 sebanyak 9 KK dan pada tahun 2005 sebanyak 8 KK. Pemerintah Kabupaten Rembang telah berupaya keras dalam peningkatan penyelenggaraan pelayanan bidang transmigrasi antara lain melalui kebijakan pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT) di daerah tujuan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dengan kerjasama dan koordinasi antar daerah diharapkan penetapan lokasi yang dijadikan pemukiman transmigran sesuai dengan harapan dan kebutuhan calon transmigran serta ada jaminan legalitas atas hak kepemilikan tanah serta hak untuk mendapatkan fasilitas bagi transmigran.

### **C. Kondisi Perekonomian Daerah**

Besarnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 di Kabupaten Rembang pada tahun 2002 sebesar Rp 1.637.136,950 juta. Pada tahun 2005 nilai PDRB ADHK tahun 2000 menjadi sebesar Rp 1.825.560,590 juta. Dalam kurun waktu 2002-2005, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 3,70%. Walaupun demikian, jika dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) rata-rata pertumbuhannya cukup tinggi, yaitu sebesar 11,27% dari sebesar 2.012.631,52 juta pada tahun 2002 menjadi sebesar Rp 2.770.982,88 juta pada tahun 2005.

Dilihat dari strukturnya, tiga sektor atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Rembang (ADHK tahun 2000) dalam kurun waktu 2002-2005 adalah sektor pertanian (dalam arti luas) sebesar 49,28% - 51,13%; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15,44% - 16,69%; dan sektor jasa-jasa sebesar 12,41% - 12,61%. Kondisi yang sama juga terjadi pada PDRB ADHB, dengan kontribusi terbesar dari sektor pertanian (47,32%-50,76%); sektor perdagangan, hotel dan restoran (17,05% - 17,64%); dan sektor jasa-jasa (11,85% - 12,58%). Dalam kurun waktu tersebut tidak terjadi pergeseran struktur PDRB, baik atas dasar harga konstan tahun 2000 maupun atas dasar harga berlaku.

Besarnya PDRB perkapita ADHK tahun 2000 Kabupaten Rembang pada tahun 2005 sebesar Rp 3.102.178,00, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2002 sebesar 2.858.440,00 dengan rata-rata pertumbuhan sangat kecil, yaitu hanya sebesar 2,93%. PDRB perkapita ADHB pada tahun 2005 sebesar Rp 4.708.736,00; juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2002 sebesar Rp 3.514.053,00, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 10,14%. Nilai PDRB perkapita tersebut menggambarkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Rembang

masih rendah, karena Nilai PDRB perkapita tersebut juga masih dibawah rata-rata PDRB perkapita Jawa Tengah, yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp 4.689.985,08 (ADHK tahun 2000), dan sebesar Rp 8.777.124,09 (ADHB).

## 1. Perdagangan

Jenis sarana perdagangan yang terdapat di Kabupaten Rembang pada tahun 2005 adalah pasar umum sejumlah 12 unit, pasar hewan 2 unit, pasar lokal 12 unit, pasar sepeda 1 unit dan mini market 1 unit. Total jumlah SIUP yang diterbitkan sebanyak 433 buah meliputi 412 buah SIUP golongan usaha Kecil, 15 buah SIUP golongan usaha Menengah, 6 buah SIUP golongan usaha Besar. Berdasarkan bentuk usaha, Total surat ijin yang diterbitkan sejumlah 446 buah meliputi surat ijin yang diterbitkan untuk PT sejumlah 13 surat, untuk Koperasi sejumlah 15 surat, untuk CV sejumlah 32 surat, dan untuk Perusahaan Perorangan sejumlah 386 surat.

Jenis perdagangan potensial yang ada di kabupaten Rembang meliputi perdagangan sembako, perdagangan hasil pengolahan ikan, perdagangan hasil produksi pertanian, peternakan, maupun kehutanan, serta perdagangan bahan material bangunan. Selama tahun 2001-2005 jumlah pedagang di Kabupaten Rembang mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pada tahun 2005 terdapat pedagang skala kecil sejumlah 3.929 orang, pedagang skala menengah sejumlah 152 orang, sementara jumlah pedagang skala besar 16 orang. Sedangkan jumlah pedagang di pasar dalam skala kecil ada sejumlah 5.228 unit, terdiri dari 1.593 unit pedagang lesehan, 2.896 unit pedagang los dan 739 unit pedagang kios.

## 2. Industri

Pada periode 2001-2005 perkembangan di bidang industri memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan positif dalam **industri pengolahan** terlihat pada golongan industri besar, industri sedang maupun industri kecil. Industri pengolahan skala besar pada tahun 2005 terdapat 3 buah, dengan tenaga kerja sebanyak 399 orang dan investasi sebesar 2,8 milyar Rupiah. Rata-rata pertumbuhan industri pengolahan skala sedang sebesar 10,45%, dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja sebesar 16,33% dan investasi sebesar 11,04%. Pada tahun 2005 jumlah industri pengolahan skala sedang tercatat sebanyak 184 unit dengan tenaga kerja sejumlah 2.835 dan jumlah investasi 17,01 Milyar Rupiah. Sedangkan rata-rata pertumbuhan industri pengolahan skala kecil sebesar 1,34% dengan jumlah tenaga kerja 1,41% dan investasi sebesar 1,37%. Pada tahun 2005, Jumlah industri pengolahan skala kecil tercatat sebanyak 1.136 unit dengan 3.408 tenaga kerja dan investasi sebesar 13,63 Milyar Rupiah.

Kelompok industri **logam, mesin dan elektronika** juga menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif baik di tingkat industri besar, industri sedang maupun industri kecil. Pada jenis industri ini, tingkat pertumbuhan industri skala besar terlihat lebih menonjol. Sampai dengan tahun 2005 tercatat jumlah industri skala besar sebanyak 4 unit dengan jumlah tenaga kerja 307 orang dan jumlah investasi 3,1 Milyar Rupiah. Rata-rata pertumbuhan jumlah industri skala sedang pada kurun waktu 2001-2005 sebesar 3,82%, dengan jumlah tenaga kerja tumbuh sebesar 4,31% dan investasi tumbuh sebesar 4,29%. Pada tahun 2005, jumlah industri skala sedang sebanyak 370 unit dengan jumlah tenaga kerja 4.548 orang dan jumlah investasi sebesar 174 juta Rupiah. Sedangkan pada industri skala kecil, rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,89% dengan jumlah tenaga kerja tumbuh 0,45% dan jumlah investasi tumbuh sebesar 1,89%. Pada tahun 2005 jumlah industri skala kecil tercatat sebanyak 1.308 unit, dengan jumlah tenaga kerja 4.124 orang dan jumlah investasi 19,6 Milyar Rupiah.

Untuk kategori **industri kimia**, terlihat ada pertumbuhan positif yang terjadi pada tingkat industri skala besar saja, karena tidak ada industri skala sedang maupun skala kecil. Rata-rata pertumbuhan Jumlah industri besar selama kurun waktu 2001-2005 tumbuh sebesar 10,00%, jumlah tenaga kerja tumbuh sebesar 4,52% dan jumlah investasi tumbuh sebesar 8,33%. Pada tahun 2005, jumlah industri kimia skala besar sebanyak 3 unit dengan jumlah tenaga kerja 271 orang dan jumlah investasi sebesar 1,7 milyar Rupiah.

Dalam Kelompok industri **tekstil dan aneka** hanya ada industri skala sedang dan skala kecil dan tidak ada industri skala besar. Tingkat pertumbuhan industri sedang lebih menonjol dibanding industri kecil. Rata-rata pertumbuhan jumlah industri sedang sebesar 36,70% dengan jumlah tenaga kerja tumbuh sebesar 41,04% dan jumlah investasi tumbuh sebesar 40,35%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan jumlah industri kecil sebesar 13,01% dengan jumlah tenaga kerja tumbuh sebesar 13,76% dan jumlah investasi tumbuh sebesar 13,01%.

Kelompok industri **agro dan hasil hutan** menunjukkan adanya pertumbuhan pada industri skala besar yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada industri skala sedang maupun skala kecil. Rata-rata pertumbuhan industri besar dari tahun 2001-2005 sebesar 22,52%, jumlah tenaga kerja 11,57%, jumlah investasi 18,69%. Pada tahun 2005 tercatat terdapat 8 industri skala besar dengan tenaga kerja sejumlah 887 orang dan jumlah investasi sebesar 5,8 milyar Rupiah. Sedangkan Rata-rata pertumbuhan jumlah industri skala sedang hanya sebesar 4,69 %, jumlah tenaga kerja tumbuh sebesar 4,69% dan jumlah investasi tumbuh sebesar 10,90%. Pada tahun 2005 terdapat 475 industri skala sedang, dengan 7.125 tenaga kerja dan jumlah investasi sebesar 38 milyar Rupiah. Di lain sisi, rata-rata pertumbuhan jumlah industri skala kecil sebesar 1,29%, jumlah tenaga kerja tumbuh 1,30% dan jumlah investasi tumbuh sebesar 1,29%. Pada tahun 2005, terdapat 1.128 unit usaha industri skala kecil, dengan 2.256 tenaga kerja dan jumlah investasi 16,92 milyar Rupiah.

Selain dari kelompok industri diatas, **industri Garam Rakyat** menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Produksi garam rata-rata per tahun sebesar 150.400 ton. Jumlah pengusaha garam rakyat pada tahun 2005 sebesar 805 orang dengan jumlah pekerja 4.880 orang dan luas tambak garam 1.184,965 ha. Hampir sepanjang pantai di wilayah Kabupaten Rembang diusahakan untuk usaha garam yaitu meliputi Kecamatan Kaliori seluas 524,51 ha, Kecamatan Rembang seluas 262,357 ha, Kecamatan Lasem seluas 364,35 ha, Kecamatan Sluke seluas 21,426 ha, Kecamatan Kragan seluas 2 ha dan Kecamatan Sarang seluas 28,322 ha. Kualitas garam yang dihasilkan di Kabupaten Rembang masih tergolong rendah dengan kandungan NaCl dibawah standart yang sebagian besar untuk mencukupi kebutuhan konsumsi. Namun demikian masih berpeluang untuk ditingkatkan kualitasnya guna mencukupi kebutuhan garam industri dengan meningkatkan kadar NaCl di atas 98%, mengingat secara nasional Indonesia masih mengimport garam untuk mencukupi kebutuhan garam industrinya.

### **3. Koperasi dan UMKM**

Sebagai sokoguru perekonomian bangsa Indonesia, keberadaan koperasi seharusnya mampu menjadi penyangga perekonomian rakyat, Untuk itu perkembangan koperasi di Kabupaten Rembang perlu menjadi perhatian bersama. Pada tahun 2005, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Rembang telah terjadi peningkatan dua kali lipat lebih dibanding keadaan pada tahun 2001. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi primer tumbuh rata-rata sebesar 0,44%. Jumlah koperasi aktif tumbuh sebesar 12,56%. Sedangkan jumlah tenaga kerja tumbuh sebesar 4,58%, dan pertumbuhan jumlah modal sebesar 4,60%. Jumlah unit koperasi pada

tahun 2005 terdapat 397 koperasi primer aktif, dengan jumlah anggota mencapai 32.694 anggota yang mempekerjakan 701 orang. Jumlah modal/aset koperasi sekitar Rp.161,75 milyar. Sedangkan pertumbuhan koperasi primer yang tidak aktif dalam lima tahun antara 2001-2005 adalah sebesar 10,10% dan Jumlah unit koperasi primer yang tidak aktif sekitar 16 koperasi.

Selama periode tersebut, pertumbuhan negatif jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang aktif yaitu sebesar minus 1,18%, demikian juga pertumbuhan jumlah tenaga kerja minus 1,94% dan pertumbuhan modal atau asset minus 0,13%. Jumlah unit KUD sebanyak 16 unit usaha dengan tenaga kerja 87 orang dan modal/aset berjumlah Rp.22,73 milyar. Pertumbuhan jumlah unit koperasi simpan pinjam dari 3 unit pada tahun 2001 menjadi 32 unit pada tahun 2005 atau tumbuh sebesar rata-rata 88,93%. Sedangkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja sebanyak 7,37%, dan pertumbuhan jumlah modal/asset sebesar 4,06%. Jumlah unit Koperasi Simpan Pinjam berjumlah 32 buah yang mempekerjakan 387 tenaga kerja. Jumlah modal koperasi simpan pinjam ini mencapai Rp.128,3 milyar.

Sementara di bidang UMKM, pertumbuhan jumlah unit usaha terlihat positif sebesar 9,85%. Pertumbuhan unit Usaha kecil tumbuh sebesar 9,44% dan pertumbuhan jumlah tenaga kerja sejumlah 11,10 %, sedangkan usaha menengah tumbuh sebesar lebih tinggi yaitu 23,34%. Pada tahun 2005 tercatat jumlah Usaha Kecil dan Menengah ada 8.362 unit usaha terdiri dari Usaha Kecil 8.060 unit, dan usaha menengah sebanyak 304 unit usaha. Jumlah tenaga kerja pada usaha kecil ada 16.570 orang. Jumlah UMKM yang dibina sebanyak 66 unit atau rata-rata pertumbuhan jumlah UMKM yang dibina adalah 8,09%. Pertumbuhan KSP/USP yang dibina adalah 2,91% dan sebanyak 100 unit koperasi dalam pembinaan. KSP/USP dalam pengawasan tumbuh sebesar 32,29%, dan terdapat 29 unit koperasi dalam pengawasan. Di lain pihak ada pertumbuhan negatif dalam pemberian ijin KSP/USP sebesar minus 4,95%, dan juga terlihat adanya pertumbuhan sumber pembiayaan lain dari Kementerian Koperasi sebesar 264%. Sedangkan jumlah koperasi aktif secara keseluruhan menurun 20%.

#### **4. Penanaman Modal**

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal atau aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang mempunyai nilai ekonomis. Investasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mendapatkan laba, dan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial termasuk mendukung kesiapan masyarakat dalam investasi bisnis. Investasi juga meliputi investasi portofolio atau surat berharga dan investasi riil. Investasi riil meliputi investasi untuk eksploitasi sumberdaya alam (tambang, agro industri atau perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata alam), investasi proses produksi (membangun instalasi pengolahan atau pabrik), investasi properti dan infrastruktur (perhotelan, kelistrikan, pelabuhan, jalan tol), investasi berbasis pengetahuan (piranti lunak komputer, media massa, telekomunikasi), investasi di bidang industri pendukung (transportasi, pergudangan atau logistik), dan investasi di bidang restoran dan hiburan. Selain itu ada juga investasi riil yang bergerak di bidang jasa seperti jasa keuangan atau finansial (jasa perbankan, pembiayaan, asuransi), investasi di bidang perdagangan (jual beli hasil produk perkebunan atau hasil alam), investasi di bidang perdagangan pemasaran (toko, swalayan, supermarket, mall, pusat grosir, pasar, sentra penjualan/perdagangan, pusat perkulakan, pusat pelelangan), dan investasi pada industri jasa konsultan.

Kabupaten Rembang mempunyai potensi penanaman modal yang cukup baik di bidang pertambangan seperti pasir kuarsa, batu gamping, andesit,

tanah liat/ lempung, trass, fosfat dan batubara. Pada industri kelautan peluang investasi antara lain galangan kapal kayu, garam rakyat, serta pengolahan hasil laut. Industri kerajinan seperti pengolahan mebel kayu, kuningan/tembaga maupun batik tulis. Demikian juga di sektor manufaktur, pariwisata, perdagangan maupun pertanian masih terbuka peluang penanaman modal seperti pengembangan hotel dan restoran, industri semen, industri keramik, industri pengalengan buah mangga, pengolahan mete, industri gula, industri pengolahan kelapa dan sebagainya. Sampai dengan tahun 2005 investasi swasta di Kabupaten Rembang tercatat sebesar Rp 317.785.000.000,- sedangkan investasi pemerintah sebesar Rp 24.145.790.000,-. Investasi ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2003 dimana Investasi swasta sebesar Rp 219.359.000.000 dan investasi pemerintah sebesar Rp 23.368.360.000,-. Nilai Investasi di Kabupaten Rembang mulai Tahun 2001–2005 didominasi oleh sektor swasta dengan rata-rata 88,8% dari total investasi, sedangkan PMA maupun PMDN masih sedikit yaitu masing-masing 1 perusahaan.

Salah satu investasi yang cukup menonjol di Kabupaten Rembang terdapat pada industri pengolahan ikan dan pertambangan. Industri pengolahan ikan yang berasal dari investasi dalam negeri adalah CV Karya Mina Putra dengan tenaga kerja kurang lebih 1.200 orang dan nilai investasi mencapai Rp. 35 milyar. Sedangkan yang berasal dari investasi asing adalah PT Ninbendo Agung (industri pengeringan/pengawetan ikan), dengan nilai investasi sebesar Rp. 316.065.000,00 dan US\$95.000. Industri pertambangan juga mengalami pertumbuhan terutama tambang galian C berbasis kapur seperti PT. SAF dan PT.ICCI. Kinerja investasi dalam tahun 2002-2005 menunjukkan adanya peningkatan investasi yang masuk ke Kabupaten Rembang. Dilihat dari sektornya, semua investasi asing tersebut masuk kedalam sektor perikanan dan kelautan.

## 5. Kelautan dan Perikanan

Dengan garis pantai sepanjang  $\pm$  63,5 km, Kabupaten Rembang memiliki enam kecamatan yang terletak pada wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Kaliore, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang. Kondisi ini merupakan peluang bagi Kabupaten Rembang untuk menggali potensi perikanan dan kelautan yang cukup menjanjikan. Potensi perikanan tangkap yang dominan adalah ikan layang, tambang, kembung, selar, tongkol, cumi-cumi, kurisi, teri, manyung, layur, kakap, dan rajungan. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2001-2005 cenderung mengalami penurunan dari sebesar 51.365,4 ton menjadi 31.433,46 ton namun demikian nilai produksi justru mengalami peningkatan dari senilai Rp.115.710.052.200,- menjadi senilai Rp 117.724.913.200,-. Mengingat potensi perikanan tangkap dalam jangka panjang akan menjadi tumpuan perekonomian daerah, maka upaya produksi perikanan tangkap perlu segera mendapat perhatian bagi setiap pemangku kepentingan.

Kecenderungan terjadinya penurunan produksi perikanan tangkap pada kurun waktu tersebut kemungkinan terkait dengan masalah *overfishing*, penggunaan alat yang tidak ramah lingkungan, serta degradasi lingkungan pesisir dan terumbu karang. Penangkapan ikan secara berlebih tanpa memperhatikan aspek kelestariannya secara langsung akan mempengaruhi kemampuan regenerasi dan perkembangan ikan, sehingga berdampak pada penurunan kuantitas ikan di perairan laut. Sedangkan kerusakan terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat ribuan jenis ikan dan organisme laut menyebabkan berkurangnya populasi ikan di perairan Rembang. Penggunaan alat tangkap ikan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem perairan masih ditemui di Kabupaten Rembang, yaitu jaring cotok. Dilihat dari fisiknya, jaring cotok merupakan alat tangkap ikan demersal (dasar laut) yang



memiliki dampak negatif hampir sama dengan jaring *trawl* (pukat harimau). Jumlah pemilik jaring cotok di Kabupaten Rembang menunjukkan kecenderungan meningkat dari 153 unit pada tahun 1999 menjadi 265 unit pada tahun 2005.

Perkembangan perikanan tangkap di Kabupaten Rembang hingga tahun 2005 ditunjang dengan sarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sebanyak 1 unit yaitu berlokasi di Kelurahan Tasik Agung Kecamatan Rembang. Fasilitas PPP Tasik Agung ini masih belum memadai, baik fasilitas pokok, fasilitas fungsional, maupun fasilitas penunjang. Masih kurangnya fasilitas PPP Tasik Agung ini menjadi penyebab sedikitnya jumlah kapal yang mendarat. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Rembang sebanyak 12 unit. Sementara itu jumlah perahu/kapal selama kurun waktu tahun 1999 - 2005 meningkat dari 2.836 unit menjadi 4.112 unit. Jenis kapal didominasi perahu motor tempel (88,77%), lainnya adalah kapal motor (12,12%) dan perahu tanpa motor (0,89%). Untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap diperlukan pengembangan sarana dan prasarana perikanan, terutama kapal berskala besar, sehingga mampu mencapai wilayah perairan dalam dengan hasil tangkap yang lebih banyak. Seiring dengan penambahan jumlah kapal, jumlah nelayan di Kabupaten Rembang juga menunjukkan peningkatan, dari sebanyak 16.035 orang pada tahun 1999 menjadi 16.577 orang pada tahun 2005. Sebagian besar (69,18%) termasuk kategori nelayan pandega (nelayan yang tidak memiliki kapal/perahu sendiri atau bekerja pada pemilik kapal, dan lainnya adalah nelayan juragan (30,81%). Proporsi nelayan yang didominasi nelayan pandega ini menyebabkan tingkat kesejahteraan nelayan secara umum di Kabupaten Rembang masih rendah. Keuntungan besar lebih banyak dinikmati oleh nelayan juragan sebagai pemilik kapal. Selain itu, mereka juga bergantung pada hasil perikanan, dan tidak memilih alternatif mata pencaharian lain yang dapat menunjang perekonomian keluarga.

Sementara itu produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang masih belum didukung oleh industri pengolahan ikan yang memadai. Selama ini sebagian besar pengolahan ikan di Kabupaten Rembang dilakukan secara tradisional seperti pindang, ikan asin dan ikan asap, sehingga belum bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi produk dan juga pembangunan klaster-klaster pengolahan. Besarnya produksi perikanan juga didukung oleh pemasaran produk perikanan yang luas. Jumlah hasil perikanan yang diekspor masih terlalu kecil dibandingkan total produksi, sehingga nilai jualnya rendah dan belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB Kabupaten Rembang. Hasil produksi perikanan yang tinggi juga belum diikuti dengan peningkatan jumlah konsumsi ikan oleh masyarakat di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi hasil perikanan.

Selain perikanan tangkap, Kabupaten Rembang juga memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup banyak. Luas lahan pertambakan di Kabupaten Rembang mencapai 1.657,68 ha. Jenis komoditas perikanan yang dibudidayakan antara lain Udang Windu, Udang Vanamei dan Bandeng. Jumlah produksi perikanan budidaya menunjukkan kecenderungan meningkat pada kurun waktu 2001-2005 dari 119,56 ton menjadi 172,29 ton tahun 2005 sedangkan nilai produksi perikanan budidaya pada kurun waktu tersebut justru menurun dari senilai Rp 2.595.120.750,- menjadi senilai Rp 1.729.588.500,- pada Potensi perikanan darat di Kabupaten Rembang terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan perairan umum. Budidaya ikan air tawar kolam di Kabupaten Rembang tersebar di Kecamatan Pamotan, Sale, Rembang, Bulu dan Kecamatan Sulang dengan luas mencapai 15,14 ha. Dari luasan tersebut, baru sebesar 9,5 ha yang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat

dengan jenis komoditas utama Ikan Lele, Nila dan Tawes. Jumlah produksi perikanan air tawar di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tersebut menunjukkan kecenderungan penurunan dari sebanyak 10,90 ton senilai Rp 59.961.000,00 menjadi 8,11 ton senilai Rp 78.871.000,00. Potensi perairan umum di Kabupaten Rembang terdiri dari sungai, waduk dan rawa dengan luas produksi berturut-turut 44 ha, 94 ha dan 24 ha. Dalam kurun waktu tahun 2001-2005 terjadi penurunan jumlah produksi, yaitu dari sebanyak 31,19 ton senilai Rp 109.172.000,00 menjadi 11,70 ton senilai Rp 43.992.000,00. Penurunan produksi perikanan di perairan umum kemungkinan disebabkan oleh penurunan kualitas perairan akibat penggunaan bahan beracun dalam penangkapan ikan, penggunaan insektisida untuk pertanian, maupun limbah domestik.

Selain perikanan, potensi sumberdaya pesisir dan lautan lainnya adalah mangrove, terumbu karang dan pulau-pulau kecil yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata bahari. Gugusan mangrove tersebar di Kecamatan Kaliori seluas 4,2 ha, Kecamatan Rembang seluas 15 ha dan Kecamatan Lasem seluas 5,6 ha. Keberadaan mangrove ini sangat penting untuk melindungi pantai dari abrasi yang dapat merugikan masyarakat. Sampai dengan tahun 2005 abrasi pantai di Kabupaten Rembang telah mencapai 37,5 ha dan akresi sebesar 27,5 ha. Sedangkan 19 gugusan terumbu karang yang terdapat di Kabupaten Rembang meliputi; Karang Gondoh ( $\pm$  9 Ha); Karang Pulau Marongan ( $\pm$  60 Ha); Karang Pulau Penowo ( $\pm$  2,4 Ha); Karang Pulau Gede ( $\pm$  37 Ha); Karang Pulau Cilik ( $\pm$  7 Ha); Karang Pulau Tubanan ( $\pm$  1 Ha); Karang Pulau Tapa ( $\pm$  1 Ha); Karang Pulau Kelem ( $\pm$  7,1 Ha); Karang Pulau Wen-wen ( $\pm$  4,2 Ha); Karang Pulau Masaran ( $\pm$  6,9 Ha); Karang Pulau Dorangan ( $\pm$  10 Ha); Karang Seliro ( $\pm$  6 Ha); Karang Moro ( $\pm$  6 Ha); Karang Pulau Gurian ( $\pm$  3,8 Ha); Karang Siwalan ( $\pm$  20 Ha); Karang Jetak ( $\pm$  21 Ha) dan Karang Gosong ( $\pm$  4,7 Ha). Pengelolaan terumbu karang ini perlu mendapatkan perhatian karena terumbu karang sangat rentan terhadap kerusakan akibat perubahan lingkungan maupun aktivitas manusia. Padahal terumbu karang memiliki peran yang sangat besar dalam proses perkembangbiakan dan pembesaran ikan. Untuk jangka panjang, pengelolaan pesisir dan lautan di Kabupaten Rembang perlu memperhatikan pembagian zonasi/kawasan, meliputi kawasan wisata bahari, kawasan sabuk hijau (mangrove), kawasan konservasi laut (terumbu karang), kawasan budidaya perikanan, kawasan pengolahan ikan, kawasan produksi garam rakyat, dan kawasan tempat pelelangan ikan. Pembagian zonasi tersebut memudahkan pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, sehingga kelestariannya dapat terjaga.

## **6. Pertanian**

Selama kurun waktu 2001-2005 sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Rembang terutama dari sumbangan produksi tanaman pangan. Oleh karena itu perkembangan produksi tanaman pangan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat. Dengan sebagian besar kondisi sawah tadah hujan, luas panen padi Kabupaten Rembang sangat fluktuatif. Selama kurun waktu 2001–2005, luas panen tertinggi tercapai pada tahun 2001 dengan luas 40.038 ha dan terendah tahun 2003 seluas 22.523 ha. Fluktuasi luas panen akan berdampak pada naik turunnya produksi padi, produksi padi tahun 2001 sebanyak 202.763 ton dengan tingkat produktivitas 50,64 kw/ha sedangkan produksi tahun 2003 sebanyak 107.547 ton dengan tingkat produktivitas 47,75 kw/ha. Pada tahun 2005, produksi padi Kabupaten Rembang sebesar 117.653 ton dari luas areal panen 28.719 ha. Namun penurunan produksi dan produktivitas tanaman padi tersebut tidak menyebabkan defisit kebutuhan pangan pokok beras, karena periode tahun 2001-2005 Kabupaten Rembang masih surplus beras sebesar 2.289 ton s/d 55.499 ton dengan rincian

tahun 2001 surplus 55.681 ton, tahun 2002 surplus 49.305 ton, tahun 2003 surplus 2.289 ton, tahun 2004 surplus 50.261 ton dan tahun 2005 surplus 7.861 ton.

Tanaman jagung sebagai substitusi padi juga merupakan komoditas pangan strategis di Kabupaten Rembang. Komoditas jagung juga mengalami fluktuasi produksi selama tahun 2001-2005. Pada awal periode ini terjadi penurunan produksi jagung sebagai akibat berkurangnya luas areal panen pada tahun 2002 dan 2003 dari produksi 58.242 ton menjadi 45.422 ton, dengan masing-masing penurunan sebesar 20,75% dan 22,01%. Kenaikan produksi jagung baru terjadi pada tahun 2004 dan tahun 2005 yaitu sebesar 62.984 ton atau naik 38,66% dan 74.006 ton atau naik 17,50%. Pada tahun 2005 luas panen jagung sebesar 27.188 ha, menghasilkan produksi jagung sebanyak 73.006 ton dengan produktivitas 27,22 kw/ha.

Komoditas hortikultura di Kabupaten Rembang sebagian besar masih merupakan usahatani subsisten. Dari total Luas tanaman sayuran tahun 2005 sebesar 1.844 ha, tanaman cabe merupakan komoditas yang paling banyak diusahakan petani dengan luas 833 ha, kemudian diikuti tomat 371 ha, terong 37 ha, bawang merah 296 ha dan mentimun 258 ha. Adapun komoditas unggulan Kabupaten Rembang dari kelompok sayur-sayuran adalah tanaman cabe merah varietas tampar, dimana secara khusus mempunyai beberapa keistimewaan seperti rasa pedas cukup tinggi, buah tidak mudah busuk, dan produktivitasnya cukup tinggi dapat mencapai 11,25 ton/ha, serta harganya di pasaran bersaing. Luas panen cabe Kabupaten Rembang tahun 2001-2005 fluktuatif, tertinggi tahun 2001 seluas 3.268 ha dengan produksi 5.823 kw dan terendah tahun 2005 seluas 833 ha dengan produksi 7.347 kw. Selain tanaman sayur-sayuran, Kabupaten Rembang juga terkenal produksi tanaman buah-buahan, antara lain mangga jenis Arum Manis dan Gadung. Duku Woro, Durian Criwik dan buah yang khas Kabupaten rembang yaitu buah Kawis atau Kawista.

Sementara itu tanaman perkebunan yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Rembang hingga tahun 2005 adalah komoditas kelapa dengan areal seluas 7.423 ha (atau 48% dari seluruh luas areal perkebunan di Kabupaten Rembang), kemudian tebu 4.398 ha (28%), dan kapuk randu 1.669 ha (11%). Kabupaten Rembang mempunyai potensi cukup besar untuk pengembangan komoditas tebu dan kelapa. Pengembangan tanaman perkebunan selain meningkatkan kapasitas produksi dari tanaman yang sudah ada, dapat juga dicari tanaman alternatif yang bernilai ekonomis tinggi seperti tanaman-tanaman kelompok biofarmaka yang berkhasiat obat, dan tanaman jarak pagar (*Jatropha curcas L.*) yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif, sebagai bahan baku industri dan lain-lain.

Sedangkan potensi peternakan masih cukup diminati untuk diusahakan di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari jumlah petani yang mengusahakannya dan banyaknya ternak yang dipelihara. Dari tahun 2001-2005 jumlah peternak fluktuatif namun jumlah populasi ternak ketiga jenis tersebut mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2005, jumlah peternak dan populasi ternak di Kabupaten Rembang berturut-turut dari angka tertinggi adalah ayam buras 69.814 peternak (488.231 ekor), sapi potong 46.561 peternak (97.257 ekor) dan kambing 22.720 peternak (86.604) ekor. Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah penghasil bibit (bakalan) sapi potong di Jawa Tengah, dengan jenis/ras antara lain Peranakan Ongole (PO), American Brahman, Simmental, dan Limousine. Potensi ini didukung oleh adanya kegiatan pelayanan IB (Inseminasi Buatan), tersedianya tanah-tanah

marginal sebagai lahan HPT (Hijauan Pakan Ternak), dan permintaan pasar akan sapi potong maupun daging yang selalu meningkat dan tersedianya pasar hewan yaitu Pasar Hewan Rembang, Pamotan dan Pasar Hewan Kragan.

Sektor pertanian telah dan terus dituntut berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan PDRB, penyediaan pangan dan bahan baku industri, penyedia lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Selain kontribusi yang bersifat langsung, sektor pertanian juga memiliki kontribusi yang tidak langsung berupa dampak berganda (*multiplier effect*), yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Dampak berganda tersebut relatif besar sehingga sektor pertanian menjadi andalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor pertanian juga menjadi andalan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan melalui pengembangan usaha berbasis pertanian. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, pengembangan sektor pertanian perlu didorong untuk peningkatan nilai tambah produk dengan usaha diluar budidaya (*off farm*) seperti industri pengolahan pangan baik di tingkat rumah tangga maupun industri besar. Hal ini akan menutupi kekurangan Kabupaten Rembang dalam hal budidaya karena terbatasnya sumber air, sehingga peningkatan kesejahteraan petani dapat diwujudkan. Mengingat keterbatasan air untuk budidaya pertanian, maka konservasi tanah dengan bahan-bahan organik menjadi pilihan terbaik agar kesuburan tanah dapat terjaga.

## **7. Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan jumlah yang cukup, tersedia setiap saat di semua wilayah, mudah diperoleh rumah tangga, aman dikonsumsi, dan pada tingkat harga yang terjangkau. Dari pengertian ini ketahanan pangan mencakup beberapa dimensi yang mencakup; (1) ketersediaan pangan, (2) distribusi dan konsumsi pangan, (3) akses pangan oleh masyarakat, (4) diversifikasi pangan, dan (5) keamanan pangan. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh.

Ketersediaan bahan pangan pokok terutama dicukupi oleh ketersediaan beras. Sepanjang tahun 2001-2005 ketersediaan beras masih fluktuatif mengikuti tingkat produksi komoditas padi. Angka ketersediaan beras tertinggi tercapai pada tahun 2001 sebesar 108.232 ton dan terendah tahun 2003 sebesar 56.075 ton, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 62.802 ton. Sementara itu diversifikasi pangan di Kabupaten Rembang sangat ditunjang oleh ketersediaan palawija. Sepanjang tahun 2000-2005 ketersediaan bahan pangan dari komoditas palawija masih fluktuatif, angka tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 58.792 ton dan terendah tahun 2003 sebesar 36.338 ton. Perkembangan kondisi pertanian yang menghasilkan ketersediaan bahan pangan akan mendukung program ketahanan pangan dalam arti luas. Dari angka neraca bahan makanan dapat dilihat kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Kebutuhan terhadap pangan pokok, yaitu beras, di Kabupaten Rembang telah surplus sepanjang tahun 2001-2005 antara 2.289 ton s/d 55.499 ton. Komoditas palawija jagung di Kabupaten Rembang surplus sepanjang tahun 2001-2005 dengan jumlah 26.776 ton s/d 49.450 ton. Sementara komoditas kedelai pada tahun 2001-2005 mengalami defisit antara 1.392 ton s/d 3.676 ton, dan kacang tanah defisit pada tahun 2000 sebesar 311 ton. Komoditas lainnya yang juga defisit adalah ubi kayu, ubi jalar, daging sapi, telur dan susu.

Sementara itu, kendati produksi daging terus meningkat dari tahun 2001 sampai tahun 2005 yaitu sebesar 442,20 ton menjadi 712,28 ton, namun jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan konsumsi daging di Kabupaten Rembang,

dengan demikian terjadi defisit kebutuhan daging. Kondisi defisit pangan adalah suatu kondisi kekurangan, namun di sisi lain juga merupakan peluang dan tantangan yang harus dipecahkan agar mampu menggerakkan ekonomi dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Tuntutan pengembangan pangan pada masa yang akan datang tidak hanya pangan yang memiliki nilai nutrisi dan cita rasa, tetapi juga pangan yang memiliki kemampuan fisiologis aktif atau pangan yang berpengaruh positif terhadap promosi kesehatan seseorang, penampilan jasmani dan rohani. Pengembangan pangan fungsional tersebut telah menjadi tuntutan konsumen pada masa-masa yang akan datang, disamping tuntutan untuk memenuhi ketahanan pangan itu sendiri.

## **D. Kondisi Tata Ruang**

### **1. Penataan Ruang**

Penataan Ruang Kabupaten Rembang masih menitikberatkan pada matra ruang darat dan matra ruang laut dilaksanakan secara bijaksana, berdaya dan berhasil guna secara optimal dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Rembang telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten Rembang. Untuk merinci tata ruang wilayah kabupaten tersebut telah dilaksanakan penyusunan Rencana Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) Perkotaan Rembang maupun RUTRK/RDTRK seluruh Ibu Kota Kecamatan (IKK) se-Kabupaten Rembang.

Luas wilayah Kabupaten Rembang sebesar 101.408 ha. Dari luasan tersebut terbagi dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya sebesar 84,71% dengan peruntukkan untuk hutan produksi, pertanian lahan kering dan lahan basah, pertambangan, permukiman, dan industri. Sementara itu kawasan lindung sebesar 15,29% dari luas keseluruhan Kabupaten Rembang dengan peruntukkan untuk kawasan sekitar waduk/embung, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, kawasan rawan bencana dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi kawasan rawan bencana banjir yang tersebar di wilayah Kecamatan Kragan, Lasem, dan Pamotan, kawasan rawan gerakan tanah/tanah longsor yang tersebar di wilayah Kecamatan Pancur, Pamotan, Kragan, Sarang, Gunem, Sulang dan Sedan, kawasan rawan bencana gelombang pasang dan kawasan rawan bencana abrasi yang meliputi wilayah Kecamatan Sarang, Kragan, Sluke, Lasem, Rembang dan Kaliori, kawasan bencana kekeringan yang meliputi hampir merata di seluruh kecamatan yang terparah terjadi di wilayah Kecamatan Sulang, Sedan, Kragan, Sarang, Sluke, Kaliori dan Sumber.

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Rembang belum optimal sesuai peruntukannya sebagaimana diarahkan dalam RTRW Kabupaten Rembang. Kondisi ini terjadi karena belum terpadunya perencanaan pembangunan perwilayahan dan pembangunan sektor. Selain itu perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan pada kisaran 1%, hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang untuk kegiatan antara lain perumahan, jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Persoalan lainnya adalah masih adanya potensi konflik antar kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Untuk mengantisipasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya

dan konflik kepentingan tersebut maka diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan sanksi yang mengacu perundang-undangan yang berlaku.

Terkait aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang diupayakan secara optimal dalam pengelolaan kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan pelabuhan, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana, kawasan konservasi pesisir dan laut, kawasan karst dan kawasan pariwisata.

## **2. Pertanahan**

Bidang pertanahan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan daerah dan memiliki fungsi ekonomis dan sosial. Karena mengandung fungsi ekonomis dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan melalui sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas. Bukti kepemilikan tanah tersebut antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Pada tahun 2005 jumlah tanah yang bersertifikat di Kabupaten Rembang sebanyak 94.477 tanah, dengan rincian Hak Milik (HM) sebanyak 87.796 sertifikat, Hak Guna Bangunan sebanyak 3.925 sertifikat dan Hak Pakai sebanyak 2.756 sertifikat, sedangkan jumlah tanah yang belum bersertifikat mencapai 343.646 tanah yang meliputi tanah wakaf sebanyak 521 tanah dan tanah girik sebanyak 343.125 tanah. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa dari 438.123 jumlah tanah yang bersertifikat hanya 21,56% sedangkan yang belum bersertifikat sebesar 78,44%, hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat arti pentingnya status hukum tanah melalui kegiatan penyuluhan maupun peningkatan pelayanan administrasi pertanahan di Kabupaten Rembang perlu terus ditingkatkan.

Pemerintah Kabupaten Rembang mempunyai beberapa kewenangan dalam penyelenggaraan bidang pertanahan, hal ini sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan. Dalam pasal 2 ayat (2) kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pertanahan adalah 1) pemberian izin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; d). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 4) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 5) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 6) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 7) pemberian izin membuka tanah dan 8) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

## **E. Kondisi Sarana dan Prasarana**

### **1. Pekerjaan Umum**

#### **a. Sumberdaya Air**

Kondisi sumberdaya air merupakan faktor penting supaya dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat dalam jangka panjang secara berkelanjutan. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sistem prasarana pengairan di Kabupaten

Rembang diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air pertanian, permukiman (air bersih) dan industri.

Kabupaten Rembang memiliki jumlah bulan basah kurang dari tiga bulan dan memiliki bulan kering lebih dari lima bulan per tahun, dengan kata lain musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim penghujan. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab ketersediaan air di Kabupaten Rembang tidak menentu, yaitu pada musim penghujan ketersediaan air sangat melimpah, namun pada musim penghujan ketersediaan air sangat sedikit.

Ketersediaan air di Kabupaten Rembang juga dipengaruhi oleh degradasi Daerah Tangkapan Air (DTA), penggundulan kawasan hutan dan perubahan tata guna lahan. Hal ini menyebabkan kawasan resapan air menjadi berkurang. Apabila dilakukan perhitungan secara kuantitatif, sumberdaya air yang tak termanfaatkan setiap tahunnya mencapai 12.123.497.152,02 M3. Hal ini karena pada saat musim penghujan, air hujan tidak dapat terserap secara sempurna ke dalam tanah dan termanfaatkan untuk berbagai kepentingan.

Di Kabupaten Rembang terdapat dua puluh lima embung, baik besar maupun kecil untuk memenuhi suplai kebutuhan air baku, diantaranya adalah embung Lodan, embung Banyukuwung, embung Jatimudo, embung Panohan, embung Kerep, embung Kemendung, embung Rowosetro, embung Padaran, embung Kasreman, embung Brogo, embung Kasur, embung Precet, embung Suruhan, embung Sumbreng, dan rawa Bolodewo. Pengembangan embung-embung ini perlu terus dilakukan untuk dapat menampung aliran air hujan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai cadangan untuk keperluan air baku maupun pertanian.

Melihat kondisi diatas, pengelolaan prasarana sumber daya air perlu diupayakan guna meningkatkan jumlah pasokan air melalui peningkatan kuantitas embung dan kualitas lingkungan di sekitarnya agar air yang tertampung tidak mudah hilang dan dapat termanfaatkan secara optimal. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air perlu terus diupayakan melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (*demand management*) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan air, dan pendekatan pengelolaan pasokan (*supply management*) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air. Pada masa mendatang memerlukan pengelolaan sungai terpadu guna menampung air sungai agar tidak langsung mengalir ke laut, sehingga bisa dikelola terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **b. Saluran Irigasi**

Sarana dan prasarana pengairan sangat penting peranannya dalam mendukung produktivitas pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan daerah. Prasarana pengairan yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian di Kabupaten Rembang terdiri dari bendungan, chekdam dan saluran irigasi. Aliran air pada bendung bersumber dari beberapa sungai besar yang ada di Kabupaten Rembang, antara lain Sungai Randugunting, Sungai Babagan, Sungai Pamohan Babon, Sungai Waru, Sungai Kalipang dan sungai lainnya.

Saluran irigasi teknis yang terdapat di Kabupaten Rembang terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier. Secara keseluruhan saluran irigasi teknis sepanjang 273.341 m, yang terdiri dari saluran irigasi primer sepanjang 199.267 m, saluran irigasi sekunder sepanjang 119.123 m, dan saluran irigasi tersier sepanjang 34.951 m. Kondisi persawahan dari seluas 29.209 ha, sawah yang teraliri dengan sarana pengairan teknis sebanyak 18%, sedangkan yang menggunakan sarana pengairan setengah teknis sebanyak 11,3%, dan lainnya (60,94%) dengan ketergantngan yang

sangat tinggi terhadap besarnya curah hujan (tadah hujan). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan irigasi masih belum menjangkau seluruh lahan pertanian yang terdapat di Kabupaten Rembang.

### **c. Jalan dan Jembatan**

Secara geografis Kabupaten Rembang merupakan wilayah strategis karena dilalui jalur Pantura (Semarang-Surabaya) yang memudahkan mobilitas barang dan orang. Kondisi koridor jalan pantura juga memiliki beban yang berat dalam menopang kegiatan perekonomian nasional dan menjadi aksesibilitas internal yang berfungsi sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian daerah Kabupaten Rembang.

Pada tahun 2005 di Kabupaten Rembang terdapat jalan negara sepanjang 60,81 km yang terdiri dari kondisi baik sepanjang 15,26 km dan kondisi rusak sepanjang 45,56 km. Jalan provinsi di Kabupaten Rembang sepanjang 57,45 km yang terdiri dari kondisi baik sepanjang 29 km dan kondisi rusak sepanjang 28,45 km. Sementara itu jalan kabupaten sepanjang mencapai 558,09 km dengan kondisi baik sepanjang 329,34 km dan kondisi rusak sepanjang 222,94 Km.

Jumlah jembatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Rembang sampai tahun 2005 relatif tetap, yaitu jembatan negara sebanyak 60 unit dengan panjang 627,60 meter, jembatan provinsi sejumlah 45 unit dengan panjang 398,80 meter, dan jembatan kabupaten sebanyak 126 unit dengan panjang 1.249,90 meter. Jembatan tersebut sebagian besar dalam kondisi baik, namun demikian sebagian jembatan telah berusia tua. Pada masa mendatang perlu meningkatkan jembatan menjadi dua lajur pada semua jembatan seperti jembatan karanggeneng, jembatan babagan, jembatan kalipang dan jembatan yang ada sejalan adanya rencana peningkatan jalan pantura menjadi dua lajur empat jalur untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas sejalan peningkatan ekonomi di koridor jalan pantura Provinsi Jawa Tengah.

### **d. Penyediaan Air Minum**

Pengelolaan prasarana air bersih di Kabupaten Rembang diselenggarakan oleh PDAM Kabupaten Rembang dengan pelayanan perkotaan Rembang dan Lasem. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang yang menangani prasarana air bersih perdesaan dan selebihnya pengelolaan air bersih secara swadaya oleh masyarakat.

Penyediaan air bersih perpipaan yang dilayani oleh PDAM hingga tahun 2005 masih terbatas. Produksi air PDAM pada tahun 2005 sebanyak 3.292.334 m<sup>3</sup>. Dari sebanyak 591.508 orang penduduk Kabupaten Rembang terlayani sebanyak 14.127 rumah tangga pelanggan air PDAM. Produksi air minum oleh PDAM Kabupaten Rembang memanfaatkan beberapa sumber air baku antara lain mata air Mudal Pamotan, mata air Gowak, mata air Kajar, embung banyukuwung, embung jatimudo, dan sungai sumber semen. Sementara itu penyediaan air bersih perdesaan dengan stimulan pembangunan prasarana air bersih oleh DPU untuk melayani desa – desa yang mengalami kekurangan air bersih namun berpotensi memiliki sumber air serta droping air untuk desa rawan kekeringan.

Pada masa mendatang guna peningkatan pelayanan air minum bagi masyarakat memerlukan pembangunan air minum untuk wilayah ibu kota kecamatan maupun penyediaan air minum berbasis masyarakat di kawasan perdesaan.

### **e. Pelayanan Persampahan**



Pelayanan sampah di Kabupaten Rembang masih terbatas untuk wilayah perkotaan Rembang dan Lasem. Sampai dengan tahun 2005 volume sampah yang tidak terangkut masih lebih besar dibandingkan sampah yang terangkut. Volume sampah di Kabupaten Rembang tahun 2005 sebanyak 403.332,33 m<sup>3</sup>. Dari jumlah tersebut, sampah yang dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) sebanyak 132.246,80 m<sup>3</sup> (33%), sedangkan sisanya sebanyak 271.085,85 m<sup>3</sup> (67%) tidak terangkut. Kondisi ini dapat berdampak pada penurunan kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat dan ketidaknyamanan masyarakat.

Pengolahan sampah di Kabupaten Rembang menggunakan dua sistem yaitu sistem pengolahan sampah *on-site* (pengolahan pada lokasi) atau cara tradisional (dibakar atau ditimbun). Pengelolaan sampah tradisional ini sebagian besar terjadi di kawasan perdesaan. Sedangkan sistem pengolahan sampah *off-site* (pengolahan secara terstruktur) lebih difokuskan untuk layanan perkotaan Rembang dan Lasem.

Ketersediaan prasarana sarana persampahan di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2005 masih belum memadai yang meliputi 3 unit truk sampah, 3 unit truk container, 5 unit gerobak sampah, 37 Tempat Pembuangan Sampah (TPS), 1 unit tempat pembuangan akhir (TPA), 2 unit transfer depo.

Pengelolaan sampah ke depan didorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pengolahan sampah *reduce-reuse-recycle* (3R) dan revitalisasi TPA Kerep Sulang menjadi tempat pengelolaan akhir sampah '*sanitary control landfill*' untuk pelayanan sampah perkotaan.

#### **f. Saluran Drainase**

Saluran drainase di Kabupaten Rembang berfungsi sebagai saluran pembuangan limpasan air hujan dari permukiman maupun pembuangan air limbah rumah tangga dan industri pengolahan. Panjang saluran drainase sampai dengan tahun 2005 sepanjang 25,950 km, dengan kondisi baik sepanjang 13,400 km, kondisi rusak ringan sepanjang 4,600 km, dan kondisi rusak berat sepanjang 7,950 km.

Penataan jaringan drainase yang baik di seluruh wilayah Kabupaten, terutama kawasan pemukiman perlu terus dikembangkan di Kabupaten Rembang. Pengembangan jaringan drainase tersebut dilakukan dengan mengikuti kontur tanah, dan sungai sebagai muara akhir. Pada sisi sebelah kanan dan kiri jalan dibangun jaringan drainase agar air hujan langsung dapat disalurkan ke sungai terdekat. Dengan demikian, jaringan drainase dapat berfungsi secara sempurna dalam pencegahan terjadinya banjir.

Pengelolaan drainase perkotaan difokuskan pada perkotaan Rembang dan Lasem. Kondisi sampai dengan tahun 2005 prasarana sarana drainase di kota Rembang dan Kota Lasem masih belum memadai sehingga pada waktu hujan masih sering terjadi banjir. Ke depan pengelolaan drainase perkotaan dibangun dalam satu sistem jaringan yang terkoneksi mulai dari saluran tersier, saluran sekunder dan saluran primer.

#### **g. Perkotaan dan Perdesaan**

## 1) Perkotaan

Sistem perkotaan selanjutnya digunakan untuk mengarahkan pengembangan wilayah di Kabupaten Rembang melalui pembagian wilayah pembangunan (WP) dan sub wilayah pembangunan (SWP). Penentuan WP dan SWP dilakukan dengan mempertimbangkan pola keterkaitan (linkage) dan kemiripan karakteristik (homogenitas) setiap kawasan. Berdasarkan hirarki kota-kota yang ada serta potensi dan permasalahan masing-masing wilayah, maka pembagian SWP dalam rangka pengembangan wilayah ini adalah sebagai berikut:

1. SWP I, dengan pusatnya di Kota Rembang, meliputi Kecamatan Rembang dan Kaliori dengan sektor yang dikembangkan meliputi perdagangan, jasa, industri, perikanan dan pariwisata.
2. SWP II, dengan pusatnya di Kota Lasem, meliputi Kecamatan Lasem, Sluke dan Pancur dengan sektor yang dikembangkan meliputi perdagangan, jasa, angkutan, perikanan, pertanian dan industri.
3. SWP III, dengan pusatnya di Kota Sulong, meliputi Kecamatan Sulong, Sumber dan Bulu dengan sektor yang dikembangkan meliputi pertanian dan kehutanan serta industri berbasis pertanian.
4. SWP IV, dengan pusatnya di Kota Pamotan, meliputi Kecamatan Pamotan, Gunem, Sedan dan Sale dengan sektor yang dikembangkan meliputi pertanian, kehutanan, pertambangan serta industri kecil dan industri berbasis pertanian dan pertambangan.
5. SWP V, dengan pusatnya di Kota Kragan, meliputi Kecamatan Kragan, dan Sarang dengan sektor yang dikembangkan meliputi perikanan, industri, perdagangan, dan angkutan.

Skala aksesibilitas antara kota-kota tersebut diharapkan memiliki pola pelayanan yang berimbang sesuai dengan fungsi dan peran kota, memiliki jaringan yang menjadi penghubung dan juga memiliki alur pengembangan yang terintegrasi. Untuk membentuk profil permukiman yang mendukung aktivitas perkotaan tersebut dibutuhkan kriteria-kriteria khusus di luar kriteria fisik yaitu kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan dan aksesibilitas yang baik, khususnya pada kawasan pusat pertumbuhan.

## 2). Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah kawasan dengan fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental bercirikan perdesaan. Kawasan perdesaan memiliki kegiatan utama pertanian termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pengembangan kawasan perdesaan dilakukan dengan pertimbangan ekonomi keruangan dan lingkungan. Pertimbangan ekonomi keruangan adalah untuk menciptakan keseimbangan perkembangan kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan dalam struktur perekonomian. Kawasan perdesaan akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi berbasis kepada kegiatan pertanian

Untuk mendukung perkembangan wilayah perdesaan, diperlukan upaya mendorong pertumbuhan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga

keberadaan fungsi permukiman perdesaan dapat tumbuh sebagai pusat kegiatan di wilayah sekitarnya. Pengaturan permukiman perdesaan yang kondusif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar terutama pada simpul-simpul kegiatan (*nodes*).
- b) Membuka hubungan pusat-pusat kegiatan dengan kantong-kantong permukiman perdesaan, termasuk penyediaan infrastruktur secara memadai untuk mendukung interaksi desa terhadap wilayah luar.
- c) Menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan pengolahan pertanian baik berupa kerajinan, industri kecil, maupun pariwisata.
- d) Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan pusat dan wilayah belakang sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan.
- e) Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan. Kawasan perdesaan, akan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumberdaya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan.

Dalam pengembangan perdesaan perlu adanya analisis yang diidentifikasi desa dengan mencakup beberapa variabel yaitu variabel prasarana, sarana dan lokasi, variabel potensi desa, mobilitas, kelembagaan maupun geografis. Desa *hinterland* atau desa pendukung ditentukan berdasarkan kedekatan wilayah dengan desa yang menjadi pusat pengembangan.

## **2. Perhubungan**

### **a. Terminal dan angkutan**

Kabupaten Rembang merupakan penghubung antara Provinsi Jawa Tengah dengan Propinsi Jawa Timur. Prasarana perhubungan untuk memudahkan mobilitas penduduknya antar daerah telah tersedia dua terminal kelas B (Terminal Lasem dan Terminal Rembang), dan tujuh terminal kelas C yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di Kabupaten Rembang. Terminal tipe C terletak di Kecamatan Rembang, Lasem, Sulang, Gunem, Sarang, Pamotan, dan Sumber.

Pelayanan pergerakan antar daerah di Kabupaten Rembang dilayani beberapa armada Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan kendaraan umum berupa angkutan kota dan angkutan perdesaan. Pada tahun 2005 jumlah armada otobus AKDP sebanyak 36 armada, AKAP sebanyak 38 armada, sedangkan angkudes sejumlah 358 armada, dan minibus sebanyak 59 armada. Di Terminal Rembang jumlah pergerakan arus lalu lintas bus AKDP sebanyak 1.024 trip, bus AKAP sebanyak 1.628 trip. Sementara itu, di Lasem banyaknya perjalanan (trip) bus AKDP sebanyak 4.683 trip, AKAP sebanyak 35.217 trip dan Angkudes sebanyak 41.219 trip.

Meningkatnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Rembang perlu didukung dengan peningkatan pelayanan di terminal baik dari aksesibilitas naik turunnya penumpang maupun ruang tunggu, integrasi antar terminal dan angkutan penghubung lainnya serta peningkatan pelayanan angkutan umum guna meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan masyarakat sehingga lebih memilih menggunakan angkutan umum dari pada menggunakan

angkutan pribadi. Apabila hal ini dapat dioptimalkan, maka polusi udara akibat kendaraan bermotor dapat ditekan seminimal mungkin.

Selain angkutan umum dan kendaraan pribadi, di Kabupaten Rembang juga banyak dilintasi kendaraan angkutan barang. Angkutan barang ini sangat berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan jembatan, serta kemacetan lalu lintas. Selama ini kontrol terhadap angkutan barang masih kurang, masih banyak angkutan barang yang membawa muatan melebihi daya angkut yang ditetapkan. Banyak pula angkutan barang yang berhenti di pangkalan truk ilegal di Desa Manggar, Sumpersari Kragan, Cikalan Lasem, Pancur, dan Wuwur. Selain itu banyak pula yang berhenti di sembarang tempat, sehingga menghambat arus lalu lintas jalan raya. Dengan melihat kondisi tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan terhadap angkutan barang dengan melakukan pengontrolan beban muatan angkutan barang, khususnya angkutan barang yang melalui jaringan jalan Kabupaten Rembang kelas II dan kelas III. Selain itu, diperlukan pula pengembangan *rest area* atau *pool truck* yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat pengemudi angkutan barang.

## **b. Pelabuhan dan Perhubungan Laut**

Pelabuhan Tasik Agung berada pada posisi strategis terletak di antara dua pelabuhan besar yaitu Tanjung Mas (Semarang) dan Tanjung Perak (Jawa Timur). Pelabuhan tersebut terletak di Kecamatan Rembang dengan lahan pelabuhan seluas ± 14.000 m<sup>2</sup>. Pelabuhan Tasik Agung merupakan pelabuhan dengan aktivitas utama berupa pendaratan perikanan tangkap dari perairan laut. Namun demikian, dalam perkembangannya selama ini Pelabuhan Tasik Agung juga digunakan untuk mengangkut berbagai hasil tambang, bahan bangunan dan berbagai hasil bumi. Dan juga pengangkutan bahan galian C (pasir, kerikil dan batu) ke Kalimantan. Disamping itu di pelabuhan ini juga dilakukan pendaratan kayu keperluan konstruksi dari Pulau Kalimantan.

Kondisi eksisting pelabuhan regional pengumpan sekunder yang berada di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang saat ini secara teknis, lingkungan, sosial budaya dan keruangan tidak layak lagi sebagai pelabuhan pengumpan atau pelabuhan pengumpul. Selanjutnya pengembangan pelabuhan umum Rembang diarahkan di wilayah pantai Kecamatan Sluke. Secara eksisting Pelabuhan Tasikagung ke depan akan dioptimalkan untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara. Pengembangan pelabuhan umum Rembang tersebut berorientasi jangka panjang akan menjadi pelabuhan pengumpul dan atau pelabuhan utama, dimana dengan pengembangan pelabuhan diharapkan sebagai infrastruktur pemicu pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pintu gerbang akses transportasi laut guna mengangkut arus barang komoditas hinterland Kabupaten Rembang.

Keunggulan komparatif lokasi pelabuhan di wilayah pantai kecamatan Sluke adalah alternative yang paling memungkinkan untuk lokasi pelabuhan umum untuk lalu lintas perdagangan antar pulau maupun ekspor impor antar negara. Peluang ke depan pengembangan potensi pembangunan Pelabuhan Umum Rembang adalah:

1. Mendorong pengembangan industri berbasis sumber daya alam (galian golongan C) dan pertanian perkebunan.
2. Peluang penyediaan fasilitas pendukung dalam rangka pengembangan industri minyak 'Exxon Mobil' Blok Cepu dan Blok Rembang.
3. Pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan rencana pembangunan kawasan industri Kabupaten Rembang.

### c. Transportasi kereta api

Berdasarkan sejarah perkeretaapian, Kabupaten Rembang pernah memiliki jaringan transportasi jalan rel yang menghubungkan Kabupaten Rembang dengan wilayah kabupaten lain di Jawa Tengah dan wilayah lain di Pulau Jawa. Jaringan rel yang ada berhubungan langsung dengan wilayah Juana (Pati) untuk wilayah barat, jalur selatan terhubung dengan wilayah Blora, dan diteruskan ke wilayah Cepu sampai wilayah Bojonegoro (Jawa Timur), serta melalui Lasem dan Jatirogo untuk jalur ke arah tenggara. Jaringan rel yang ada di Kabupaten Rembang merupakan terusan dari *Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij* (SJS) yang mendapatkan konsensi tahun 1881. *Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij* (SJS) membangun jalan rel lintas Semarang-Lasem pada tahun 1883-1900 dan kemudian diteruskan Rembang-Cepu tahun 1901-1903 dan terakhir Lasem-Jatirogo tahun 1914-1919. Namun, tahun 1988 jaringan jalan rel Rembang itu mulai tidak dipergunakan atau dinonaktifkan, kemudian disusul dengan Stasiun Lasem tahun 1990.

Memprediksikan perkembangan yang akan datang dengan dibukanya pelabuhan di Sluke, pengeboran minyak di Cepu dan arah kedepan Kabupaten Rembang, maka jalur transportasi kereta api tersebut memiliki potensial untuk dikembangkan. Jalur yang mungkin dikembangkan adalah Semarang-Rembang-Lasem-Sluka dan Sluka-Lasem-Sale-Bojonegoro-Surbaya.

### 3. Perumahan

Di Kabupaten Rembang, perumahan sebagian besar merupakan perumahan informal yaitu perumahan yang dibangun secara sendiri-sendiri oleh pemilik rumah tanpa melalui developer/pengembang perumahan, dan berkembang secara linier mengikuti alur pertumbuhan ekonomi. Perumahan yang dikembangkan oleh Pengembang Perumahan Baru terealisasi mulai tahun 90-an, yaitu Perumahan permata Hijau Ngotet dan RSS Mondoteko. Pada tahun berikutnya mulailah tumbuh perumahan yang dikembangkan oleh Pengembang Perumahan yang mencapai 7 kompleks perumahan di Rembang, yaitu meliputi perumahan Permata Hijau, RSS. Mondoteko, RS. Puri Mondoteko, RSS. Sumber Mukti Indah, Perumnas ABRI (Desa Sumberejo), Madina Asri, Perumnas ABRI (Desa Turusgede). Jumlah total unit rumah yang disetiakan sebanyak 1.498 unit. Sedangkan perumahan dan permukiman di Kabupaten Rembang dilihat dari status kepemilikan rumah yaitu rumah milik sendiri sebesar 188,970 unit rumah pada tahun 2005. Untuk rumah sewa sebanyak 1.520 unit rumah. Sementara untuk penyediaan rumah oleh Perumnas tahun 2005 sebanyak 646 unit, dan penyediaan rumah oleh KPR/BTN sebanyak 941 unit.

Sebagian besar masyarakat perdesaan, dalam memenuhi kebutuhan akan rumah dipenuhi secara swadaya, yang dilaksanakan secara gotong royong. Pada kondisi sampai dengan tahun 2005 diketahui sekitar 81,44% (115.865 unit) rumah diperoleh dengan cara membangun sendiri, 0,35% (401 unit) membeli dari pengembang, dan 3,32% membeli bukan baru (4.718 unit), sisanya menyewa dengan atau tanpa membayar. Dari data ini terlihat bahwa sebagian besar pengadaan rumah dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan sebagian kecil selebihnya disediakan oleh pengembang perumahan.

Perkembangan jumlah penduduk kabupaten Rembang yang terus naik secara signifikan, maka perlu adanya peran pemerintah yang dapat membantu menyediakan lahan dan pembangunan rumah, dengan demikian harga rumah akan menjadi relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan perumahan tersebut tentunya diharapkan dapat merata disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Rembang guna terjaganya integrasi pembangunan yang berkelanjutan.

#### **4. Komunikasi dan Informatika**

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbagi atas pos dan telekomunikasi serta sarana komunikasi dan desiminasi informasi.

Fasilitas pelayanan pos Kabupaten Rembang memiliki 1 kantor pos induk di ibukota kabupaten, dan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang baru terdapat 10 kecamatan yang memiliki kantor pos pembantu. Jumlah satuan sambungan telepon yang terpasang tidak ada peningkatan tahun 2003-2005 yaitu 4823 unit. Keberadaan media massa cukup untuk memberikan sarana informasi dan edukasi, baik media cetak maupun elektronik, terdapat 25 jenis surat kabar/majalah, 3 stasiun radio FM dan 2 stasiun radio AM, dan mampu menangkap 7 siaran stasiun televisi baik regional maupun nasional.

Pengelolaan komunikasi dan informatika pada masa datang memerlukan pengaturan dan pengawasan yang optimal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan pembangunan perwilayahan yang didukung keterbukaan informasi publik.

#### **F. Kondisi Politik dan Tata Pemerintahan**

##### **1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian**

###### **a. Otonomi Daerah**

Dalam rangka implementasi otonomi daerah pemerintah kabupaten Rembang melaksanakan berbagai kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya. Penyelenggaraan kewenangan tersebut setiap tahunnya dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD).

Penyelenggaraan kewenangan tersebut tidak terlepas dari kapasitas daerah, kemampuan pembiayaan, sumberdaya manusia, kelembagaan daerah dan potensi lain yang dimiliki. Seiring dengan semakin luasnya kewenangan daerah dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik telah disusun berbagai peraturan daerah sebagai bagian dari kelengkapan yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kerjasama antar daerah, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sejak tahun 1999 – 2005 di Kabupaten Rembang telah tersusun Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 64 buah, Peraturan Bupati (Perbub) sebanyak 97 buah dan Keputusan Bupati sebanyak 64 buah.

###### **b. Pemerintahan Umum**

Penyelenggaraan pemerintahan umum mengacu pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang bertumpu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik antara lain dengan meningkatkan kerjasama antar daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat. Peningkatan kerjasama baik dengan pemerintah daerah maupun kalangan dunia usaha semakin penting di masa mendatang. Sampai dengan tahun

2005 Pemerintah Kabupaten telah banyak tercapai kesepakatan kerjasama (*memorandum of understanding*) seperti kontrak karya, kerjasama operasi (KSO), *build own and transfer (BOT)* dan kerjasama pengelolaan lainnya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan.

Di Kabupaten Rembang kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan pelayanan publik adalah terbatasnya prasarana dan sarana, kesiapan dalam pelayanan publik secara digital (*e-government*), belum optimalnya sistem pelayanan terpadu. Keterbatasan ini menyebabkan pelayanan publik memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga pelayanan yang cepat dan tepat belum dapat dilaksanakan secara optimal.

### **c. Keuangan Daerah**

Kondisi keuangan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pendapatan daerah Kabupaten Rembang yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah pada tahun 2003 sebesar Rp.249,8 milyar, tahun 2004 meningkat menjadi sebesar Rp.266,59 milyar dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi sebesar Rp.295,6 milyar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2002 pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.13.818,24 juta meningkat menjadi sebesar Rp. 21.092,33 juta pada tahun 2005. Pertumbuhan PAD yang relatif besar belum cukup berarti apabila dibandingkan dengan besarnya APBD Kabupaten Rembang. Kemampuan PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berkisar antara 5,01 – 8,58% dari APBD pada tahun 2002-2005. Sumber PAD terbesar adalah Retribusi daerah yang menyumbang sebesar 59,11% pada tahun 2005. Persentase kontribusi tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2004 yaitu sebesar 66,21% dan meningkat dibandingkan tahun 2003 yaitu sebesar 58,45%. Sumber PAD terbesar kedua adalah pajak daerah, yang menyumbang rata-rata 22,78% per tahun sejak tahun 2003 – 2005. Belanja daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2004 sebesar Rp.287,7 milyar. Tahun 2005 meningkat menjadi Rp.293,6 milyar. Belanja daerah apabila dibandingkan dengan Pendapatan daerah maka pada tahun 2004 terjadi deficit sebesar kurang lebih Rp 21 milyar, dan pada tahun 2005 terjadi surplus kurang lebih Rp 2 milyar.

### **d. Perangkat Daerah**

Sehubungan dengan tuntutan perubahan, dari sisi regulasi dan perkembangan pemerintah dan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan terhadap urusan dan fungsi yang menjadi kewenangannya, melalui penataan terhadap organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan urusan dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Rembang telah berusaha menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien antara lain melalui peningkatan kapasitas kelembagaan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 26 unit, 14 unit kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur daerah dan keadilan dalam masyarakat perlu disusun standar pelayanan minimal (SPM), namun sampai saat ini belum semua SKPD di Kabupaten Rembang memiliki atau menetapkan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

## **e. Kepegawaian**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Tahun 2005 aparatur PNS sejumlah 7.548 orang. Perbandingan aparatur dengan penduduk diketahui 1 : 78, menunjukkan tingkat perbandingan yang cukup baik. Berdasarkan kepangkatan dan golongan kepegawaian maka sumber daya aparatur pemerintah daerah termasuk baik. Struktur PNS menurut golongan, untuk Golongan I sebanyak 1.44%, Golongan II sebanyak 23.60%, Golongan III sebanyak 53.79% dan Golongan IV sebanyak 21.17%. Berdasarkan kualifikasi menurut pendidikan, lulusan SD sebanyak 7.67%, SLTP sebanyak 7.54%, SLTA sebanyak 54,58%, Diploma sebesar 13.35%, S1 sebanyak 16.18% dan S2 sebanyak 0.68%. Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur telah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional.

## **2. Perencanaan Pembangunan**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Rembang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Terkait dengan perencanaan jangka menengah telah disusun RPJMD Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Rembang No. 1 tahun 2006. Perencanaan jangka pendek telah disusun RKPD, dan pada setiap SKPD telah disusun Renstra SKPD untuk jangka menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu satu tahun.

Namun demikian produk-produk dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang belum sepenuhnya berbasis data dan informasi kuantitatif secara lengkap dan valid. Oleh sebab itu hal ini menjadi tantangan pemenuhan kebutuhan data untuk masa-masa yang akan datang. Perencanaan pembangunan yang baik perlu di dukung oleh data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, hasil validasi maupun hasil studi/penelitian. Data dan informasi yang akurat sangat membantu dalam mempertajam permasalahan pembangunan, prediksi atau perkiraan keadaan di masa mendatang yang semakin dinamis.

## **3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Perkembangan demokrasi dan dinamika politik di daerah menunjukkan perkembangan yang semakin baik, ditandai dengan meningkatnya jumlah partai politik dan lembaga swadaya masyarakat yang mendorong perkembangan partisipasi politik masyarakat. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 dan 2004, tingkat partisipasi politik masyarakat rata-rata lebih dari 78% dan penyelenggaraannya tidak menimbulkan konflik horisontal dalam masyarakat. Hal ini merupakan modal awal yang penting bagi berkembangnya kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Rembang.

Hal yang perlu ditingkatkan dimasa mendatang adalah peningkatan peran partai politik, kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan kewargaan/*civic education* terutama kesadaran hidup bernegara, pemahaman hak dan kewajiban warga negara sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan masyarakat demokratis. Pendidikan kewargaan (*civic education*) terutama peningkatan hak dan kewajiban



warga negara, pemahaman hukum dan hak asasi manusia (HAM), etika politik dan pendidikan politik pemilih pemula, perempuan di wilayah perdesaan menjadi salah satu permasalahan krusial dalam pembangunan politik di Kabupaten Rembang.

Pengembangan kelembagaan politik menunjukkan perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2005 banyaknya organisasi kemasyarakatan (ormas) berdasarkan profesi sebanyak 36 unit, terdiri dari ormas berdasarkan dasar kegiatan sebanyak 13 unit, ormas berdasarkan fungsi sebanyak 23 unit. Di Kabupaten Rembang terdapat organisasi sosial yang berbasis keagamaan sebanyak 88 unit, terdiri dari organisasi berbasis Agama Islam sebanyak 13 unit; Agama Kristen sebanyak 16 unit; Agama Budha sebanyak 5 unit dan Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 6 unit.

Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Rembang yang memiliki kegiatan dalam pendampingan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebanyak 33 unit dan lebih banyak pengembangan kelompok-kelompok swadaya dalam masyarakat (PKSM) baik secara mandiri maupun dibentuk melalui program-program pembangunan.

Upaya peningkatan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat ditunjang oleh meningkatnya pelayanan dan jumlah polisi yang bertugas. Selain itu, peningkatan ketenteraman dalam masyarakat di masing-masing desa dilakukan dengan cara penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan program kemitraan polisi dengan masyarakat.

#### **4. Statistik**

Penyediaan statistik di Kabupaten Rembang berdasarkan kegunaannya terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyediaan statistik dasar dilakukan melalui metode sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan statistik sektoral diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya. Sementara itu, statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat, baik lembaga penelitian, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya. Penyediaan statistik dilakukan oleh BPS dan Bappeda kerjasama dengan SKPD dan masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2000-2005 telah tersedia data statistik, antara lain Kabupaten Rembang Dalam Angka, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indikator Sosial Ekonomi, Sakerda, Statistik Gender dan Indeks Harga Konsumen serta Inflasi. Proses penyusunan tersebut melibatkan dinas atau instansi terkait, yang dilakukan melalui rapat koordinasi secara terpadu dan terprogram, sehingga diharapkan penyusunan buku-buku statistik tersebut dapat memberikan data yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelengkapan dan ketersediaan data statistik daerah Kabupaten Rembang diprediksikan akan meningkat ragam dan jenisnya sesuai dengan perkembangan pembangunan. Untuk menunjang hal tersebut perlu dikembangkan berbagai produk-produk statistik lain untuk melengkapi dokumen statistik yang telah ada. Data-data statistik yang lebih banyak masih sebatas informasi perlu dikembangkan agar dapat menyajikan indikator-indikator kunci keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, seluruh stakeholder terkait lebih mudah melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk keperluan pengambilan kebijakan di masa mendatang.

## **5. Keperpustakaan**

Pembangunan Perpustakaan di Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca secara luas. Pertumbuhan perpustakaan masyarakat (tingkat desa atau kelurahan) meningkat tiap tahun dengan jumlah saat ini 42 unit, sedangkan perpustakaan kecamatan tidak ada penambahan sejak tahun 1999, yaitu tetap 14 perpustakaan (tiap kecamatan satu perpustakaan). Perpustakaan SD mengalami pertumbuhan 15,23%, perpustakaan SMP 3,13%, perpustakaan SLTA 11,83%, perpustakaan SMK 11,90%. Perpustakaan masjid tidak ada peningkatan, yaitu hanya 1 perpustakaan, dan perpustakaan pesantren berjumlah 5 unit.

Jumlah pengunjung perpustakaan umum daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2005 sebanyak 22.562, mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah judul koleksi buku fiksi tahun 2005 sebanyak 340 dan buku nonfiksi 390, fluktuatif dan cenderung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah buku yang dibaca pada mengalami peningkatan tahun 2004 jumlah buku yang dibaca sebanyak 36.142 eksemplar meningkat tahun 2005 sebanyak 45.124 eksemplar.

## **6. Kearsipan**

Penyelenggaraan kearsipan di daerah dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis pada *e-government*, penyimpanan dokumen-dokumen penting milik pemerintah daerah akan mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahapan selanjutnya, oleh karena itu penyelenggaraan kearsipan diharapkan memberikan jaminan terhadap keamanan, kerahasiaan dan keaslian dari dokumen/arsip daerah. Jenis dokumen yang tersimpan dalam 1 tahun dan arsip dinamis inaktif, dan arsip dalam bentuk tekstual tahun 2005 sebanyak 3550 dokumen, sementara untuk Peraturan Daerah tahun 2000-2005 rata-rata 2 buah setiap tahun.

Untuk meningkatkan kualitas arsip daerah, selama 5 tahun terakhir telah dilaksanakan pembinaan tentang kearsipan selama 2 kali dalam setiap tahun. Untuk mengetahui jumlah arsip yang aktif tertata di unit satuan kerja juga telah dilaksanakan kegiatan akuisisi arsip satuan kerja setiap tahun ada 2 SKPD sejak tahun 2000-2005. Dokumen atau arsip yang disimpan dalam satu tahun atau arsip dinamis inaktif rata-rata pertumbuhannya adalah 8,96 %.

Ada beberapa jenis arsip daerah yang dikelola oleh Kabupaten Rembang, Pada tahun 2005 arsip daerah yang ada di Depo Arsip Kabupaten Rembang terdiri dari 74.000 berkas arsip tekstual hasil akuisisi, 75 buah Arsip Kaset Tape dari tahun 2001-2005, 34 buah arsip Kaset Video dan 45 meter Arsip yang belum selesai diakuisisi.

## **G. Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**

### **1. Energi dan Sumberdaya Mineral**

Kondisi rasio elektrifikasi Kabupaten Rembang dengan satuan desa sudah mencapai 100%, sedangkan elektrifikasi dengan satuan rumah tangga terus mengalami peningkatan dari tahun 2001 sebesar 60% menjadi sebesar 79% pada tahun 2005, sehingga masih ada 21% rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN, terutama di kawasan perdesaan yang terpencil.

Sistem kelistrikan Kabupaten Rembang termasuk dalam interkoneksi Jawa–Bali. Kabupaten Rembang telah mengembangkan pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi sumber energi listrik setempat (alternatif) terutama untuk daerah terpencil, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS, *Solar Home System*).

Potensi pertambangan di Kabupaten Rembang cukup besar dikarenakan memiliki wilayah pegunungan kapur yang mengandung berbagai bahan galian tambang. Bahan galian golongan C meliputi : *andesit* (Kecamatan Sedan, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem) seluas 4.056 ha, pasir *kuarsa* (Kecamatan Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, dan Sluke) seluas 3.526, *kapur* (Kecamatan Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sarang, dan Sedan) seluas 10.735 ha, *trass* (Kecamatan Pancur, Kragan, dan Sluke) 260 ha, *phospat* (Kecamatan Gunem, Sale, dan Pamotan) 14 ha, *ball clay* (Kecamatan Bulu, Gunem, Sarang, dan Sedan) seluas 765 ha, batu *bard* (Kecamatan Gunem dan Sale) seluas 35 ha, serta *gypsum* (Kecamatan Gunem, Sarang, Sedan, dan Lasem) seluas 0.5 ha. Potensi Batubara Kabupaten Rembang diperkirakan sebesar 135 ha dengan cadangan tereka mencapai 1.125.000 m<sup>3</sup>.

Potensi bahan tambang Trass, sebagai bahan baku semen, memiliki kandungan oksida silika (SiO<sub>2</sub>), dengan kadar yang terdeteksi sebesar 51,93% - 57,35%; dan kandungan Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sebesar 18,04% - 20,57%. Total cadangan trass yang tereka di Kabupaten Rembang diperkirakan mencapai 28.125.000 m<sup>3</sup>.

Melihat data potensi pertambangan di Kabupaten Rembang yang cukup besar tersebut, maka sektor pertambangan menjadi sektor yang dapat menyumbang pendapatan cukup tinggi dalam struktur ekonomi kabupaten Rembang. Pengembangan potensi pertambangan diarahkan pada pengembangan eksploitasi *raw material* oleh industri pertambangan baik industri kecil maupun industri besar.

## 2. Kehutanan

Luas lahan hutan di Kabupaten Rembang dari tahun 2001 hingga 2005 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 23.818,24 ha. Produksi kayu jati di Kabupaten Rembang pada tahun 2005 hanya sebesar 3.276 m<sup>3</sup> dengan nilai produksi 43,30 Milyar Rupiah. Jumlah produksi tersebut jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya (2004) yang mencapai 27.268 m<sup>3</sup> senilai 53,55 Milyar Rupiah. Seperti halnya dengan produksi kayu jati, produksi Kayu rimba di Kabupaten Rembang pada tahun 2005 juga mengalami penurunan sebanyak 32,85% dari 3.516 m<sup>3</sup> (senilai 1,31 Milyar Rupiah) pada tahun 2004 menjadi 2.361 m<sup>3</sup> (senilai 1,98 Milyar Rupiah) pada tahun 2005. Produksi kayu bakar berupa kayu jati dan kayu rimba mengalami peningkatan lebih dari 100% pada tahun 2004, yaitu sebesar 156 m<sup>3</sup> dari tahun sebelumnya sebesar 78 m<sup>3</sup>.

Lahan kritis di Kabupaten Rembang di tahun 2005 seluas 21.537 ha, mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, luas lahan reboisasi dalam kurun waktu 3 tahun (2003-2005), terbesar di tahun 2005 yaitu 945 ha, sedangkan luas lahan penghijauan paling besar terjadi pada tahun 2005, yaitu seluas 1.380 ha. Kebakaran hutan di Kabupaten Rembang paling parah terjadi di tahun 2003 yang merusak hutan hingga 932 ha. Adapun banyaknya industri pengolahan hasil hutan yang ada di Kabupaten Rembang pada tahun 2005 tercatat sebanyak 296 unit.

Produksi hasil hutan Non KPH di Kabupaten Rembang tahun 2005 terdiri dari kayu bulat, kayu gergajian, kayu olahan dan kayu bakar. Produksi Kayu bulat pada tahun 2005 mencapai 28.303 m<sup>3</sup>, lebih rendah dari tahun 2004 sebanyak 37.375 m<sup>3</sup>

dan tahun 2003 sebanyak 32.595 m<sup>3</sup>. Sementara itu, jumlah produksi kayu olahan mengalami penurunan dari 860 m<sup>3</sup> pada tahun 2004 menjadi 51 m<sup>3</sup> di tahun 2005. Adapun produksi kayu bakar hasil hutan Non KPH terus mengalami penurunan dari 391 m<sup>3</sup> (2003), 167 m<sup>3</sup> (2004) dan 80 m<sup>3</sup> (2005).

Penurunan produksi dan produktifitas hasil hutan KPH diatas menunjukkan bahwa pengelolaan kehutanan belum berjalan secara optimal. Di lain sisi, animo masyarakat yang tinggi terhadap pembangunan hutan rakyat merupakan modal yang potensial bagi pembangunan kehutanan kedepan. Sudah saatnya pengelolaan kehutanan dilaksanakan secara professional, dengan manajemen yang baik, ramah lingkungan dan melibatkan peran aktif masyarakat. Pembangunan kehutanan tidak lagi berorientasi ekonomi tetapi lebih mengarah kepada perbaikan ekosistem dan konservasi lingkungan dengan tetap memperhatikan permasalahan-permasalahan sosial yang melekat di dalamnya.

## **1. Energi dan Sumberdaya Mineral**

Sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga sumber daya alam senantiasa memiliki peran ganda, yang acapkali dilematik, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Namun di lain pihak, kebijakan investasi ke arah penyerapan tenaga kerja telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup.

Pemanfaatan potensi sumberdaya alam harus memperhatikan konsep keberlanjutan (sustainable) dan keterpaduan (integrated), untuk mencegah kerusakan (degradasi) lingkungan, agar dapat terjaga potensi ekologis lingkungan sebagai: 1) penyedia sumberdaya (resources supplier), 2) penyedia kebutuhan pendukung kehidupan (life support), 3) penyedia jasa-jasa kenyamanan (amenities) dan 4) penampung limbah

Kondisi hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang menggambarkan tingkat pencemaran udara oleh kendaraan bermotor menunjukkan peningkatan sebesar 5,00%. Nilai ketidaklulusan uji emisi gas buang kendaraan bermotor didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Nomor 050/1717 tanggal 23 Desember 2004, ambang batas kendaraan bensin yaitu CO 4,2% dan HC 815 Ppm dan kendaraan mesin solar batas Opositas/Bosch 20/47%. Jumlah kendaraan yang tidak lulus uji dari tahun 2001-2005 terus berkurang, yaitu sebanyak 372 buah (7,86%) pada tahun 2001 menurun menjadi 313 buah (5,00%) pada tahun 2005.

Kondisi produksi sampah Kabupaten Rembang mengalami kecenderungan meningkat rata-rata sebesar 0,44 m<sup>3</sup>/hari. Sampah terolah sebesar 169,75 m<sup>3</sup>/hari, dari total produksinya mencapai 287,12 m<sup>3</sup>/hari. Dengan demikian masih terdapat sekitar 117,37 m<sup>3</sup>/hari sampah setiap hari yang harus dikelola dengan baik.

## **BAB III**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Berdasarkan kondisi umum yang ada di Kabupaten Rembang, terdapat beberapa permasalahan penting atau isu strategis pembangunan yang perlu menjadi perhatian dalam periode tahun 2005-2025 sebagai berikut:

#### **1. Kemiskinan, pengangguran dan rendahnya kualitas SDM**

Sejalan dengan trend pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dalam lima tahun terakhir, maka pembangunan yang akan datang masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kualitas SDM masyarakat yang kurang siap bersaing di era global yang makin kompetitif mengingat secara umum kondisi masyarakat Kabupaten Rembang berada di bawah garis kemiskinan. Dari pemetaan wilayah kemiskinan di Kabupaten Rembang, sebaran kemiskinan cenderung lebih banyak muncul pada daerah-daerah yang mengandalkan potensi agraris seperti Kecamatan Gunem, Sumber, Bulu, Sulang, Pamotan dan Sedan dengan indikator persentase keluarga pra sejahtera di atas 60 persen pada tahun 2005.

Kemiskinan masih merupakan persoalan mendasar yang perlu ditangani. Persoalan kemiskinan yang terus berlangsung berimplikasi pada munculnya persoalan lain berupa peningkatan jumlah pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor riil, terpuruknya kualitas sumber daya manusia yang ada, rendahnya akses masyarakat ke berbagai layanan publik, dan bahkan hilangnya kesempatan kelompok masyarakat miskin untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Penanganan persoalan kemiskinan seolah tak kunjung tuntas disebabkan akar kemiskinan bukan hanya sekedar bersumber pada kelemahan dari kelompok masyarakat miskin itu sendiri, tetapi juga karena faktor-faktor struktural yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya. Struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya kreasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan serta terpinggirkannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis bukan saja menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja serta ambruknya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM yang masih rendah, dengan rata-rata lama sekolah di bawah 10 tahun pada jenjang pendidikan dasar dan belum ditunjang dengan ketrampilan dan kecakapan serta keahlian yang profesional, seringkali menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Namun dengan melihat berbagai parameter kependudukan yang mengalami perbaikan diharapkan mampu menjadi modal dasar yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Pada bidang kesehatan terjadi kecenderungan meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi, menurunnya penderita balita gizi buruk, meningkatnya kesadaran dan peranserta masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada bidang pendidikan terjadi

kecenderungan peningkatan akses pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan serta peningkatan tata kelola dan pencitraan publik. Di bidang keagamaan, sejalan dengan derasnya arus globalisasi yang didorong dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, masyarakat kabupaten Rembang sebagai masyarakat yang religius dan memiliki toleransi yang cukup tinggi antar umat beragama, diharapkan menjadi modal sosial yang sangat penting dan potensial dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk itu dalam menangani kemiskinan dan meningkatkan posisi tawar masyarakat miskin terhadap semua bentuk eksploitasi dan superordinasi, yang dibutuhkan adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan dan peluang-peluang sosial yaitu kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi produktif secara vertikal maupun horisontal melalui pemenuhan kebutuhan dasar dengan tanpa diskriminasi gender sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja baik di dalam maupun diluar daerah.

Selain itu dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan menguatnya pelaksanaan desentralisasi, tuntutan terhadap kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat serta pelaksanaan asas dan norma tata pemerintahan yang baik, menjadi tantangan di masa depan guna memenuhi tingkat kepuasan masyarakat.

## **2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Alam**

Sumberdaya alam yang dimiliki oleh kabupaten Rembang tergolong melimpah, untuk itu pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam agar dioptimalkan guna menunjang pembangunan di segala bidang. Dengan garis pantai yang tergolong terpanjang di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan tingkat produksi yang meningkat dari tahun-ke tahun. Potensi wilayah pesisir dan lautan seperti kawasan mangrove, terumbu karang dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang juga sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pariwisata bahari terpadu. Sementara itu, pertanian merupakan contributor contributor terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Rembang dengan produksi dan produktivitas yang cenderung meningkat selama kurun waktu lima tahun mengindikasikan bahwa sektor ini memiliki kekuatan sebagai penyedia lapangan kerja potensial sekaligus berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di perdesaan. Selain itu, sebagian wilayah Kabupaten Rembang yang merupakan pegunungan kapur menambah potensi sumberdaya alam yang dimiliki kabupaten Rembang khususnya bahan galian golongan C. Luas hutan yang menutupi hampir seperempat wilayah kabupaten Rembang juga merupakan sumberdaya yang potensial untuk dikelola, tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi tetapi juga fungsinya sebagai penopang sistem ekologi kehidupan.

Selain potensi yang dimiliki, pengelolaan sumberdaya alam juga menghadapi berbagai kelemahan. Kajian, studi maupun survey potensi sumberdaya alam tersebut masih tergolong minim. Pembangunan antar wilayah juga masih terlihat belum terpadu, belum terbangun simpul-simpul keterkaitan dan cenderung parsial. Hal ini yang menyebabkan kurang terintegrasinya pembangunan perekonomian antar

wilayah di Kabupaten Rembang sebagai satu kesatuan yang matang dan solid. Regulasi yang mengatur pemanfaatan sumberdaya alam sehingga tercapai keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam juga belum sepenuhnya ada dan dilaksanakan. Konflik kepentingan antar berbagai sektor juga merupakan kelemahan yang masih saja terjadi, hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) pengelolaan sumberdaya alam yang pada akhirnya mengakibatkan menurunnya daya dukung lahan.

Melihat situasi perdagangan yang ada, Kabupaten Rembang berpeluang untuk meningkatkan ekonominya dengan memperbaiki daya saing produknya, tidak lagi hanya menjual produk dalam bentuk bahan baku tetapi dapat ditingkatkan menjadi barang jadi ataupun setengah jadi melalui pengembangan industri pengolahan baik skala kecil, menengah maupun besar. Dengan demikian, nilai tambah yang dihasilkan akan dapat berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat Rembang, penyerapan tenaga kerja dan meminimalisasi eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan. Pasar industri nasional dan internasional dengan permintaan produk berkualitas baik yang semakin meningkat juga merupakan peluang tersendiri yang harus segera ditangkap dengan memperbaiki kapabilitas dan daya saing industri pengolahan di Kabupaten Rembang.

Sementara itu kondisi iklim di Kabupaten Rembang yang tergolong kering sering menyebabkan terjadinya krisis air setiap tahunnya. Kondisi kekurangan air baku di Kabupaten Rembang ini berpengaruh terhadap produktivitas lahan pertanian, yang jika tidak mendapatkan perhatian pemecahan akan mengganggu stabilitas swasembada pangan (beras) yang telah di capai oleh Kabupaten Rembang. Sebagian besar kepemilikan atau penguasaan lahan di bidang pertambangan belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengembang atau investor yang telah mengantongi ijin eksplorasi maupun eksploitasi. Di samping itu penerapan teknologi dalam pengolahan sumberdaya alam masih belum optimal.

### **3. Kualitas dan kuantitas infrastruktur belum memadai**

Posisi geografis Kabupaten Rembang yang strategis yang dilalui jalan Pantura Pulau Jawa yang merupakan jalan Negara yang telah terkoneksi dengan jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten sekitar maupun jaringan jalan kabupaten yang telah menghubungkan di semua wilayah kecamatan dan desa merupakan infrastruktur pokok sebagai satu kesatuan sistem transportasi nasional, sistem transportasi wilayah maupun sistem transportasi lokal dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Kondisi eksisting di sepanjang koridor jalan Pantura telah berkembang berbagai aktifitas ekonomi seperti industri, jasa, perdagangan maupun perhubungan darat dan perhubungan laut. Adanya infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang didukung infrastruktur pendukungnya seperti ketersediaan air baku, energi listrik dan telekomunikasi menjadikan kekuatan untuk pengembangan potensi pantai sepanjang 63.5 km melalui pembangunan pelabuhan perikanan pantai dan pelabuhan umum yang dipadukan dengan pengembangan industri pengolahan berbasis pertambangan, pertanian dan perkebunan maupun perikanan dan kelautan.

Di sisi lain terkait pembangunan infrastruktur wilayah masih dihadapkan beberapa kelemahan seperti masih kurang optimalnya pengaturan dalam pembangunan infrastruktur, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman masih kurang, kondisi infrastruktur permukiman seperti air minum, drainase, persampahan maupun air limbah belum memadai, infrastruktur pelabuhan masih kurang maupun pengelolaan potensi air permukaan belum optimal

untuk menampung kelebihan air pada musim hujan melalui pembangunan embung, bendung dan check dam.

Peluang eksternal pengembangan infrastruktur wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Rembang dimana wilayah Kabupaten Rembang sebagai simpul transportasi darat yaitu potensi terminal barang untuk mengelola arus barang yang semakin meningkat. Di samping itu keunggulan Kabupaten Rembang menjadi waterfront city yang memberikan peluang dalam pengembangan kota bahari untuk memicu pengembangan daerah sekitar. Sementara faktor resiko dalam pengembangan infrastruktur wilayah masih dihadapkan pada persoalan seperti kejadian bencana banjir, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor dan kekeringan serta fluktuasi harga bahan bangunan sebagai dampak inflasi secara nasional.

Sementara itu pada era otonomi daerah yang semakin mantap yang lebih menitikberatkan pada upaya pengembangan wilayah yang diwujudkan dalam struktur ruang daerah dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pola ruang daerah yang terus didorong terjadinya keseimbangan antara kawasan lindung dan budidaya dalam rangka penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan keterpaduan pembangunan daerah ke depan sangat diperlukan peningkatan keterpaduan stakeholders dan penegakan penataan ruang daerah. Di lain sisi dengan meningkatnya kebutuhan ruang maka diperlukan peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang telah mulai dirintis melalui sistem manajemen pertanahan berbasis masyarakat.

#### **4. Rendahnya minat investasi**

Kabupaten Rembang mempunyai potensi penanaman modal yang cukup terbuka yang sebagian besar didorong oleh adanya daya tarik potensi sumberdaya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dari tersedianya jumlah tenaga kerja yang memadai dan murah yang juga menjadi daya tarik pasar konsumsi. Pernyataan ini dapat diperkuat dengan kondisi eksisting Kabupaten Rembang yang memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar berbasis sumberdaya alam seperti potensi pertambangan galian C, potensi kelautan dan perikanan serta potensi pertanian dan kehutanan disamping pula potensi daya tarik wisata berbasis sumberdaya alam.

Namun demikian minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Rembang sampai saat ini masih relatif rendah. Sampai dengan tahun 2005 investasi swasta di Kabupaten masih kecil dibanding investasi oleh pemerintah. Masuknya PMA maupun PMDN masih sedikit yaitu masing-masing 1 perusahaan sepanjang tahun 2001-2005. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat investor berinvestasi di Kabupaten Rembang ini terindikasi dari kurang memadainya sarana prasarana pendukung ekonomi seperti ketersediaan air bersih untuk kepentingan proses produksi maupun untuk kepentingan domestik, pasokan energi serta fasilitas transportasi khususnya belum tersedianya pelabuhan niaga. Faktor promosi investasi juga belum menjadi fokus perhatian dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Rembang. Belum adanya lembaga promosi investasi menyebabkan fungsi promosi investasi kurang berjalan secara optimal. Demikian pula regulasi dalam penanaman modal masih kurang memadai untuk memberikan pelayanan bagi minat investasi di Kabupaten Rembang.



Dari identifikasi potensi dan kendala tersebut sebenarnya Kabupaten Rembang cukup mempunyai peluang dalam meningkatkan penanaman modal dengan pertimbangan bahwa penanaman modal mempunyai nilai strategis dalam mengungkit perekonomian daerah. Peluang-peluang tersebut menyangkut daya saing Kabupaten Rembang dalam memberikan insentif bagi penanaman modal ditengah kecenderungan perilaku perekonomian global yang mencari efisiensi produksi. Keringanan pajak, jaminan keamanan bagi investasi serta penyediaan fasilitas akan meningkatkan daya saing Kabupaten Rembang dalam menarik peluang investasi.

## 5. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Di era perekonomian global yang makin kompetitif, sejumlah ciri yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian secara struktural maupun spasial di tingkat global dan lokal.

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus perhatian bagi Kabupaten Rembang dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas adalah kurang siapnya sektor usaha dalam menghadapi iklim persaingan yang sangat ketat. Yang menjadi akar permasalahan sektor usaha di Kabupaten Rembang adalah lemahnya kualitas SDM terutama pengusaha maupun tenaga kerja yang mayoritas kurang menguasai teknologi dan inovasi serta akses permodalan yang terbatas. Kendala-kendala ini menyebabkan efisiensi dan kualitas produksi sektor usaha kurang mampu bersaing dengan negara lain yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik dan murah.

Kabupaten Rembang mempunyai peluang untuk meningkatkan pangsa pasar dalam perdagangan bebas. Dari keterbukaan informasi dapat digarap pasar-pasar potensial bagi produk sektor usaha di Kabupaten Rembang yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif pada pasar global seperti produk lokal kerajinan dan ketrampilan tangan yang banyak terdapat di Kabupaten Rembang. Disamping itu kelimpahan sumberdaya seperti pertambangan dan perikanan juga merupakan peluang perdagangan berorientasi ekspor.

Masuknya perdagangan bebas di kawasan Asia melalui perjanjian CAFTA, Nafta, dan WTO merupakan konsensus antar negara. Salah satu konsekuensi logis adanya perdagangan bebas adalah potensi ancaman bagi pasar hasil pertanian dan peternakan dari petani kecil dan para pengrajin dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di pasar lokal. Hasil pertanian, peternakan, usaha kecil, mikro dan menengah belum siap bersaing di pasar internasional maupun pasar lokal dengan banjirnya produk barang dan jasa dari negara lain. Untuk itu, dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional maupun global, ke depan perlu meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional maupun standar mutu internasional. Pemerintah daerah juga harus pro-aktif dalam melindungi petani kecil, nelayan dan industri kerajinan yang tidak siap bersaing dengan hasil pertanian, peternakan dan industri dari pasar internasional.

## 6. Krisis Energi

Sebagai daerah yang sedang berkembang, pertumbuhan penduduk dan industri di Kabupaten Rembang menuntut adanya ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup. Sementara itu, energi minyak bumi dan gas alam yang tersedia jumlahnya semakin terbatas dan jenis energi tersebut sifatnya tidak dapat diperbaharui. Fakta empiris selama ini telah banyak membuktikan bahwa keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan efek domino terhadap peningkatan harga kebutuhan masyarakat yang lain.

Salah satu dampak yang selalu terjadi akibat adanya krisis energi adalah harga satuan energi semakin tidak terkendali terutama BBM dan listrik yang akan menyebabkan kekurangan energi di berbagai daerah karena ketidakmampuannya untuk membeli atau memproduksi energi. Ancaman krisis energi juga menyebabkan terbukanya potensi konflik sosial sebagai akibat meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya pengangguran.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi potensi krisis energi di Kabupaten Rembang, diantaranya menangkap peluang program energy nasional dengan adanya rencana pembangunan pembangkit listrik di Pulau Jawa. Disamping perlu diupayakan pencarian energi alternatif secara terus menerus terkait dengan energi yang ramah lingkungan, seperti energi matahari, air dan angin yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia dan Kabupaten Rembang pada khususnya

## 7. Degradasi Lingkungan

Pembangunan lingkungan hidup harus memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan sehingga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dapat dipertahankan. Pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Rembang dalam mendukung pembangunan sektor lainnya dapat diupayakan melalui pengembangan potensi hutan mangrove, hutan rakyat, pengelolaan sawah lestari, kawasan ruang terbuka publik, kawasan lindung di luar hutan lindung, Daerah Aliran Sungai (DAS), sumber mata air dan dengan adanya dukungan kondisi geografis mulai dari dataran tinggi, sedang dan rendah sehingga memudahkan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dari hulu ke hilir.

Pembangunan lingkungan hidup harus memperhatikan kondisi faktor-faktor internal yang bisa menghambat jalannya pembangunan di daerah, diantaranya adalah kerusakan hutan, terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk peruntukan permukiman, industri, dan lainnya, pemanfaatan air bawah tanah yang tidak memperhatikan kaidah pengelolaan ABT, kerusakan terumbu karang, kerusakan daerah tangkapan air (DTA) dan sekitar mata air, berkurangnya daerah resapan air, kerusakan area bekas pertambangan, keterbatasan informasi geologi dalam mendukung kegiatan penatausahaan tambang, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup, kurangnya kepedulian LSM lingkungan hidup, masih kurangnya pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat, dan lemahnya regulasi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Peluang yang bisa diupayakan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Rembang yaitu melalui dukungan Program *millenium development goals (MDG's) 2015, eco labelling, ISO* yang mempersyaratkan produk-produk hasil olahan memenuhi kriteria ramah lingkungan dan bebas polusi dan meningkatnya permintaan jasa lingkungan hutan yang tinggi diluar produksi kayu pokok (jasa lingkungan air,

jasa lingkungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan ekowisata dan jasa lingkungan karbon).

Ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya pengelolaan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup seperti terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan, eksploitasi sumber-sumber air yang berlebihan, industrialisasi berbasis bahan tambang yang tidak berwawasan lingkungan dan ketergantungan terhadap hutan cukup tinggi.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI KABUPATEN REMBANG**

#### **A. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang**

Berdasarkan data kondisi umum daerah Kabupaten Rembang, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan, dan potensi serta peluang yang ada, dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rembang tahun 2005-2025 sebagai berikut :

#### **“REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”**

**REMBANG**, adalah satu daerah otonom yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**MAJU**, atau modern ditandai oleh kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, yaitu memiliki pendidikan yang memadai, berkepribadian dan berakhlak mulia, derajat kesehatan dan produktivitas yang tinggi, serta tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin rendah. Dari sisi ekonomi kemajuan Rembang tercermin dari semakin tingginya tingkat pendapatan per kapita penduduk dengan tingkat kesenjangan yang rendah, akibat keterpaduan perkembangan dan produktivitas yang tinggi antar sektor yaitu pertanian, perikanan kelautan, pertambangan, industri dan jasa-jasa. Dari segi politik-pemerintahan, kemajuan Rembang ditandai oleh semakin mantapnya kelembagaan politik dan pemerintahan didukung oleh partisipasi masyarakat yang tinggi dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM dan kesetaraan gender. Rembang yang maju ditandai oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Maju juga dimaknai dinamis yang memiliki arti bahwa segenap stakeholder pemerintahan di Kabupaten Rembang memiliki kekuatan dan semangat besar untuk cepat bergerak dan bertindak dalam memanfaatkan peluang kearah kemajuan dan mudah melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan kondisi lingkungan internal maupun perubahan kondisi lingkungan eksternal yang terus berkembang. Dinamis juga memiliki arti capaian perkembangan pembangunan daerah yang progresif dari waktu ke waktu, capaian ini didukung oleh segenap potensi *stakeholder* yang ada di Kabupaten Rembang.

**MANDIRI**, mencerminkan suatu sikap untuk mengenali potensi dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta kesiapan menghadapi tantangan yang ada. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti luas menyangkut perilaku. Sikap positif ini dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik aspek hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya. Kemandirian tercermin antara lain

pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah kabupaten; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum berarti adanya kemampuan dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian daerah ini juga dicerminkan oleh sikap dan perilaku aparat didukung oleh masyarakat untuk menuju peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin tinggi, serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok daerah terutama pangan dan papan (perumahan).

**SEJAHTERA**, mengandung arti sejahtera lahir dan batin. bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera juga mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

## **B. Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditempuh melalui 5 (lima) cara atau misi sebagai berikut :

### **1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.**

Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya visi Rembang maju, mandiri dan sejahtera. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai oleh adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, makin mantapnya kearifan lokal; dan meningkatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang. Disamping itu juga ditunjukkan pula oleh makin kuatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan oleh watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis.

### **2. Mewujudkan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah.**

Pemanfaatan dan pengembangan potensi perekonomian daerah secara optimal diharapkan akan dapat menopang pencapaian visi Rembang maju, mandiri dan sejahtera. Pemanfaatan potensi Kabupaten Rembang ini meliputi potensi pertanian dalam arti luas, potensi pertambangan, potensi kelautan perikanan dan potensi industri serta jasa. Pengembangan potensi ekonomi yang ada juga ditujukan ke arah peningkatan daya saing daerah dalam produktivitas barang dan jasa. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai oleh peningkatan dan pertumbuhan PDRB yang memadai, peningkatan pendapatan masyarakat dan semakin tingginya kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### **3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.**

Pemerintahan yang bersih dan baik atau *good governance* merupakan suatu hal mutlak yang harus dilakukan, untuk mewujudkan tercapainya visi Kabupaten Rembang. Tata Pemerintahan yang baik memiliki ciri-ciri antara lain: (1) akuntabilitas (*accountability*), ialah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan; (2) keterbukaan dan transparan (*openness and transparency*); (3) ketaatan pada hukum; (4) komitmen kuat untuk bekerja bagi kepentingan umum, dan bukan pada kelompok atau pribadi; (5) komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap-tahap pembangunan.

### **4. Mewujudkan pengembangan infrastruktur yang memadai.**

Infrastruktur yang memadai akan menjamin terjadinya percepatan tercapainya kemajuan dan kesejahteraan. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai dengan ketersediaan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan mempercepat mobilitas barang dan jasa. Infrastruktur dimaksud meliputi perhubungan, jalan dan jembatan, pengairan, air bersih, sanitasi, permukiman dan perumahan, persampahan, serta infrastruktur dan komunikasi.

### **5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.**

Sumberdaya alam di Kabupaten Rembang memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Rembang. Namun demikian pemanfaatan sumberdaya alam ini harus memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan agar lingkungan tetap lestari dan keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai adanya eliminasi dampak lingkungan berupa adanya upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada setiap kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

# BAB V

## SASARAN POKOK, ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005-2025

### A. Sasaran Pokok

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya SDM yang Berkualitas  
Terwujudnya SDM berkualitas ditandai dengan:
  - a. Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan ajaran agamanya.
  - b. Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif, produktif dan mandiri melalui perwujudan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan.
  - c. Terwujudnya penduduk kabupaten Rembang yang sehat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.
  - d. Terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - e. Terwujudnya tenaga kerja terampil yang berkualitas dan memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi, melalui Peningkatan kualitas dan kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah maupun Swasta, sehingga mampu berkompetisi serta mengisi peluang pasar kerja, berkembangnya kesempatan kerja, berkurangnya pengangguran dan meningkatnya kualitas keharmonisan hubungan industrial.
  - f. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - g. Terwujudnya budaya membaca pada masyarakat melalui peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak/karya rekam dan pengembangan sarana/prasarana perpustakaan.
  - h. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak melalui peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak yang menjamin tumbuh kembang anak.
  - i. Terwujudnya SDM yang berkarakter kebangsaan dan nasionalis melalui pembangunan jati diri bangsa, pengembangan karakter dan identitas bangsa dan aktualisasi nilai-nilai budaya setempat.
  - j. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, melalui optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
  - k. Terwujudnya Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (*nation building*) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan olahraga yang maju untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
  - l. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.
  - m. Terwujudnya Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui fasilisasi dalam penyelenggaraan transmigrasi.

2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing

Terwujudnya Perekonomian Daerah yang maju dan berdaya saing ditandai oleh:

- a. Terwujudnya struktur perekonomian yang kuat melalui penguatan struktur ekonomi daerah berbasis primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier.
- b. Terwujudnya agrobisnis yang maju dan berkembang peningkatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir, peningkatan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar.
- c. Terwujudnya penyediaan sistem informasi pertanian melalui deseminasi inovasi teknologi dan pengembangan data pertanian yang berkelanjutan.
- d. Terwujudnya SDM pertanian yang kompeten dalam peningkatan produktivitas pertanian.
- e. Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan yang mantap dan memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- f. Terwujudnya struktur industri yang kuat melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal (pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan), pengembangan kluster kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai *leading sector* dalam perekonomian Kabupaten Rembang.
- g. Terwujudnya perdagangan yang optimal melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
- h. Terwujudnya koperasi dan UMKM yang mandiri melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
- i. Terwujudnya akses lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM
- j. Terwujudnya peningkatan investasi secara berkelanjutan melalui penguatan pelayanan penanaman modal, pengembangan kebijakan yang pro penanaman modal, membangun infrastruktur ekonomi yang baik, menekan *high cost economy* dan penyederhanaan sistem pelayanan penanaman modal.
- k. Terwujudnya daya tarik kepariwisataan melalui pelestarian peninggalan budaya, tradisi, kesenian, pengembangan obyek wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya.

3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai ditandai oleh:

- a. Terwujudnya pelayanan transportasi yang memadai melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah.
- b. Terwujudnya ketersediaan air bersih dan air baku yang mantap melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.
- c. Terwujudnya ketersediaan rumah yang memadai melalui pembangunan perumahan, rehabilitasi perumahan dan terpenuhinya kebutuhan rumah serta terbentuknya lingkungan perumahan yang sehat.
- d. Terwujudnya pembangunan wilayah yang seimbang melalui percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah, percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- e. Terwujudnya tata ruang harmonis melalui penegakan peraturan tata ruang, peningkatan kesadaran masyarakat akan tata ruang.



4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh:

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan pelayanan publik dan peningkatan profesionalisme aparat.
- b. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif.
- c. Terwujudnya masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
- d. Terwujudnya masyarakat sadar informasi melalui penyadaran hak masyarakat informasi yang luas dan transparan.
- e. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mantap melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
- f. Terwujudnya Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
- g. Terwujudnya sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan *website*.

5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ditandai dengan :

- a. Terwujudnya pendayagunaan sumberdaya alam yang lestari melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan.
- b. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam tak terbarukan secara bijaksana melalui peningkatan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan hidup dan pertimbangan kepentingan penduduk sosial, kestabilan daya dukung alam.
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui peningkatan kualitas mitigasi bencana dan peningkatan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana, penyadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta konservasi lahan kritis dan penghijauan.
- d. Terwujudnya pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang berkelanjutan melalui diversifikasi atas energi utama dengan energi terbarukan.
- e. Terwujudnya pemanfaatan bahan tambang yang optimal melalui pengelolaan pertambangan ramah lingkungan, peningkatan nilai tambah hasil tambang
- f. Terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari melalui konservasi hutan rakyat dan perhutani serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.
- g. Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang optimal melalui pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, budaya, dan teknologi.
- h. Terwujudnya pelayanan administrasi pertanahan yang berkualitas, melalui penegakkan hukum dan administrasi agraria/pertanahan serta penanganan kasus-kasus sengketa tanah, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan.

## B. Arah Kebijakan

### 1. Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Berkualitas

Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dicapai melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya.
- b. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan pendidikan dan peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan.
- c. Peningkatan kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.
- d. Peningkatan keluarga kecil, bahagia, sejahtera melalui pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat..
- e. Peningkatan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja; pengembangan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan meningkatkan kualitas keharmonisan hubungan industrial.
- f. Peningkatan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- g. Peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak/karya rekam dan pengembangan sarana/prasarana perpustakaan.
- h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Pengembangan dan pembangunan jati diri bangsa untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar pada aktualisasi nilai-nilai budaya setempat.
- j. Penurunan jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses kualitas hidup berbasis keluarga.
- k. Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
- l. Pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.
- m. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan meningkatkan jumlah transmigran

### 2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing

Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing dicapai melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur perekonomian daerah berbasis sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier
- b. Pengembangan agrobisnis, melalui pengembangan dan penguatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar
- c. Pengembangan sistem informasi pertanian dan deseminasi inovasi teknologi guna mendukung pengembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

- d. Peningkatan kemampuan kapasitas SDM pertanian dalam peningkatan produktivitas pertanian
  - e. Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat serta diversifikasi produk pangan.
  - f. Penguatan Struktur Industri yang diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Rembang
  - g. Optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
  - h. Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
  - i. Optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM
  - j. Peningkatan realisasi penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan dunia usaha melalui penguatan dan penyederhanaan pelayanan penanaman modal, mengembangkan kebijakan pro penanaman modal, peningkatan infrastruktur ekonomi yang baik, dan menekan *ekonomi biaya tinggi*.
  - k. Pengembangan Pariwisata yang diarahkan melalui peningkatan obyek wisata, pelestarian peninggalan budaya, tradisi, serta kesenian, dalam rangka membentuk karakteristik budaya masyarakat serta daya tarik kunjungan wisata
3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai
- Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang memadai dicapai melalui kebijakan sebagai berikut:
- a. Peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
  - b. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam dan antar kawasan serta antar kepentingan melalui konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air. Pengembangan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
  - c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah dan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuhkembangkan potensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, kredit mikro perumahan serta pemerataan pembangunan prasarana sarana dasar permukiman.
  - d. Perwujudan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah.
  - e. Perwujudan kawasan agropolitan sebagai pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan prasarana sarana, pengembangan kelembagaan dan jejaring pemasarannya.

#### 4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dicapai melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip *good governance*.
- b. Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif.
- c. Perwujudan masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
- d. Peningkatan Pembangunan komunikasi dan informasi melalui perwujudan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan.
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mewujudkan suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
- f. Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan *website*.

#### 5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan.
- b. Pendayagunaan sumberdaya alam tak terbarukan dengan memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat lokal
- c. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui berbagai upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air
- d. Pengembangan energi melalui diversifikasi energi utama maupun energi terbarukan untuk pemerataan dan pemenuhan distribusi energi
- e. Peningkatan nilai tambah dan manfaat usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.
- f. Pengelolaan hutan secara lestari melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.
- g. Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan.
- h. Optimalisasi tata guna lahan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan, penegakkan hukum pertanahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib administrasi pertanahan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan

## C. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah

### C.1. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah I (Tahun 2005-2009)

#### 1. Terwujudnya SDM yang Berkualitas

- a. Peningkatan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya.
    - 1) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana peribadatan.
    - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.
    - 3) Peningkatan sikap toleransi antar umat beragama .
  - b. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan pendidikan dan peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan.
    - 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang dititik beratkan pada jenjang pendidikan dasar.
    - 2) Peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana terutama pendidikan dasar.
    - 3) Peningkatan tata kelola dan pencitraan publik pendidikan terutama pendidikan dasar.
    - 4) Peningkatan jumlah/kuantitas SMK untuk mencapai rasio 50:50.
    - 5) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
  - c. Peningkatan kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.
    - 1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar.
    - 2) Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.
    - 3) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
    - 4) Pembangunan sistem jaminan kesehatan daerah.
    - 5) Peningkatan jumlah tenaga kesehatan.
    - 6) Pengurangan gizi buruk pada keluarga miskin.
  - d. Peningkatan keluarga kecil, bahagia, sejahtera melalui pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat..
    - 1) Peningkatan KIP/K (Komunikasi Inter Personal/Konseling) dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) untuk optimalisasi pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam ber- KB
    - 2) Peningkatan ketahanan keluarga dalam rangka pengurangan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
  - e. Peningkatan kualitas, komptensi dan daya saing tenaga kerja; pengembangan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan meningkatkan kualitas keharmonisan hubungan industrial.
    - 1) Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan
    - 2) Peningkatan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
    - 3) Peningkatan produktifitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja
    - 4) Peningkatan perlindungan pekerja
    - 5) Peningkatan kualitas hubungan industrial
    - 6) Penurunan angka pengangguran
  - f. Peningkatan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
    - 1) Penataan dan penetapan standar pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS.
-

- 2) Peningkatan sistem dan kelembagaan perlindungan sosial dan penanganan korban bencana
  - 3) Peningkatan rasa kesetiakawanan dan jiwa gotong royong dalam peningkatan kesejahteraan sosial
- g. Peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak/karya rekam dan pengembangan sarana/prasarana perpustakaan.
- 1) Penumbuhan minat baca masyarakat melalui promosi minat baca.
  - 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan dan koleksi buku perpustakaan.
  - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan keliling.
- h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 1) Penataan sistem dan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - 2) Peningkatan regulasi dibidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
  - 3) Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan dan jaminan tumbuh kembang anak
- i. Pengembangan dan pembangunan jati diri bangsa untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar pada aktualisasi nilai-nilai budaya setempat.
- 1) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap semangat persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan nasional, bela negara dan cinta tanah air
  - 2) Penumbuhan nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal yang mendukung pembangunan
- j. Penurunan jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses kualitas hidup berbasis keluarga.
- 1) Jaminan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin
  - 2) Pengembangan program pemberdayaan masyarakat
  - 3) Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif
  - 4) Pengembangan ketrampilan bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan berusaha
- k. Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
- 1) Peningkatan kompetensi dan kemandirian generasi muda
  - 2) Peningkatan jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi generasi muda
  - 3) peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang dengan titik berat pada cabang olahraga unggulan.
  - 4) peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga
- l. Pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.
- 1) Peningkatan Penanaman nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda
  - 2) Peningkatan Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional
  - 3) Peningkatan publikasi, sosialisasi dan pagelaran apresiasi seni budaya

- m. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan meningkatkan jumlah transmigran
  - 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dengan titik berat transmigrasi non swakrsa
  - 2) Peningkatan jumlah Transmigran khususnya swakarsa mandiri

## 2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing

- a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur perekonomian daerah berbasis sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier
  - 1) Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian.
  - 2) Mendorong pengembangan usaha sektor primer, sekunder dan tersier
- b. Pengembangan agrobisnis, melalui pengembangan dan penguatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar
  - 1) Peningkatan produksi, produktivitas dengan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, integrasi usaha pertanian
  - 2) Pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.
  - 4) Peningkatan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
  - 5) Pengembangan agrobisnis berbasis keunggulan komparative menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.
  - 6) Pengembangan kemitraan jejaring pasar produk pertanian.
- c. Pengembangan sistem informasi pertanian dan deseminasi inovasi teknologi guna mendukung pengembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
  - 1) Peningkatan system informasi produksi dan informasi pasar.
  - 2) Deseminasi teknologi tepat guna.
  - 3) Pengembangan usaha *off farm*
- d. Peningkatan kemampuan kapasitas SDM pertanian dalam peningkatan produktivitas pertanian.
  - 1) Peningkatan kemampuan petani dan stakeholder dibidang pertanian
  - 2) Revitalisasi lembaga penyuluhan
- e. Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat serta diversifikasi produk pangan.
  - 1) Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan halal, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat
  - 2) Peningkatan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan yang bermutu, aman dan bergizi.
  - 3) Mempercepat proses diversifikasi konsumsi pangan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal
- f. Penguatan Struktur Industri yang diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Rembang
  - 1) Penataan Struktur Industri berbasis industri kecil dan menengah dalam mata rantai industri hulu dan hilir
  - 2) Pengembangan klaster industri berbasis kekayaan alam daerah .

- g. Optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
- 1) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana pasar, pengawasan peralatan perdagangan dan tersedianya sistem informasi pasar.
  - 2) Peningkatan jaringan distribusi dan akses perdagangan ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional.
- h. Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
- 1) Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat.
  - 2) Peningkatan kelembagaan dan SDM untuk koperasi dan UMKM agar mampu bersaing dalam perekonomian.
  - 3) Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru melalui UMKM yang menampung lapangan kerja baru
- i. Optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM
- 1) Peningkatan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM.
  - 2) Peningkatan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM.
  - 3) Fasilitasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM
- j. Peningkatan realisasi penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan dunia usaha melalui penguatan dan penyederhanaan pelayanan penanaman modal, mengembangkan kebijakan pro penanaman modal, peningkatan infrastruktur ekonomi yang baik, dan menekan *ekonomi biaya tinggi*.
- 1) Pelayanan Perijinan Investasi satu pintu.
  - 2) Peningkatan promosi investasi berbasis potensi sumberdaya daerah
  - 3) Peningkatan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi.
- k. Pengembangan Pariwisata yang diarahkan melalui peningkatan obyek wisata, pelestarian peninggalan budaya, tradisi, serta kesenian, dalam rangka membentuk karakteristik budaya masyarakat serta daya tarik kunjungan wisata
- 1) Peningkatan kualitas obyek wisata dan daya tarik wisata berbasis keragaman budaya, pesona alam dan keunikan lokal
  - 2) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dibidang pariwisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata.
  - 3) Membangun image positif pariwisata Kabupaten Rembang di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
  - 4) Pengembangan produk pariwisata berbasis keragaman budaya, alam dan keunikan lokal.
  - 5) Penataan kawasan wisata bahari terpadu untuk menunjang pengembangan *waterfront city* dan wisata kota kuno (*heritage tourism*)



3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai.

- a. Peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
  - 1) Penanganan jaringan jalan dan jembatan terutama kondisinya rusak berat dan rusak akibat bencana.
  - 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan.
  - 3) Peningkatan pelayanan angkutan umum dan terminal.
  - 4) Pengembangan pelabuhan perikanan pantai dan pengembangan pelabuhan umum Rembang.
  
- b. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam dan antar kawasan serta antar kepentingan melalui konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air. Pengembangan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
  - 1) Pengembangan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
  - 2) Pengembangan fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air guna mendukung aktivitas produksi dan memenuhi kebutuhan air baku.
  - 3) Pengendalian erosi melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
  - 4) Pembangunan embung, bendung dan PPST untuk mendukung ketersediaan air baku.
  
- c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah dan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuhkembangkan potensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, kredit mikro perumahan serta pemerataan pembangunan prasarana sarana dasar permukiman.
  - 1) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni khususnya pada kawasan padat kumuh dan kawasan perdesaan.
  - 2) Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman.
  - 3) Pengembangan kebijakan dan stimulan serta kredit mikro pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  - 4) Penataan bangunan gedung/rumah negara.
  - 5) Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman.
  - 6) Pengembangan prasarana dan sarana dasar dan pembangunan perumahan baru di kawasan Kasiba dan Lisiba
  
- d. Perwujudan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah.
  - 1) Pembangunan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan.
  - 2) Pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan kelautan, pelabuhan, telekomunikasi dan informasi.
  - 3) Perencanaan kawasan strategis.
  - 4) Pembangunan prasarana kawasan strategis.
  - 5) Perencanaan dan pembangunan kawasan industri.
  - 6) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Review RUTRK/RDTRK Perkotaan Rembang dan Ibu Kota Kecamatan
  - 7) Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan pembangunan sektoral
  - 8) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
  - 9) Pengembangan kelembagaan tata ruang daerah

- e. Perwujudan kawasan agropolitan sebagai pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan prasarana sarana, pengembangan kelembagaan dan jejaring pemasarannya.
    - 1) Kajian pengembangan agropolitan
    - 2) Pembangunan prasarana dan sarana kawasan agropolitan
    - 3) Penyiapan kelembagaan pengembangan kawasan agropolitan
4. Terwujudnya Kehidupan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip *good governance*.
    - 1) Penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
    - 2) Penetapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik.
    - 3) Fasilitasi peningkatan pemerintah desa/kelurahan.
    - 4) Peningkatan kualitas pembangunan daerah yang partisipatif.
  - b. Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif.
    - 1) Peningkatan manajemen pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan belanja daerah secara efisiensi dan efektif.
    - 2) Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan
    - 3) Penggalan sumber-sumber pembiayaan pembangunan diluar PAD.
  - c. Perwujudan masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
    - 1) Peningkatan peran partai politik dan lembaga perwakilan rakyat.
    - 2) Fasilitasi pendidikan politik masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi politik.
  - d. Peningkatan Pembangunan komunikasi dan informasi melalui perwujudan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan.
    - 1) Fasilitasi terhadap kebutuhan informasi publik
    - 2) Pelayanan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah
    - 3) Fasilitasi prasarana dan sarana jaringan informasi.
  - e. Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mewujudkan suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
    - 1) Penataan dan fasilitasi sistem dan kelembagaan keamanan dan ketertiban lingkungan
    - 2) Peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum
    - 3) Peningkatan profesionalisme aparatur penegak hukum di Daerah.
    - 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan
  - f. Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
    - 1) Peningkatan sistem Administrasi Kearsipan yang memenuhi standar kualitas.
    - 2) Peningkatan kualitas operator penyelenggaraan pelayanan kearsipan.

- g. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan *website*.
  - 1) Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi.
  - 2) Peningkatan kesadaran aparat dalam keterbukaan informasi publik.

#### 5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

- a. Pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan.
  - 1) Identifikasi, inventarisasi dan pemetaan potensi SDA terbarukan secara berkesinambungan
  - 2) Pemetaan dan inventarisasi kerusakan SDA terbarukan
  - 3) Peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* dalam menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan SDA terbarukan.
  - 4) Penyusunan regulasi pengelolaan sumberdaya alam terbarukan
- b. Pendayagunaan sumberdaya alam tak terbarukan dengan memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat lokal
  - 1) Identifikasi, inventarisasi dan pemetaan potensi SDA tak terbarukan secara periodik
  - 2) Pemetaan dan inventarisasi kerusakan SDA tak terbarukan
  - 3) Peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* dalam menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan SDA tak terbarukan.
  - 4) Penyusunan regulasi pengelolaan sumberdaya alam tak terbarukan
  - 5) Studi potensi kawasan CAT (Cekungan Air Tanah) dan pemetaan zona hidrogeologi.
- c. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui berbagai upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air
  - 1) Pemetaan kawasan rawan bencana dan kawasan lahan kritis
  - 2) Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana.
  - 3) Peningkatan penyediaan kelengkapan sarana prasarana tanggap darurat bencana
  - 4) Penyadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta konservasi lahan kritis
  - 5) Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam setiap aktivitas pembangunan.
  - 6) Pengembangan hutan rakyat dan rehabilitasi hutan mangrove
- d. Pengembangan energi melalui diversifikasi energi utama maupun energi terbarukan untuk pemerataan dan pemenuhan distribusi energi
  - 1) Pemenuhan distribusi energi dan pengembangan energi alternatif (bersih) yang terbarukan.
  - 2) Pemetaan potensi dan cadangan energi baru serta penganekaragaman pemanfaatan energi baru terbarukan (energi alternatif).
  - 3) Peningkatan penyediaan dan pemerataan distribusi energi alternatif yang ramah lingkungan.

- e. Peningkatan nilai tambah dan manfaat usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.
  - 1) Peningkatan diversifikasi usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
  - 2) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan.
  - 3) Peningkatan nilai tambah usaha pertambangan rakyat.
  - 4) Penyusunan regulasi penatausahaan tambang
  
- f. Pengelolaan hutan secara lestari melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.
  - 1) Pengembangan Kelembagaan masyarakat sekitar hutan
  - 2) Pengembangan Kemitraan antara pengelola hutan negara dan masyarakat lokal sekitar
  - 3) Pengendalian kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia
  - 4) Peningkatan komitmen stakeholders dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan
  
- g. Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan.
  - 1) Peningkatan produksi kelautan yang berbasis ekosistem dan sesuai dengan daya dukung kelautan.
  - 2) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
  - 3) Peningkatan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.
  - 4) Peningkatan kelembagaan usaha produksi kelautan melalui pemberdayaan industri pengolahan hasil perikanan dan kluster pengolahan.
  - 5) Peningkatan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan dalam pengelolaan pesisir dan laut.
  - 6) Perbaikan kondisi wilayah pesisir dan laut dengan fokus pada konservasi lingkungan kelautan.
  - 7) Penyusunan regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.
  
- h. Optimalisasi tata guna lahan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan, penegakkan hukum pertanahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib administrasi pertanahan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan
  - 1) Pengembangan sistem administrasi pelayanan pertanahan
  - 2) Peningkatan penegakkan hukum dan administrasi pertanahan serta penanganan kasus-kasus sengketa tanah secara adil dan proporsional
  - 3) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum dan administrasi pertanahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan

## C.2. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah II (Tahun 2010-2014)

### 1. Terwujudnya SDM yang Berkualitas

- a. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya.
  - 1) Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.
  - 2) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan
  - 3) Pengembangan sikap toleransi antar umat beragama
- b. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan pendidikan dan peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan.
  - 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang dititikberatkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
  - 2) Peningkatan mutu relevansi pendidikan, sarana dan prasarana yang dititik beratkan pada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
  - 3) Peningkatan tata kelola dan pencitraan publik pendidikan terutama pendidikan menengah.
  - 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal untuk mencapai rasio 60:40.
  - 5) Pendirian pendidikan tinggi.
  - 6) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
- c. Peningkatan kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.
  - 1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan pelayanan rujukan.
  - 2) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.
  - 3) Peningkatan peran promosi dan kelembagaan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
  - 4) Pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah.
  - 5) Peningkatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan.
  - 6) Peningkatan gizi pada balita, remaja, ibu hamil dan Wanita Usia Subur (WUS).
  - 7) Penurunan angka kesakitan dan angka kematian penyakit serta mencegah meluasnya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana
- d. Peningkatan keluarga kecil, bahagia, sejahtera melalui pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat..
  - 1) Pengembangan pelayanan bagi peserta KB Baru dan KB Aktif.
  - 2) Peningkatan peran laki-laki dalam partisipasi KB.
  - 3) Peningkatan ketahanan keluarga dalam rangka pengurangan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.
- e. Peningkatan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja; pengembangan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan meningkatkan kualitas keharmonisan hubungan industrial.
  - 1) Pemantapan sistem informasi ketenagakerjaan
  - 2) Pengembangan kualitas. kompetensi daya saing tenaga kerja
  - 3) Pengembangan produktifitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja
  - 4) Peningkatan perlindungan pekerja
  - 5) Pengembangan kualitas hubungan industrial.
  - 6) Penurunan angka pengangguran

- f. Peningkatan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
  - 1) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS
  - 2) Penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sosial dan penanganan korban bencana
  - 3) Pengembangan rasa kesetiakawanan dan jiwa gotong royong dalam peningkatan kesejahteraan sosial
  
- g. Peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak/karya rekam dan pengembangan sarana/prasarana perpustakaan.
  - 1) Peningkatan minat baca masyarakat melalui peningkatan pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan sekolah dan masyarakat.
  - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan sekolah dan masyarakat
  
- h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - 1) Peningkatan sistem dan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - 2) Fasilitasi terhadap pelaksanaan regulasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - 3) Pengembangan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan dan jaminan tumbuh kembang anak.
  
- i. Pengembangan dan pembangunan jati diri bangsa untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar pada aktualisasi nilai-nilai budaya setempat.
  - 1) Peningkatan wawasan kebangsaan
  - 2) Peningkatan kualitas masyarakat yang terlatih dan berpartisipasi aktif, kreatif, dan mandiri untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi pembangunan
  
- j. Penurunan jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses kualitas hidup berbasis keluarga.
  - 1) Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin
  - 2) Stimulasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin
  - 3) Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif
  - 4) Fasilitasi akses layanan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat
  - 5) Penataan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat
  
- k. Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
  - 1) Pengembangan kompetensi dan kemandirian generasi muda
  - 2) Pengembangan jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi generasi muda
  - 3) Pengembangan prestasi olahraga secara berjenjang dengan titik berat pada cabang olahraga unggulan
  - 4) Peningkatan system pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan
  - 5) peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga

- l. Pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.
  - 1) Optimalisasi Penanaman nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda
  - 2) Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional
  - 3) pengembangan publikasi, sosialisasi dan pagelaran apresiasi seni budaya
  - 4) penggalian nilai-nilai budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat
  
- m. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan meningkatkan jumlah transmigran
  - 1) Pengembangan kualitas penyelenggaraan transmigrasi secara umum
  - 2) Peningkatan jumlah Transmigran baik fasilitasi pemerintah maupun swakarsa mandiri.

## 2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing

- a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur perekonomian daerah berbasis sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier
  - 1) Peningkatan keterkaitan sektor primer dengan sektor sekunder dan sektor tersier berbasis agrobisnis.
  - 2) Peningkatan usaha sektor primer, sekunder dan tersier
  
- b. Pengembangan agrobisnis, melalui pengembangan dan penguatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar
  - 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan pasar dan ketahanan pangan.
  - 2) Peningkatan sarana prasarana pertanian & perdesaan.
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.
  - 4) Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
  - 5) Pengembangan agrobisnis berbasis keunggulan komparative dan competitive
  - 6) Penguatan kemitraan jejaring pasar produk pertanian.
  
- c. Pengembangan sistem informasi pertanian dan deseminasi inovasi teknologi guna mendukung pengembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
  - 1) Pengembangan pasar produk pertanian.
  - 2) Pengembangan system informasi produksi, distribusi dan informasi pasar.
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendapatkan nilai tambah produk pertanian.
  - 4) Pengembangan usaha *off farm* untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian
  
- d. Peningkatan kemampuan kapasitas SDM pertanian dalam peningkatan produktivitas pertanian.
  - 1) Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya
  - 2) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh serta SDM
  
- e. Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat serta diversifikasi produk pangan.

- 1) Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan halal, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat
  - 2) Pemantapan keragaman (diversifikasi) baik produksi maupun konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal.
  - 3) Terwujudnya kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan
- f. Penguatan Struktur Industri yang diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Rembang
- 1) Penguatan klaster industri berbasis kekayaan alam daerah .
  - 2) Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha agro industri
- g. Optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
- 1) Pengembangan kapasitas kualitas sarana prasarana pasar, pengawasan peralatan perdagangan dan tersedianya sistem informasi pasar.
  - 2) Pengembangan jaringan distribusi dan akses perdagangan ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional.
- h. Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
- 1) Pengembangan iklim usaha kondusif bagi koperasi dan UMKM dalam jaringan pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
  - 2) Pengembangan kelembagaan dan SDM usaha skala mikro untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
  - 3) Pengembangan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru melalui UMKM yang menampung lapangan kerja baru
- i. Optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM
- 1) Pengembangan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM
  - 2) Pengembangan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM.
  - 3) Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM.
- j. Peningkatan realisasi penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan dunia usaha melalui penguatan dan penyederhanaan pelayanan penanaman modal, mengembangkan kebijakan pro penanaman modal, peningkatan infrastruktur ekonomi yang baik, dan menekan *ekonomi biaya tinggi* .
- 1) Optimalisasi pelayanan perijinan investasi satu pintu
  - 2) Peningkatan promosi investasi berbasis potensi sumberdaya daerah
  - 3) Peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi.



- k. Pengembangan Pariwisata yang diarahkan melalui peningkatan obyek wisata, pelestarian peninggalan budaya, tradisi, serta kesenian, dalam rangka membentuk karakteristik budaya masyarakat serta daya tarik kunjungan wisata
  - 1) Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata berbasis keragaman budaya, pesona alam dan keunikan lokal.
  - 2) Peningkatan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi atas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan
  - 3) Pembangunan jejaring promosi pariwisata ditingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
  - 4) Peningkatan kualitas produk pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, pengembangan kelembagaan, dan sarana-prasarana pendukung.
  - 5) Pengembangan kawasan wisata bahari terpadu untuk menunjang pengembangan *waterfront city* dan wisata kota kuno (*heritage tourism*)

### 3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai.

- a. Peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
  - 1) Pengembangan jaringan jalan dan jembatan.
  - 2) Pengembangan interkoneksi antar kawasan.
  - 3) Peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas jalan.
  - 4) Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana dan sarana terminal.
  - 5) Peningkatan pembangunan pelabuhan dan pemantapan manajemen kepelabuhanan.
  - 6) Pembangunan sarana transportasi antar dan intermoda.
- b. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam dan antar kawasan serta antar kepentingan melalui konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air. Pengembangan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
  - 1) Peningkatan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
  - 2) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku
  - 3) Peningkatan pengembangan fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi.
  - 4) Peningkatan pengendalian erosi melalui tahap pra bencana, darurat dan pasca bencana serta peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
  - 5) Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.
  - 6) Pembangunan embung, bendung dan PPST untuk mendukung ketersediaan air baku.
- c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah dan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuhkembangkan potensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, kredit mikro perumahan serta pemerataan pembangunan prasarana sarana dasar permukiman.

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni pada perkotaan dan perdesaan.
  - 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman.
  - 3) Stimulan pembangunan perumahan dan kredit mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  - 4) Peningkatan pengembang dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  - 5) Penataan bangunan gedung/rumah negara.
  - 6) Pengembangan dan deseminasi teknologi tepat guna bidang permukiman bagi pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat.
  - 7) Pengembangan kelembagaan badan penyelenggara dan pelaksana Kasiba dan Lisiba
- d. Perwujudan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah.
- 1) Pengembangan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan.
  - 2) Pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan kelautan, pelabuhan, telekomunikasi dan informasi.
  - 3) Pembangunan prasarana kawasan strategis.
  - 4) Pembangunan kawasan industri.
  - 5) Pengembangan kelembagaan pengembangan kawasan strategis dan kawasan industri.
  - 6) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
  - 7) Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan pembangunan sektoral
  - 8) Penyusunan peraturan zonasi tata ruang wilayah
  - 9) Pengembangan kelembagaan tata ruang daerah.
  - 10) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah
  - 11) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- e. Perwujudan kawasan agropolitan sebagai pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan prasarana sarana, pengembangan kelembagaan dan jejaring pemasarannya.
- 1) Identifikasi kawasan agropolitan
  - 2) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana kawasan agropolitan
  - 3) Peningkatan usaha agrobisnis
  - 4) Pengembangan kelembagaan pengembangan kawasan agropolitan
  - 5) Pengembangan jejaring pemasaran agropolitan
4. Terwujudnya Kehidupan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip *good governance*.
- 1) Profesionalisme aparatur dan peningkatan pelayanan publik.
  - 2) Pemantapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik.
  - 3) Penguatan fasilitasi kelembagaan pemerintah desa/kelurahan dalam pelayanan publik.
  - 4) Peningkatan kelembagaan partisipasi masyarakat ditingkat desa/kelurahan.
- b. Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif.

- 1) Pengembangan manajemen pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang mengarah pada efisiensi dan efektif.
  - 2) Optimalisasi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah
  - 3) Peningkatan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan diluar PAD.
- c. Perwujudan masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
- 1) Penguatan peran partai politik dan lembaga perwakilan rakyat.
  - 2) Peningkatan pendidikan politik masyarakat dalam mewujudkan partisipasi politik yang tinggi.
- d. Peningkatan Pembangunan komunikasi dan informasi melalui perwujudan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan.
- 1) Peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi
  - 2) Pelayanan informasi multi media.
  - 3) Perluasan jaringan prasarana dan prasarana informasi seluruh kecamatan.
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mewujudkan suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
- 1) Peningkatan sistem dan kelembagaan keamanan dan ketertiban lingkungan
  - 2) Pengembangan kerjasama antar lembaga penegak hukum
  - 3) Pemantapan Profesionalisme aparat penegak.
  - 4) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
- f. Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
- 1) Peningkatan Pengelolaan dokumen/arsip daerah.
  - 2) Optimalisasi kualitas operator penyelenggaraan pelayanan kearsipan
- g. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan *website*.
- 1) Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika.
  - 2) Peningkatan kapabilitas lembaga penyiaran dalam menyusun program siaran sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program.
  - 3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam keterbukaan informasi publik.
5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
- a. Pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan.
- 1) Pemanfaatan SDA terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya
  - 2) Pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA terbarukan.
  - 3) Rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA terbarukan.
  - 4) Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang terbarukan
  - 5) Penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang terbarukan.

- b. Pendayagunaan sumberdaya alam tak terbarukan dengan memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat lokal
  - 1) Pemanfaatan SDA tak terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya
  - 2) Pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA tak terbarukan.
  - 3) Rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA tak terbarukan.
  - 4) Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang tak terbarukan
  - 5) Penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang tak terbarukan.
  - 6) Pemberdayaan masyarakat lokal sekitar pengusahaan kawasan sumber daya alam tak terbarukan.
  - 7) Pemanfaatan air tanah dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.
  
- c. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui berbagai upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air
  - 1) Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.
  - 2) Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan bencana di kawasan rawan bencana.
  - 3) Pelibatan peran aktif dan keswadayaan masyarakat dalam penanganan bencana alam secara mandiri.
  - 4) Peningkatan upaya Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam setiap aktivitas pembangunan.
  - 5) Penanganan lahan kritis melalui rehabilitasi dan konservasi lahan
  - 6) Peningkatan pengembangan hutan rakyat dan rehabilitasi hutan mangrove serta penyusunan regulasi tatabangunan di kawasan sempadan pantai dan sungai.
  
- d. Pengembangan energi melalui diversifikasi energi utama maupun energi terbarukan untuk pemerataan dan pemenuhan distribusi energi
  - 1) Peningkatan rasio elektrifikasi.
  - 2) Pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri.
  - 3) Pengembangan upaya penyediaan dan pemerataan energi alternatif yang ramah lingkungan.
  - 4) Peningkatan teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan.
  
- e. Peningkatan nilai tambah dan manfaat usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.
  - 1) Peningkatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral serta menerapkan *good mining practice* di lokasi tambang yang sudah ada dengan selalu memperhatikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
  - 2) Pengembangan upaya peningkatan diversifikasi usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
  - 3) Penegakan regulasi tentang pengelolaan usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
  - 4) Penerapan teknologi usaha pertambangan yang ramah lingkungan
  
- f. Pengelolaan hutan secara lestari melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.

- 1) Peningkatan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat sekitar hutan
  - 2) Pengembangan Jaringan Kerja Kemitraan antara pengelola hutan negara dan masyarakat lokal sekitar
  - 3) Peningkatan upaya pengendalian kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia
  - 4) Peningkatan partisipasi dan upaya penyadaran masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian hutan
  - 5) Peningkatan manajemen pengelolaan hutan yang semakin profesional
- g. Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan.
- 1) Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan fokus pada peningkatan ekstensifikasi (ekspansi *fishing ground*) dan pengembangan budidaya perikanan sesuai dengan daya dukung lingkungan.
  - 2) Peningkatan upaya penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan teknologi kelautan perikanan yang ramah lingkungan hidup.
  - 3) Peningkatan upaya diversifikasi usaha kelautan dan perikanan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.
  - 4) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan pesisir dan laut, serta pengembangan kluster pengolahan perikanan.
  - 5) Peningkatan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan dalam pengelolaan pesisir dan laut.
  - 6) Peningkatan perbaikan kondisi wilayah pesisir dan laut dengan fokus pada pengembangan kawasan konservasi sumberdaya pesisir dan zona perlindungan laut.
  - 7) Penetapan kawasan minapolitan sebagai upaya pengembangan potensi kelautan dan perikanan
  - 8) Penetapan kawasan budidaya rumput laut dalam rangka pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan.
  - 9) Penetapan kawasan sentra pengolahan ikan dalam rangka pengembangan kluster pengolahan ikan
  - 10) Peningkatan daya saing produk perikanan dan kelautan melalui diversifikasi produk dengan teknologi modern.
  - 11) Peningkatan promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan melalui penguatan jaringan pemasaran produk yang ramah lingkungan.
  - 12) Penegakan regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- h. Optimalisasi tata guna lahan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan, penegakkan hukum pertanahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib administrasi pertanahan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan
- 1) Peningkatan teknologi sistem pelayanan administrasi pertanahan dan kerjasama multi pihak dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan administrasi pertanahan
  - 2) Peningkatan media sosialisasi produk hukum dan administrasi pertanahan baik melalui media cetak maupun elektronik
  - 3) Pengembangan kapasitas masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan.

### **C.3. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah III (Tahun 2015-2019)**

#### **1. Terwujudnya SDM yang Berkualitas**

- a. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya.
  - 1) Pengembangan sarana dan prasarana pibadatan
  - 2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan
  - 3) Penguatan sikap toleransi antar umat beragama
- b. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan pendidikan dan peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan.
  - 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang dititikberatkan pada jenjang pendidikan dasar, menengah serta non formal.
  - 2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, sarana dan prasarana yang dititik beratkan pada pendidikan dasar, menengah dan non formal.
  - 3) Pengembangan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi.
  - 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal untuk mencapai rasio 70:30.
  - 5) Pengembangan pendidikan tinggi.
  - 6) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
- c. Peningkatan kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.
  - 1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang lebih bermutu.
  - 2) Pengembangan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak.
  - 3) Pengembangan promosi dan kelembagaan dalam peningkatan kesehatan masyarakat.
  - 4) Penguatan sistem jaminan kesehatan daerah.
  - 5) Peningkatan mutu tenaga kesehatan.
  - 6) Penguatan program peningkatan gizi masyarakat.
  - 7) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- d. Peningkatan keluarga kecil, bahagia, sejahtera melalui pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat..
  - 1) Peningkatan pelayanan KB aktif dan mandiri.
  - 2) Penguatan kelompok prio utomo dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dalam berKB.
  - 3) Penguatan kelompok dalam perwujudan ketahanan keluarga.
- e. Peningkatan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja; pengembangan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan meningkatkan kualitas keharmonisan hubungan industrial.
  - 1) Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan
  - 2) Pengembangan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
  - 3) Pengembangan produktifitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja
  - 4) Peningkatan perlindungan pekerja
  - 5) Pengembangan kualitas hubungan industrial.
  - 6) Penurunan angka pengangguran
- f. Peningkatan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

- 1) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS melalui pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
  - 2) optimalisasi sistem dan kelembagaan perlindungan sosial dan penanganan korban bencana
  - 3) Optimaslisasi kesetiakawanan dan jiwa gotong royong dalam peningkatan kesejahteraan sosial
- g. Peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak/karya rekam dan pengembangan sarana/prasarana perpustakaan.
- 1) Pengembangan minat baca masyarakat
  - 2) Peningkatan jumlah perpustakaan sekolah dan masyarakat.
  - 3) Pengembangan sarana/prasarana perpustakaan modern.
- h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 1) Pemantapan sistem dan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - 2) Penguatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan dan jaminan tumbuh kembang anak.
  - 3) Peningkatan jaringan kemitraan terhadap perlindungan anak dan jaminan tumbuh
- i. Pengembangan dan pembangunan jati diri bangsa untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar pada aktualisasi nilai-nilai budaya setempat.
- 1) Pemantapan nilai jati diri bangsa, kelembagaan dan pemantapan kader pembangunan dalam masyarakat.
  - 2) Pembudayaan nilai jati diri bangsa dalam sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
- j. Penurunan jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses kualitas hidup berbasis keluarga.
- 1) Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin
  - 2) Stimulasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin
  - 3) Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif
  - 4) Pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro untuk mendorong pendirian lembaga ekonomi masyarakat miskin
- k. Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
- 1) Penguatan kompetensi dan kemandirian generasi muda
  - 2) Penguatan jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi generasi muda
  - 3) Pengembangan prestasi olahraga pada semua cabang olah raga yang ada
  - 4) Pengembangan system pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan
  - 5) Pengembangan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga
  - 6) peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
- l. Pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.
- 1) Penguatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat

- 2) Penguatan Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional
  - 3) Perwujudan publikasi, sosialisasi dan pagelaran apresiasi seni budaya
  - 4) pengembangan nilai-nilai budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat
  - 5) pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai asset pendidikan dan ilmu pengetahuan
- m. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan meningkatkan jumlah transmigran
- 1) Penguatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dengan titik berat transmigrasi non swakrsa
  - 2) Semakin tingginya jumlah Transmigran khususnya swakarsa mandiri.
2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing.
- a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur perekonomian daerah berbasis sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier
    - 1) Penguatan struktur perekonomian yang berkualitas berbasis agrobisnis.
    - 2) Penguatan usaha sektor primer, sekunder dan tersier
  - b. Pengembangan agrobisnis, melalui pengembangan dan penguatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar
    - 1) Pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal dan regional dan ketahanan pangan.
    - 2) Pemantapan sarana prasarana pertanian dan perdesaan.
    - 3) Pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.
    - 4) Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan menuju pengembangan kawasan minapolitan
    - 5) Pengembangan agrobisnis berbasis keunggulan komparative dan competitive menuju pengembangan kawasan agropolitan
    - 6) Pengembangan Pasar Induk Agrobisnis.
  - c. Pengembangan sistem informasi pertanian dan deseminasi inovasi teknologi guna mendukung pengembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
    - 1) Penguasaan system informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai ke wilayah kecamatan.
    - 2) Meningkatnya Penyebaran pemanfaatan teknologi tepat guna guna mendapatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
    - 3) Peningkatan usaha *off farm* untuk meningkatkan pendapatan petani.
  - d. Peningkatan kemampuan kapasitas SDM pertanian dalam peningkatan produktivitas pertanian.
    - 1) Penguatan kelembagaan petani melalui fasilitasi, bimbingan dan pembinaan petani
    - 2) Peningkatan kualitas SDM dalam teknik budidaya, manajemen usaha tani, dan pengelolaan hasil
  - e. Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat serta diversifikasi produk pangan.



- 1) Optimalisasi kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan
  - 2) Peningkatan keragaman (diversifikasi) baik produksi maupun konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal.
  - 3) Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat
- f. Penguatan Struktur Industri yang diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Rembang
- 1) Penguatan klaster industri berbasis kekayaan alam daerah .
  - 2) Pengembangan produk-produk inovatif industry kreatif berbasis sumberdaya lokal.
  - 3) Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha industri
- g. Optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
- 1) Penguatan kualitas sarana prasarana pasar, pengawasan peralatan perdagangan dan tersedianya sistem informasi pasar.
  - 2) Penguatan jaringan distribusi dan akses perdagangan ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional.
- h. Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
- 1) Penguatan iklim usaha kondusif bagi koperasi dan UMKM dalam jaringan pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
  - 2) Penguatan kelembagaan dan SDM usaha skala mikro untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
  - 3) Penguatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru melalui UMKM yang menampung lapangan kerja baru
- i. Optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM
- 1) Penguatan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM.
  - 2) Penguatan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM.
  - 3) Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM.
- j. Peningkatan realisasi penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan dunia usaha melalui penguatan dan penyederhanaan pelayanan penanaman modal, mengembangkan kebijakan pro penanaman modal, peningkatan infrastruktur ekonomi yang baik, dan menekan *ekonomi biaya tinggi* .
- 1) Pengembangan Pelayanan investasi berbasis Teknologi informasi.
  - 2) Penguatan lembaga promosi investasi daerah
  - 3) Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi
  - 4) Penataan dan pengembangan kawasan investasi

- k. Pengembangan Pariwisata yang diarahkan melalui peningkatan obyek wisata, pelestarian peninggalan budaya, tradisi, serta kesenian, dalam rangka membentuk karakteristik budaya masyarakat serta daya tarik kunjungan wisata
- 1) Peningkatan kualitas sarana aksesibilitas dan penunjang pariwisata guna meningkatkan lama tinggal wisatawan.
  - 2) Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata.
  - 3) Penguatan jejaring dan pengembangan promosi pariwisata di tingkat kabupaten dan provinsi secara efektif dan efisien.
  - 4) Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana-prasarana pendukung sektor pariwisata.
  - 5) Peningkatan promosi wisata bahari terpadu dan wisata kota kuno (*heritage tourism*) di tingkat kabupaten, provinsi.

3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai.

- a. Peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
- 1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan.
  - 2) Peningkatan dan pemeliharaan interkoneksi antar kawasan.
  - 3) Peningkatan pelayanan angkutan umum dan sarana dan prasarana terminal.
  - 4) Optimalisasi pembangunan pelabuhan dan manajemen kepelabuhanan.
  - 5) Optimalisasi pembangunan sarana transportasi antar dan intermoda.
- b. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam dan antar kawasan serta antar kepentingan melalui konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air. Pengembangan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
- 1) Peningkatan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan dan memelihara kualitas air.
  - 2) Optimalisasi sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku
  - 3) Optimalisasi pengendalian erosi melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta pengelolaan DAS.
  - 4) Optimalisasi penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.
  - 5) Penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.
  - 6) Peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi.
  - 7) Pembangunan embung, bendung dan PPST untuk mendukung ketersediaan air baku.
- c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah dan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuhkembangkan potensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, kredit mikro perumahan serta pemerataan pembangunan prasarana sarana dasar permukiman.
- 1) Peningkatan pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

- 2) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar permukiman.
  - 3) Peningkatan stimulan pembangunan perumahan dan kredit mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
  - 4) Peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan perumahan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara swadaya.
  - 5) Pengelolaan bangunan gedung/rumah negara.
  - 6) Pengembangan teknologi dan implemementasi tepat guna bidang permukiman.
  - 7) Penguatan kelembagaan badan penyelenggara dan pelaksana Kasiba dan Lisiba
- d. Perwujudan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah.
- 1) Peningkatan pembangunan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan.
  - 2) Peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan kelautan, pelabuhan, telekomunikasi dan informasi.
  - 3) Peningkatan pembangunan prasarana kawasan strategis.
  - 4) Pengembangan kelembagaan pengembangan kawasan strategis dan kawasan industri.
  - 5) Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan pembangunan sektoral
  - 6) Penetapan peraturan zonasi tata ruang wilayah
  - 7) Penguatan kelembagaan tata ruang daerah.
  - 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah
  - 9) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- e. Perwujudan kawasan agropolitan sebagai pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan prasarana sarana, pengembangan kelembagaan dan jejaring pemasarannya.
- 1) Penetapan kawasan agropolitan
  - 2) Pengembangan prasarana dan sarana kawasan agropolitan
  - 3) Peningkatan usaha agrobisnis
  - 4) Penguatan kelembagaan pengembangan kawasan agropolitan
  - 5) Pengembangan jejaring pemasaran agropolitan
4. Terwujudnya Kehidupan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip *good governance*.
- 1) Peningkatan pelayanan publik melalui *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  - 2) Terwujudnya pelayanan publik berdasarkan SPM.
  - 3) Pemantapan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
  - 4) Peningkatan kerja sama antar daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan promosi daerah.
- b. Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif.
- 1) Optimalisasi manajemen pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien
  - 2) Optimalisasi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah
  - 3) Pengembangan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan diluar

- c. Perwujudan masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
  - 1) Optimalisasi peran partai politik dan fungsi lembaga perwakilan rakyat.
  - 2) Meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
- d. Peningkatan Pembangunan komunikasi dan informasi melalui perwujudan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan.
  - 1) Pengembangan tingkat kesadaran masyarakat terhadap terpenuhinya informasi pemerintahan secara luas dan transparan
  - 2) Peningkatan kualitas Pelayanan informasi multi media.
  - 3) Peningkatan akses jaringan dan layanan informasi seluruh wilayah.
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mewujudkan suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
  - 1) Optimalisasi sistem dan kelembagaan keamanan dan ketertiban lingkungan
  - 2) Pengembangan sistem deteksi dini dalam keamanan dan ketertiban lingkungan.
  - 3) Pengembangan sistem keamanan berbasis masyarakat (*community policing*).
- f. Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
  - 1) Peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip.
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kearsipan yang berkualitas.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan *website*.
  - 1) Terwujudnya lembaga penyiaran yang mempunyai ijin penyelenggaraan penyiaran.
  - 2) Perwujudan kelembagaan keterbukaan informasi publik.

#### 5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

- a. Pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan.
  - 1) Peningkatan pemanfaatan SDA terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya
  - 2) Peningkatan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA terbarukan.
  - 3) Peningkatan upaya rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA terbarukan
  - 4) Peningkatan upaya Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang terbarukan
  - 5) Diseminasi penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang terbarukan.
- b. Pendayagunaan sumberdaya alam tak terbarukan dengan memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat lokal

- 1) Peningkatan pemanfaatan SDA tak terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya
  - 2) Peningkatan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA tak terbarukan.
  - 3) Peningkatan upaya rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA tak terbarukan
  - 4) Peningkatan upaya Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang tak terbarukan
  - 5) Diseminasi penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang tak terbarukan.
  - 6) Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal sekitar perusahaan kawasan SDA yang tak terbarukan
  - 7) Pelestarian sumber daya air tanah dengan mempertahankan fungsi daerah tangkapan air.
- c. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui berbagai upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air
- 1) Pengembangan peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.
  - 2) Pengembangan upaya pencegahan dan penanganan bencana di kawasan rawan bencana.
  - 3) Peningkatan partisipatif, peran aktif dan keswadayaan masyarakat dalam penanganan bencana alam secara mandiri.
  - 4) Pengembangan upaya Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam setiap aktivitas pembangunan.
  - 5) Peningkatan penanganan lahan kritis melalui rehabilitasi dan konservasi lahan
  - 6) Optimalisasi pembangunan hutan rakyat dan rehabilitasi hutan mangrove serta Penertiban dan penegakan regulasi di kawasan sempadan pantai dan sungai.
  - 7) Pengembangan kearifan lokal dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan bencana dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.
- d. Pengembangan energi melalui diversifikasi energi utama maupun energi terbarukan untuk pemerataan dan pemenuhan distribusi energi
- 1) Pemantapan rasio elektrifikasi
  - 2) Peningkatan pengembangan dan pemerataan distribusi energi alternatif yang ramah lingkungan.
  - 3) Peningkatan upaya pemanfaatan bio energi yang ramah lingkungan.
  - 4) Pengembangan upaya pemanfaatan teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan.
- e. Peningkatan nilai tambah dan manfaat usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.
- 1) Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan serta terjadinya alih teknologi yang ramah lingkungan.
  - 2) Pengendalian kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi sumber daya mineral.
  - 3) Peningkatan penegakan regulasi tentang pengelolaan usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
  - 4) Pengembangan upaya penerapan teknologi usaha pertambangan yang ramah lingkungan
  - 5) Peningkatan manfaat sosial usaha pertambangan bagi masyarakat lokal.

- f. Pengelolaan hutan secara lestari melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.
  - 1) Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan lestari.
  - 2) Optimalisasi jaringan kerja kemitraan pengelolaan hutan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan
  - 3) Optimalisasi upaya pengendalian kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia
  - 4) Optimalisasi peningkatan manajemen pengelolaan hutan secara lestari sesuai fungsinya
  
- g. Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan.
  - 1) Pengembangan upaya peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
  - 2) Pengembangan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya rumput laut.
  - 3) Pengembangan upaya diversifikasi usaha kelautan dan perikanan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan
  - 4) Peningkatan peran kelembagaan di bidang perikanan dan kelautan dalam pengelolaan pesisir dan laut sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat pesisir
  - 5) Pengembangan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan dalam pengelolaan pesisir dan laut.
  - 6) Perbaikan kondisi wilayah pesisir dan laut dengan fokus pada pengembangan peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan kawasan pesisir dan zona perlindungan laut.
  - 7) Pengembangan daya saing produk perikanan dan kelautan melalui diversifikasi produk dengan teknologi modern.
  - 8) Pengembangan kawasan sentra pengolahan ikan dalam rangka pengembangan kluster pengolahan ikan.
  - 9) Pengembangan kawasan minapolitan dalam rangka pengembangan potensi kelautan dan perikanan secara optimal.
  - 10) Pengembangan promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan melalui penguatan jaringan pemasaran produk yang ramah lingkungan.
  
- h. Optimalisasi tata guna lahan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan, penegakkan hukum pertanahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib administrasi pertanahan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan
  - 1) Pengembangan sistem pelayanan administrasi pertanahan dan kerjasama multi pihak dalam penegakkan hukum, dan administrasi pertanahan.
  - 2) Pengembangan penertiban sistem administrasi pelayanan pertanahan.
  - 3) Pengembangan kapasitas masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan.

#### C.4. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV (Tahun 2020-2024)

##### 1. Terwujudnya SDM yang Berkualitas

- a. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya.
  - 1) Pemantapan kualitas kehidupan beragama
  - 2) Pemantapan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan
  - 3) Pemantapan sikap toleransi antar umat beragama
- b. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan.
  - 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.
  - 2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan
  - 3) Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi.
  - 4) Pemantapan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal untuk mencapai rasio 70:30.
  - 5) Peningkatan kualitas fasilitasi tersedianya pendidikan tinggi.
  - 6) Terwujudnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
- c. Peningkatan kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.
  - 1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan terjangkau.
  - 2) Pemantapan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak.
  - 3) Pemantapan promosi kesehatan dan peran kelembagaan yang lebih mandiri dalam peningkatan kesehatan masyarakat.
  - 4) Pemantapan sistem jaminan kesehatan daerah.
  - 5) Pengembangan jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas.
  - 6) Peningkatan status gizi masyarakat secara menyeluruh.
  - 7) Pemantapan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- d. Peningkatan keluarga kecil, bahagia, sejahtera melalui pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - 1) Peningkatan kemandirian masyarakat dalam ber KB.
  - 2) Peningkatan keluarga sejahtera
- e. Peningkatan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja; pengembangan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan meningkatkan kualitas keharmonisan hubungan industrial.
  - 1) Perwujudan sistem informasi ketenagakerjaan yang handal
  - 2) Terwujudnya kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang tinggi
  - 3) Pengembangan produktifitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja
  - 4) Peningkatan perlindungan pekerja
  - 5) Pengembangan kualitas hubungan industrial.
  - 6) Penurunan angka pengangguran
- f. Peningkatan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

- 1) Pemantapan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
  - 2) Terwujudnya rasa kesetiakawanan dan jiwa gotong royong dalam peningkatan kesejahteraan sosial
  - 3) optimalisasi sistem dan kelembagaan perlindungan sosial dan penanganan korban bencana
- g. Peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak/karya rekam dan pengembangan sarana/prasarana perpustakaan.
- 1) Pengembangan budaya baca masyarakat.
  - 2) Pelestarian koleksi perpustakaan, terutama koleksi penting dan bernilai sejarah.
  - 3) Optimalisasi sarana prasarana perpustakaan Modern
- h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 1) Optimalisasi kualitas hidup, pemberdayaan, kesetaraan dan keterwakilan perempuan.
  - 2) Optimalisasi terhadap sistem dan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - 3) Pemantapan jaringan kerja kemitraan dalam perlindungan anak dan jaminan tumbuh kembang anak
- i. Pengembangan dan pembangunan jati diri bangsa untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar pada aktualisasi nilai-nilai budaya setempat.
- 1) Aktualisasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang dilandasi nilai kebangsaan sebagai bentuk perwujudan budaya masyarakat lokal yang mampu mendukung pelaksanaan pembangunan yang kondusif
- j. Penurunan jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses kualitas hidup berbasis keluarga.
- 1) Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin
  - 2) Stimulasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin
  - 3) Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif
  - 4) Pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro untuk mendorong pendirian lembaga ekonomi masyarakat miskin
- k. Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
- 1) Penguatan kompetensi dan kemandirian generasi muda
  - 2) Penguatan jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi generasi muda
  - 3) Pengembangan prestasi olahraga pada semua cabang olah raga yang ada
  - 4) Pengembangan system pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan
  - 5) Pengembangan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga
  - 6) peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
- l. Pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.
- 1) Penguatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat



- 2) Penguatan Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional
  - 3) Perwujudan publikasi, sosialisasi dan pagelaran apresiasi seni budaya
  - 4) pengembangan nilai-nilai budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat
  - 5) pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai asset pendidikan dan ilmu pengetahuan
- m. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan meningkatkan jumlah transmigran
- 1) Penguatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dengan titik berat transmigrasi non swakrsa
  - 2) Semakin tingginya jumlah Transmigran khususnya swakarsa mandiri.
2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing.
- a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur perekonomian daerah berbasis sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier
    - 1) Pemantapan Perekonomian yang berdaya saing berbasis agrobisnis.
    - 2) Pemantapan usaha sektor primer, sekunder dan tersier
  - b. Pengembangan agrobisnis, melalui pengembangan dan penguatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar
    - 1) Keberlanjutan pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal, regional dan ketahanan pangan
    - 2) Penguatan dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan perdesaan.
    - 3) Pemantapan keberlanjutan pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.
    - 4) Pemantapan keberlanjutan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan menuju terbentuknya kawasan minapolitan
    - 5) Keberlanjutan Pengembangan agrobisnis berbasis keunggulan komparative dan competitive menuju terbentuknya kawasan agropolitan
    - 6) Penguatan pasar Induk Agrobisnis.
  - c. Pengembangan sistem informasi pertanian dan deseminasi inovasi teknologi guna mendukung pengembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
    - 1) Keberlanjutan penguasaan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai ke kelompok petani atau petani.
    - 2) Keberlanjutan pemanfaatan teknologi tepat guna mendapatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
    - 3) Peningkatan usaha off farm guna mendapatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
  - d. Peningkatan kemampuan kapasitas SDM pertanian dalam peningkatan produktivitas pertanian.
    - 1) Perwujudan Kemandirian petani dan lembaga pendukungnya
    - 2) Perwujudan Keberlanjutan pemantapan sarana dan prasarana serta kualitas SDM
    - 3) meningkatkan usaha agribisnis dan agroindustri melalui pengembangan usaha kawasan.

- e. Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat serta diversifikasi produk pangan.
  - 1) Pemantapan kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan
  - 2) Terwujudnya keragaman (diversifikasi) baik produksi maupun konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal.
  - 3) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan
  
- f. Penguatan Struktur Industri yang diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Rembang
  - 1) Pemantapan klaster industri berbasis kekayaan alam daerah .
  - 2) Pengembangan produk-produk inovatif industry kreatif berbasis sumberdaya lokal
  - 3) Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha industri
  
- g. Optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
  - 1) Pemantapan kapasitas kualitas sarana prasarana pasar modern dan tradisional, pengawasan peralatan perdagangan dan tersedianya sistem informasi pasar.
  - 2) Pemantapan jaringan distribusi perdagangan dan akses pasar ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional
  
- h. Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
  - 1) Pemantapan iklim usaha kondusif bagi koperasi dan UMKM dalam jaringan pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
  - 2) Pemantapan kelembagaan dan SDM usaha skala mikro untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
  - 3) Pemantapan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru melalui UMKM yang menampung lapangan kerja baru
  
- i. Optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM
  - 1) Pemantapan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM.
  - 2) Pemantapan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM.
  - 3) Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM
  
- j. Peningkatan realisasi penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan dunia usaha melalui penguatan dan penyederhanaan pelayanan penanaman modal, mengembangkan kebijakan pro penanaman modal, peningkatan infrastruktur ekonomi yang baik, dan menekan *ekonomi biaya tinggi* .
  - 1) Pengembangan Pelayanan investasi berbasis Teknologi Informasi.

- 2) Penguatan lembaga promosi investasi daerah
  - 3) Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi
  - 4) Pengembangan kawasan investasi
- k. Pengembangan Pariwisata yang diarahkan melalui peningkatan obyek wisata, pelestarian peninggalan budaya, tradisi, serta kesenian, dalam rangka membentuk karakteristik budaya masyarakat serta daya tarik kunjungan wisata
- 1) Pengembangan paket kunjungan wisata daerah dengan memperhatikan konteks regional Jawa Tengah guna meningkatkan lama tinggal wisatawan.
  - 2) Penguatan peran kelembagaan masyarakat lokal dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata daerah.
  - 3) Penguatan jejaring dan peningkatan promosi pariwisata di tingkat nasional dan internasional secara efektif dan efisien.
  - 4) Penguatan diversifikasi produk pariwisata yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
  - 5) Peningkatan promosi wisata bahari terpadu dan wisata kota kuno (*heritage tourism*) di tingkat nasional dan internasional.
3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai.
- a. Peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
- 1) Pemantapan pembangunan jaringan jalan dan jembatan.
  - 2) Pemantapan interkoneksi antar kawasan.
  - 3) Pemantapan kualitas, kuantitas dan kapasitas jalan.
  - 4) Pemantapan pelayanan angkutan umum dan sarana terminal.
  - 5) Pemantapan manajemen pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelabuhan.
  - 6) Pemantapan pelayanan transportasi antar dan intermoda.
  - 7) Pemantapan sistem transportasi lokal yang berorientasi pada keamanan, kenyamanan dan kebutuhan transportasi massal yang handal.
  - 8) Pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi.
- b. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam dan antar kawasan serta antar kepentingan melalui konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air. Pengembangan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
- 1) Optimalisasi konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
  - 2) Pemantapan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku.
  - 3) Pemantapan pengendalian erosi melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen daerah aliran sungai (DAS)
  - 4) Pemantapan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.
  - 5) Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - 6) Pemeliharaan embung, bendung dan PPST untuk mendukung ketersediaan air baku.

- c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah dan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuhkembangkan potensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, kredit mikro perumahan serta pemerataan pembangunan prasarana sarana dasar permukiman.
    - 1) Peningkatan pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan pada seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan.
    - 2) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar permukiman.
    - 3) Penguatan kredit mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
    - 4) Pengembangan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rusunawa dan rusunami.
    - 5) Konservasi bangunan gedung/rumah negara.
    - 6) Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman.
    - 7) Pemantapan kelembagaan badan penyelenggara dan pelaksana Kasiba dan Lisiba
  
  - d. Perwujudan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah.
    - 1) Pemantapan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan.
    - 2) Pemantapan infrastruktur pertanian, perikanan kelautan, pelabuhan, telekomunikasi dan informasi.
    - 3) Penguatan kelembagaan pengembangan kawasan strategis dan kawasan industri.
    - 4) Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan pembangunan sektoral
    - 5) Penerapan peraturan zonasi tata ruang wilayah
    - 6) Penguatan kelembagaan tata ruang daerah.
    - 7) Pemantapan peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah
    - 8) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
  
  - e. Perwujudan kawasan agropolitan sebagai pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan prasarana sarana, pengembangan kelembagaan dan jejaring pemasarannya.
    - 1) Pemantapan prasarana dan sarana kawasan agropolitan
    - 2) Pengembangan usaha dan produk olahan Peningkatan usaha agrobisnis
    - 3) Pemantapan kelembagaan pengembangan kawasan agropolitan
    - 4) Pemantapan jejaring pemasaran agropolitan
4. Terwujudnya Kehidupan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip *good governance*.
    - 1) Penguatan kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana *e-government* dalam pelayanan public.
    - 2) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
    - 3) Pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan.
    - 4) Pemantapan kerja sama antar daerah dalam peningkatan daya saing daerah.

- b. Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif.
    - 1) Pemantapan manajemen pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif dan efisien .
    - 2) Penguatan penerimaan sumber-sumber keuangan daerah
    - 3) Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan diluar PAD.
  - c. Perwujudan masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
    - 1) Terwujudnya budaya masyarakat yang demokratis.
    - 2) Terwujudnya kelembagaan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
  - d. Peningkatan Pembangunan komunikasi dan informasi melalui perwujudan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan.
    - 1) Terwujudnya masyarakat sadar informasi pemerintahan dan pembangunan secara luas dan transparan.
    - 2) Terpenuhinya dan terjaminnya hak masyarakat atas informasi publik
    - 3) Perluasan jaringan dan layanan informasi di tingkat masyarakat.
  - e. Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mewujudkan suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
    - 1) Pemantapan sistem dan kelembagaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
    - 2) Optimalisasi sistem keamanan berbasis masyarakat.
  - f. Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
    - 1) Peningkatan pelayanan informasi kearsipan daerah yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
    - 2) Pelestarian kesadaran (pembudayaan) pentingnya pemeliharaan dan pelestarian arsip.
  - g. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan *website*.
    - 1) Terwujudnya kerjasama informasi dengan Mass Media yang memenuhi kebutuhan akan informasi.
    - 2) Meningkatnya kualitas lembaga penyiaran.
    - 3) Implementasi keterbukaan informasi publik.
5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
- a. Pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan.
    - 1) Optimalisasi pengelolaan SDA yang terbarukan secara lestari dan berkelanjutan.
    - 2) Optimalisasi keberdayaan masyarakat dalam mendukung kelestarian SDA yang terbarukan.
    - 3) Terwujudnya pengelolaan SDA terbarukan yang berwawasan lingkungan.

- b. Pendayagunaan sumberdaya alam tak terbarukan dengan memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat lokal
  - 1) Optimalisasi pengelolaan SDA yang tak terbarukan secara lestari, efisien dan berkelanjutan.
  - 2) Optimalisasi keberdayaan masyarakat dalam mendukung kelestarian SDA yang tak terbarukan.
  - 3) Terwujudnya pengelolaan SDA tak terbarukan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat lokal
- c. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui berbagai upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air
  - 1) Optimalisasi pengelolaan bencana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
  - 2) Optimalisasi keberdayaan masyarakat dalam mendukung pencegahan dan penanganan bencana secara mandiri.
  - 3) Optimalisasi pengintegrasian pengelolaan mitigasi bencana
  - 4) Pemantapan pembangunan hutan rakyat dan rehabilitasi hutan mangrove serta Penertiban dan penegakan regulasi di kawasan sempadan pantai dan sungai.
- d. Pengembangan energi melalui diversifikasi energi utama maupun energi terbarukan untuk pemerataan dan pemenuhan distribusi energi
  - 1) Optimalisasi rasio elektrifikasi di wilayah Kabupaten Rembang
  - 2) Optimalisasi pemanfaatan bio energi dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan.
- e. Peningkatan nilai tambah dan manfaat usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.
  - 1) Optimalisasi pengelolaan dan diversifikasi produksi usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.
  - 2) Optimalisasi penegakan dan penertiban usaha pertambangan.
- f. Pengelolaan hutan secara lestari melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.
  - 1) Mantapnya kelembagaan, keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan lestari.
  - 2) Pemantapan jaringan kerja kemitraan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan
  - 3) Pemantapan sistem pengendalian kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia
  - 4) Pemantapan manajemen pengelolaan hutan yang berkelanjutan
- g. Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan.
  - 1) Optimalisasi produksi kelautan dan perikanan melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
  - 2) Optimalisasi pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.
  - 3) Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
  - 4) Optimalisasi peran kelembagaan di bidang kelautan dan perikanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - 5) Peningkatan ekspor produk kelautan dan perikanan melalui penguatan jaringan pemasaran.

- h. Optimalisasi tata guna lahan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan, penegakkan hukum pertanahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib administrasi pertanahan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan
  - 1) Optimalisasi sistem pelayanan prima administrasi pertanahan
  - 2) Optimalisasi tertib administrasi pertanahan dengan melibatkan peran masyarakat dalam mempertahankan daya dukung lingkungan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Rembang selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Meskipun RPJPD Rembang ini disusun dan ditetapkan pada tahun 2010, namun kurun waktu (time frame) nya ditetapkan tahun 2005-2025, hal ini dilakukan untuk memenuhi konsistensi bahwa RPJP-D Kabupaten Rembang merupakan sub sistem RPJP-D Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 dan juga merupakan sub sistem RPJP Nasional 2005-2025.

RPJPD ini ditetapkan untuk menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas pada saat mencalonkan diri menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati, dimana visi, misi dan program prioritas tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang yang berdimensi waktu lima tahunan dan RPJP-D ini menjadi acuan juga dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan visi “**REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA**”. perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat, bersih dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat (pro rakyat); dan (4) peran serta aktif segenap stakeholder (masyarakat, dunia usaha, LSM dan elemen masyarakat lainnya) dalam pembangunan Kabupaten Rembang.

**BUPATI REMBANG**

**H. MOCH. SALIM**



## Lampiran

### TAHAP PRIORITAS RPJPD KABUPATEN REMBANG

#### Sasaran 1 : Terwujudnya SDM yang Berkualitas

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
1.	Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana peribadatan.</li> <li>2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.</li> <li>3. Peningkatan sikap toleransi antar umat beragama .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.</li> <li>2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan</li> <li>3. Pengembangan sikap toleransi antar umat beragama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sarana dan prasarana peribadatan</li> <li>2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan</li> <li>3. Penguatan sikap toleransi antar umat beragama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan kualitas kehidupan beragama</li> <li>2. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan</li> <li>3. Pemantapan sikap toleransi antar umat beragama</li> </ol>
2.	Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang dititik beratkan pada jenjang pendidikan dasar.</li> <li>2. Peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana terutama pendidikan dasar.</li> <li>3. Peningkatan tata kelola dan pencitraan publik pendidikan terutama pendidikan dasar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang dititikberatkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>2. Peningkatan mutu relevansi pendidikan, sarana dan prasarana yang dititik beratkan pada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang dititikberatkan pada jenjang pendidikan dasar, menengah serta non formal.</li> <li>2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, sarana dan prasarana yang dititik beratkan pada pendidikan dasar, menengah dan non formal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.</li> <li>2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan</li> <li>3. Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
		4. Peningkatan jumlah/kuantitas SMK untuk mencapai rasio 50:50. 5. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.	3. Peningkatan tata kelola dan pencitraan publik pendidikan terutama pendidikan menengah. 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal untuk mencapai rasio 60:40. 5. Pendirian pendidikan tinggi. 6. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.	3. Pengembangan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi. 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal untuk mencapai rasio 70:30. 5. Pengembangan pendidikan tinggi. 6. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.	4. Pemantapan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal untuk mencapai rasio 70:30. 5. Peningkatan kualitas fasilitasi tersedianya pendidikan tinggi. 6. Terwujudnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
3.	Peningkatan kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.	1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. 2. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. 3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.	1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan pelayanan rujukan. 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. 3. Peningkatan peran promosi dan kelembagaan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.	1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang lebih bermutu. 2. Pengembangan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak. 3. Pengembangan promosi dan kelembagaan dalam peningkatan kesehatan masyarakat.	1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan terjangkau. 2. Pemantapan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak. 3. Pemantapan promosi kesehatan dan peran kelembagaan yang lebih mandiri dalam peningkatan kesehatan masyarakat.

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
		4. Pembangunan sistem jaminan kesehatan daerah. 5. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan. 6. Pengurangan gizi buruk pada keluarga miskin. 7. Peningkatan surveilans, pengendalian faktor resiko, dan penanganan serta penanggulangan KLB dan bencana	4. Pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah. 5. Peningkatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan. 6. Peningkatan gizi pada balita, remaja, ibu hamil dan Wanita Usia Subur (WUS). 7. Penurunan angka kesakitan dan angka kematian penyakit serta mencegah meluasnya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana	4. Penguatan sistem jaminan kesehatan daerah. 5. Peningkatan mutu tenaga kesehatan. 6. Penguatan program peningkatan gizi masyarakat. 7. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular.	4. Pemantapan sistem jaminan kesehatan daerah. 5. Pengembangan jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas. 6. Peningkatan status gizi masyarakat secara menyeluruh. 7. Pemantapan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
4.	Peningkatan keluarga kecil, bahagia, sejahtera melalui pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	1. Peningkatan KIP/K (Komunikasi Inter Personal/Konseling) dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) untuk optimalisasi pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam ber- KB 2. Peningkatan ketahanan keluarga dalam rangka pengurangan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	1. Pengembangan pelayanan bagi peserta KB Baru dan KB Aktif. 2. Peningkatan peran laki-laki dalam partisipasi KB. 3. Peningkatan ketahanan keluarga dalam rangka pengurangan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.	1. Peningkatan pelayanan KB aktif dan mandiri. 2. Penguatan kelompok pria utomo dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dalam berKB. 3. Penguatan kelompok dalam perwujudan ketahanan keluarga.	1. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam ber KB. 2. Peningkatan keluarga sejahtera

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
5.	Peningkatan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja; pengembangan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan meningkatkan kualitas keharmonisan hubungan industrial.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan</li> <li>2. Peningkatan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.</li> <li>3. Peningkatan produktifitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja</li> <li>4. Peningkatan perlindungan pekerja</li> <li>5. Peningkatan kualitas hubungan industrial</li> <li>6. Penurunan angka pengangguran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan sistem informasi ketenagakerjaan</li> <li>2. Pengembangan kualitas. kompetensi daya saing tenaga kerja</li> <li>3. Pengembangan produktifitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja</li> <li>4. Peningkatan perlindungan pekerja</li> <li>5. Pengembangan kualitas hubungan industrial.</li> <li>6. Penurunan angka pengangguran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan</li> <li>2. Pengembangan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja</li> <li>3. Pengembangan produktifitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja</li> <li>4. Peningkatan perlindungan pekerja</li> <li>5. Pengembangan kualitas hubungan industrial.</li> <li>6. Penurunan angka pengangguran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwujudan sistem informasi ketenagakerjaan yang handal</li> <li>2. Terwujudnya kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang tinggi</li> <li>3. Pengembangan produktifitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja</li> <li>4. Peningkatan perlindungan pekerja</li> <li>5. Pengembangan kualitas hubungan industrial.</li> <li>6. Penurunan angka pengangguran</li> </ol>
6.	Peningkatan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan dan penetapan standar pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS.</li> <li>2. Peningkatan sistem dan kelembagaan perlindungan sosial dan penanganan korban bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS</li> <li>2. Penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sosial dan penanganan korban bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS melalui pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan kesejahteraan sosial bagi PMKS.</li> <li>2. Terwujudnya rasa kesetiakawanan dan jiwa gotong royong dalam peningkatan kesejahteraan sosial</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
		3. Peningkatan rasa kesetiakawanan dan jiwa gotong royong dalam peningkatan kesejahteraan sosial	3. Pengembangan rasa kesetiakawanan dan jiwa gotong royong dalam peningkatan kesejahteraan sosial	2. optimalisasi sistem dan kelembagaan perlindungan sosial dan penanganan korban bencana  3. Optimaslisasi kesetiakawanan dan jiwa gotong royong dalam peningkatan kesejahteraan sosial	3. optimalisasi sistem dan kelembagaan perlindungan sosial dan penanganan korban bencana
7.	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap minat baca masyarakat dan pengembangan sarana/prasarana perpustakaan.	1. Penumbuhan minat baca masyarakat melalui promosi minat baca.  2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan dan koleksi buku perpustakaan.  3. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan keliling.	1. Peningkatan minat baca masyarakat melalui peningkatan pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan sekolah dan masyarakat.  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan sekolah dan masyarakat	1. Pengembangan minat baca masyarakat  2. Peningkatan jumlah perpustakaan sekolah dan masyarakat.  3. Pengembangan sarana/prasarana perpustakaan modern.	1. Pengembangan budaya baca masyarakat.  2. Pelestarian koleksi perpustakaan, terutama koleksi penting dan bernilai sejarah.  3. Optimalisasi sarana prasarana perpustakaan Modern

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
8.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan sistem dan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>2. Peningkatan regulasi dibidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak</li> <li>3. Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan dan jaminan tumbuh kembang anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sistem dan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>2. Fasilitasi terhadap pelaksanaan regulasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>3. Pengembangan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan dan jaminan tumbuh kembang anak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan sistem dan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>2. Penguatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan dan jaminan tumbuh kembang anak.</li> <li>3. Peningkatan jaringan kemitraan terhadap perlindungan anak dan jaminan tumbuh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi kualitas hidup, pemberdayaan, kesetaraan dan keterwakilan perempuan.</li> <li>2. Optimalisasi terhadap sistem dan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>3. Pemantapan jaringan kerja kemitraan dalam perlindungan anak dan jaminan tumbuh kembang anak</li> </ol>
9.	Pengembangan dan pembangunan jati diri bangsa untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar pada aktualisasi nilai-nilai budaya setempat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap semangat persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan nasional, bela negara dan cinta tanah air</li> <li>2. Penumbuhan nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal yang mendukung pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan wawasan kebangsaan</li> <li>2. Peningkatan kualitas masyarakat yang terlatih dan berpartisipasi aktif, kreatif, dan mandiri untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan nilai jati diri bangsa, kelembagaan dan pemantapan kader pembangunan dalam masyarakat.</li> <li>2. Pembudayaan nilai jati diri bangsa dalam sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktualisasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang dilandasi nilai kebangsaan sebagai bentuk perwujudan budaya masyarakat lokal yang mampu mendukung pelaksanaan pembangunan yang kondusif</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
10.	Penurunan jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses kualitas hidup berbasis keluarga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin</li> <li>2. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif</li> <li>4. Pengembangan ketrampilan bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan berusaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin</li> <li>2. Stimulasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin</li> <li>3. Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif</li> <li>4. Fasilitasi akses layanan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat</li> <li>5. Penataan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin</li> <li>2. Stimulasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin</li> <li>3. Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif</li> <li>4. Pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro untuk mendorong pendirian lembaga ekonomi masyarakat miskin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin</li> <li>2. Stimulasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin</li> <li>3. Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif</li> <li>4. Pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro untuk mendorong pendirian lembaga ekonomi masyarakat miskin</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
11.	Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi dan kemandirian generasi muda</li> <li>2. Peningkatan jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi generasi muda</li> <li>3. peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang dengan titik berat pada cabang olahraga unggulan.</li> <li>4. peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kompetensi dan kemandirian generasi muda</li> <li>2. Pengembangan jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi generasi muda</li> <li>3. Pengembangan prestasi olahraga secara berjenjang dengan titik berat pada cabang olahraga unggulan</li> <li>4. Peningkatan system pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan</li> <li>5. peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kompetensi dan kemandirian generasi muda</li> <li>2. Penguatan jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi generasi muda</li> <li>3. Pengembangan prestasi olahraga pada semua cabang olah raga yang ada</li> <li>4. Pengembangan system pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan</li> <li>5. Pengembangan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga</li> <li>6. peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kompetensi dan kemandirian generasi muda</li> <li>2. Penguatan jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi generasi muda</li> <li>3. Pengembangan prestasi olahraga pada semua cabang olah raga yang ada</li> <li>4. Pengembangan system pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan</li> <li>5. Pengembangan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga</li> <li>6. peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga</li> </ol>



No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
12.	Pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Penanaman nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda</li> <li>2. Peningkatan Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional</li> <li>3. Peningkatan publikasi, sosialisasi dan pagelaran apresiasi seni budaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Penanaman nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda</li> <li>2. Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional</li> <li>3. pengembangan publikasi, sosialisasi dan pagelaran apresiasi seni budaya</li> <li>4. penggalian nilai-nilai budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat</li> <li>2. Penguatan Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional</li> <li>3. Perwujudan publikasi, sosialisasi dan pagelaran apresiasi seni budaya</li> <li>4. pengembangan nilai-nilai budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat</li> <li>5. pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai asset pendidikan dan ilmu pengetahuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat</li> <li>2. Penguatan Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional</li> <li>3. Perwujudan publikasi, sosialisasi dan pagelaran apresiasi seni budaya</li> <li>4. pengembangan nilai-nilai budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat</li> <li>5. pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai asset pendidikan dan ilmu pengetahuan</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
13.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan meningkatkan jumlah transmigran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dengan titik berat transmigrasi non swakrsa</li> <li>2. Peningkatan jumlah Transmigran khususnya swakarsa mandiri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kualitas penyelenggaraan transmigrasi secara umum</li> <li>2. Peningkatan jumlah Transmigran baik fasilitasi pemerintah maupun swakarsa mandiri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dengan titik berat transmigrasi non swakrsa</li> <li>2. Semakin tingginya jumlah Transmigran khususnya swakarsa mandiri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dengan titik berat transmigrasi non swakrsa</li> <li>2. Semakin tingginya jumlah Transmigran khususnya swakarsa mandiri.</li> </ol>

## Sasaran 2 : Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
1	Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur perekonomian daerah berbasis sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian.</li> <li>2. Mendorong pengembangan usaha sektor primer, sekunder dan tersier</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan keterkaitan sektor primer dengan sektor sekunder dan sektor tersier berbasis agribisnis.</li> <li>2. Peningkatan usaha sektor primer, sekunder dan tersier</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan struktur perekonomian yang berkualitas berbasis agribisnis.</li> <li>2. Penguatan usaha sektor primer, sekunder dan tersier</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan Perekonomian yang berdaya saing berbasis agribisnis.</li> <li>2. Pemantapan usaha sektor primer, sekunder dan tersier</li> </ol>
2	Pengembangan agribisnis, melalui pengembangan dan penguatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi, produktivitas dengan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, integrasi usaha pertanian</li> <li>2. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian.</li> <li>3. Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.</li> <li>4. Peningkatan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kuantitas dan kualitas serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan pasar dan ketahanan pangan.</li> <li>2. Peningkatan sarana prasarana pertanian &amp; perdesaan.</li> <li>3. Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.</li> <li>4. Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal dan regional dan ketahanan pangan.</li> <li>2. Pemantapan sarana prasarana pertanian dan perdesaan.</li> <li>3. Pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.</li> <li>4. Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan menuju pengembangan kawasan minapolitan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberlanjutan pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal, regional dan ketahanan pangan</li> <li>2. Penguatan dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan perdesaan.</li> <li>3. Pemantapan keberlanjutan pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
		5. Pengembangan agrobisnis berbasis keunggulan komparative menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.  6. Pengembangan kemitraan jejaring pasar produk pertanian.	5. Pengembangan agrobisnis berbasis keunggulan komparative dan competitive  6. Penguatan kemitraan jejaring pasar produk pertanian.	5. Pengembangan agrobisnis berbasis keunggulan komparative dan competitive menuju pengembangan kawasan agropolitan  6. Pengembangan Pasar Induk Agrobisnis.	4. Pemantapan keberlanjutan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan menuju terbentuknya kawasan minapolitan  5. Keberlanjutan Pengembangan agrobisnis berbasis keunggulan komparative dan competitive menuju terbentuknya kawasan agropolitan  6. Penguatan pasar Induk Agrobisnis.
3	Pengembangan sistem informasi pertanian dan deseminasi inovasi teknologi guna mendukung pengembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.	1. Peningkatan system informasi produksi dan informasi pasar.  2. Deseminasi teknologi tepat guna.  3. Pengembangan usaha <i>off farm</i>	1. Pengembangan pasar produk pertanian. 2. Pengembangan system informasi produksi, distribusi dan informasi pasar. 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendapatkan nilai tambah produk pertanian. 4. Pengembangan usaha <i>off farm</i> untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian	1. Penguasaan system informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai ke wilayah kecamatan. 2. Meningkatkan Penyebaran pemanfaatan teknologi tepat guna guna mendapatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. 3. Peningkatan usaha <i>off farm</i> untuk meningkatkan pendapatan petani.	1. Keberlanjutan penguasaan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai ke kelompok petani atau petani. 2. Keberlanjutan pemanfaatan teknologi tepat guna mendapatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. 3. Peningkatan usaha <i>off farm</i> guna mendapatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
4	Peningkatan kemampuan kapasitas SDM pertanian dalam peningkatan produktivitas pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemampuan petani dan stakeholder dibidang pertanian</li> <li>2. Revitalisasi lembaga penyuluhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya</li> <li>2. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh serta SDM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan petani melalui fasilitasi, bimbingan dan pembinaan petani</li> <li>2. Peningkatan kualitas SDM dalam teknik budidaya, manajemen usaha tani, dan pengelolaan hasil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwujudan Kemandirian petani dan lembaga pendukungnya</li> <li>2. Perwujudan Keberlanjutan pemantapan sarana dan prasarana serta kualitas SDM</li> <li>3. meningkatkan usaha agribisnis dan agroindustri melalui pengembangan usaha kawasan.</li> </ol>
5	Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat serta diversifikasi produk pangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan halal, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat</li> <li>2. Peningkatan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan yang bermutu, aman dan bergizi.</li> <li>3. Mempercepat proses diversifikasi konsumsi pangan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan halal, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat</li> <li>2. Pemantapan keragaman (diversifikasi) baik produksi maupun konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal.</li> <li>3. Terwujudnya kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan</li> <li>2. Peningkatan keragaman (diversifikasi) baik produksi maupun konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal.</li> <li>3. Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan</li> <li>2. Terwujudnya keragaman (diversifikasi) baik produksi maupun konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal.</li> <li>3. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
6	Penguatan Struktur Industri yang diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Rembang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Struktur Industri berbasis industri kecil dan menengah dalam mata rantai industri hulu dan hilir</li> <li>2. Pengembangan klaster industri berbasis kekayaan alam daerah .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan klaster industri berbasis kekayaan alam daerah .</li> <li>2. Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha agro industri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan klaster industri berbasis kekayaan alam daerah .</li> <li>2. Pengembangan produk-produk inovatif industry kreatif berbasis sumberdaya lokal.</li> <li>3. Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha industri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan klaster industri berbasis kekayaan alam daerah .</li> <li>2. Pengembangan produk-produk inovatif industry kreatif berbasis sumberdaya lokal</li> <li>3. Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha industri</li> </ol>
7	Optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana pasar, pengawasan peralatan perdagangan dan tersedianya sistem informasi pasar.</li> <li>2. Peningkatan jaringan distribusi dan akses perdagangan ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kapasitas kualitas sarana prasarana pasar, pengawasan peralatan perdagangan dan tersedianya sistem informasi pasar.</li> <li>2. Pengembangan jaringan distribusi dan akses perdagangan ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kualitas sarana prasarana pasar, pengawasan peralatan perdagangan dan tersedianya sistem informasi pasar.</li> <li>2. Penguatan jaringan distribusi dan akses perdagangan ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan kapasitas kualitas sarana prasarana pasar modern dan tradisional, pengawasan peralatan perdagangan dan tersedianya sistem informasi pasar.</li> <li>2. Pemantapan jaringan distribusi perdagangan dan akses pasar ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
8	Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat.</li> <li>2. Peningkatan kelembagaan dan SDM untuk koperasi dan UMKM agar mampu bersaing dalam perekonomian.</li> <li>3. Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru melalui UMKM yang menampung lapangan kerja baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan iklim usaha kondusif bagi koperasi dan UMKM dalam jaringan pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Pengembangan kelembagaan dan SDM usaha skala mikro untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.</li> <li>3. Pengembangan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru melalui UMKM yang menampung lapangan kerja baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan iklim usaha kondusif bagi koperasi dan UMKM dalam jaringan pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Penguatan kelembagaan dan SDM usaha skala mikro untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.</li> <li>3. Penguatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru melalui UMKM yang menampung lapangan kerja baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan iklim usaha kondusif bagi koperasi dan UMKM dalam jaringan pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Pemantapan kelembagaan dan SDM usaha skala mikro untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.</li> <li>3. Pemantapan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru melalui UMKM yang menampung lapangan kerja baru</li> </ol>
9	Optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
		2. Peningkatan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. 3. Fasilitasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM	2. Pengembangan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. 3. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM.	2. Penguatan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. 3. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM.	2. Pemantapan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. 3. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM
10	Peningkatan realisasi penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan dunia usaha melalui penguatan dan penyederhanaan pelayanan penanaman modal, mengembangkan kebijakan pro penanaman modal, peningkatan infrastruktur ekonomi yang baik, dan menekan <i>ekonomi biaya tinggi</i> .	1. Pelayanan Perijinan Investasi satu pintu. 2. Peningkatan promosi investasi berbasis potensi sumberdaya daerah 3. Peningkatan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi.	1. Optimalisasi pelayanan perijinan investasi satu pintu 2. Peningkatan promosi investasi berbasis potensi sumberdaya daerah 3. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi.	1. Pengembangan Pelayanan investasi berbasis Teknologi informasi. 2. Penguatan lembaga promosi investasi daerah 3. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi 4. Penataan dan pengembangan kawasan investasi ]	1. Pengembangan Pelayanan investasi berbasis Teknologi Informasi. 2. Penguatan lembaga promosi investasi daerah 3. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi 4. Pengembangan kawasan investasi



No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
11	Pengembangan Pariwisata yang diarahkan melalui peningkatan obyek wisata, pelestarian peninggalan budaya, tradisi, serta kesenian, dalam rangka membentuk karakteristik budaya masyarakat serta daya tarik kunjungan wisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas obyek wisata dan daya tarik wisata berbasis keragaman budaya, pesona alam dan keunikan lokal.</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dibidang pariwisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata.</li> <li>3. Membangun image positif pariwisata Kabupaten Rembang di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.</li> <li>4. Pengembangan produk pariwisata berbasis keragaman budaya, alam dan keunikan lokal.</li> <li>5. Penataan kawasan wisata bahari terpadu untuk menunjang pengembangan <i>waterfront city</i> dan wisata kota kuno (<i>heritage tourism</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata berbasis keragaman budaya, pesona alam dan keunikan lokal.</li> <li>2. Peningkatan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi atas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan</li> <li>3. Pembangunan jejaring promosi pariwisata ditingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.</li> <li>4. Peningkatan kualitas produk pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, pengembangan kelembagaan, dan sarana-prasarana pendukung.</li> <li>5. Pengembangan kawasan wisata bahari terpadu untuk menunjang pengembangan <i>waterfront city</i> dan wisata kota kuno (<i>heritage tourism</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas sarana aksesibilitas dan penunjang pariwisata guna meningkatkan lama tinggal wisatawan.</li> <li>2. Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata.</li> <li>3. Penguatan jejaring dan pengembangan promosi pariwisata di tingkat kabupaten dan provinsi secara efektif dan efisien.</li> <li>4. Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana-prasarana pendukung sektor pariwisata.</li> <li>5. Peningkatan promosi wisata bahari terpadu dan wisata kota kuno (<i>heritage tourism</i>) di tingkat kabupaten, provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan paket kunjungan wisata daerah dengan memperhatikan konteks regional Jawa Tengah guna meningkatkan lama tinggal wisatawan.</li> <li>2. Penguatan peran kelembagaan masyarakat lokal dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata daerah.</li> <li>3. Penguatan jejaring dan peningkatan promosi pariwisata di tingkat nasional dan internasional secara efektif dan efisien.</li> <li>4. Penguatan diversifikasi produk pariwisata yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.</li> <li>5. Peningkatan promosi wisata bahari terpadu dan wisata kota kuno (<i>heritage tourism</i>) di tingkat nasional dan internasional.</li> </ol>

**Sasaran 3 : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai**

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
1	Peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan jaringan jalan dan jembatan terutama kondisinya rusak berat dan rusak akibat bencana.</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan.</li> <li>3. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan terminal.</li> <li>4. Pengembangan pelabuhan perikanan pantai dan pengembangan pelabuhan umum Rembang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan.</li> <li>2. Pengembangan interkoneksi antar kawasan.</li> <li>3. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas jalan.</li> <li>4. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana dan sarana terminal.</li> <li>5. Peningkatan pembangunan pelabuhan dan pemantapan manajemen kepelabuhanan.</li> <li>6. Pembangunan sarana transportasi antar dan intermoda.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan.</li> <li>2. Peningkatan dan pemeliharaan interkoneksi antar kawasan.</li> <li>3. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan sarana dan prasarana terminal.</li> <li>4. Optimalisasi pembangunan pelabuhan dan manajemen kepelabuhanan.</li> <li>5. Optimalisasi pembangunan sarana transportasi antar dan intermoda.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan pembangunan jaringan jalan dan jembatan.</li> <li>2. Pemantapan interkoneksi antar kawasan.</li> <li>3. Pemantapan kualitas, kuantitas dan kapasitas jalan.</li> <li>4. Pemantapan pelayanan angkutan umum dan sarana terminal.</li> <li>5. Pemantapan manajemen pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelabuhan.</li> <li>6. Pemantapan pelayanan transportasi antar dan intermoda.</li> <li>7. Pemantapan sistem transportasi lokal yang berorientasi pada keamanan, kenyamanan dan kebutuhan transportasi masal yang handal.</li> <li>8. Pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
2	Peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam dan antar kawasan serta antar kepentingan melalui konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.</li> <li>2. Pengembangan fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air guna mendukung aktivitas produksi dan memenuhi kebutuhan air baku.</li> <li>3. Pengendalian erosi melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).</li> <li>4. Pembangunan embung, bendung dan PPST untuk mendukung ketersediaan air baku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.</li> <li>2. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku</li> <li>3. Peningkatan pengembangan fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi.</li> <li>4. Peningkatan pengendalian erosi melalui tahap pra bencana, darurat dan pasca bencana serta peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).</li> <li>5. Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.</li> <li>6. Pembangunan embung, bendung dan PPST untuk mendukung ketersediaan air baku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan dan memelihara kualitas air.</li> <li>2. Optimalisasi sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku</li> <li>3. Optimalisasi pengendalian erosi melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta pengelolaan DAS.</li> <li>4. Optimalisasi penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.</li> <li>5. Penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.</li> <li>6. Peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi.</li> <li>7. Pembangunan embung, bendung dan PPST untuk mendukung ketersediaan air baku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.</li> <li>2. Pemantapan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku.</li> <li>3. Pemantapan pengendalian erosi melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen daerah aliran sungai (DAS)</li> <li>4. Pemantapan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.</li> <li>5. Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>6. Pemeliharaan embung, bendung dan PPST untuk mendukung ketersediaan air baku.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah dan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuhkembangkan potensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, kredit mikro perumahan serta pemerataan pembangunan prasarana sarana dasar permukiman.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni khususnya pada kawasan padat kumuh dan kawasan perdesaan.</li> <li>2. Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman.</li> <li>3. Pengembangan kebijakan dan stimulan serta kredit mikro pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</li> <li>4. Penataan bangunan gedung/rumah negara.</li> <li>5. Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman.</li> <li>6. Pengembangan prasarana dan sarana dasar dan pembangunan perumahan baru di kawasan Kasiba dan Lisiba</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni pada perkotaan dan perdesaan.</li> <li>2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman.</li> <li>3. Stimulan pembangunan perumahan dan kredit mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</li> <li>4. Peningkatan pengembang dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</li> <li>5. Penataan bangunan gedung/rumah negara.</li> <li>6. Pengembangan dan deseminasi teknologi tepat guna bidang permukiman bagi pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat.</li> <li>7. Pengembangan kelembagaan badan penyelenggara dan pelaksana Kasiba dan Lisiba</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan pada wilayah perkotaan dan perdesaan.</li> <li>2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar permukiman.</li> <li>3. Peningkatan stimulan pembangunan perumahan dan kredit mikro masyarakat berpenghasilan rendah</li> <li>4. Peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan perumahan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara swadaya.</li> <li>5. Pengelolaan bangunan gedung/rumah negara.</li> <li>6. Pengembangan teknologi dan implemmentasi tepat guna bidang permukiman.</li> <li>7. Penguatan kelembagaan badan penyelenggara dan pelaksana Kasiba dan Lisiba</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan pada seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan.</li> <li>2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar permukiman.</li> <li>3. Penguatan kredit mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah</li> <li>4. Pengembangan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rusunawa dan rusunami.</li> <li>5. Konservasi bangunan gedung/rumah negara.</li> <li>6. Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman.</li> <li>7. Pemantapan kelembagaan badan penyelenggara dan pelaksana Kasiba dan Lisiba</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
4	Perwujudan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan.</li> <li>2. Pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan kelautan, pelabuhan, telekomunikasi dan informasi.</li> <li>3. Perencanaan kawasan strategis.</li> <li>4. Pembangunan prasarana kawasan strategis.</li> <li>5. Perencanaan dan pembangunan kawasan industri.</li> <li>6. Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Review RUTRK/RDTRK Perkotaan Rembang dan Ibu Kota Kecamatan</li> <li>7. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan pembangunan sektoral</li> <li>8. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah</li> <li>9. Pengembangan kelembagaan tata ruang daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan.</li> <li>2. Pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan kelautan, pelabuhan, telekomunikasi dan informasi.</li> <li>3. Pembangunan prasarana kawasan strategis.</li> <li>4. Pembangunan kawasan industri.</li> <li>5. Pengembangan kelembagaan pengembangan kawasan strategis dan kawasan industri.</li> <li>6. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten</li> <li>7. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan pembangunan sektoral</li> <li>8. Penyusunan peraturan zonasi tata ruang wilayah</li> <li>9. Pengembangan kelembagaan tata ruang daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembangunan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan.</li> <li>2. Peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan kelautan, pelabuhan, telekomunikasi dan informasi.</li> <li>3. Peningkatan pembangunan prasarana kawasan strategis.</li> <li>4. Pengembangan kelembagaan pengembangan kawasan strategis dan kawasan industri.</li> <li>5. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan pembangunan sektoral</li> <li>6. Penetapan peraturan zonasi tata ruang wilayah</li> <li>7. Penguatan kelembagaan tata ruang daerah.</li> <li>8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah</li> <li>9. Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan.</li> <li>2. Pemantapan infrastruktur pertanian, perikanan kelautan, pelabuhan, telekomunikasi dan informasi.</li> <li>3. Penguatan kelembagaan pengembangan kawasan strategis dan kawasan industri.</li> <li>4. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan pembangunan sektoral</li> <li>5. Penerapan peraturan zonasi tata ruang wilayah</li> <li>6. Penguatan kelembagaan tata ruang daerah.</li> <li>7. Pemantapan peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah</li> <li>8. Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
			10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah 11. Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.		
5	Perwujudan kawasan agropolitan sebagai pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan prasarana sarana, pengembangan kelembagaan dan jejaring pemasarannya.	1. Kajian pengembangan agropolitan 2. Pembangunan prasarana dan sarana kawasan agropolitan 3. Penyiapan kelembagaan pengembangan kawasan agropolitan	1. Identifikasi kawasan agropolitan 2. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana kawasan agropolitan 3. Peningkatan usaha agrobisnis 4. Pengembangan kelembagaan pengembangan kawasan agropolitan 5. Pengembangan jejaring pemasaran agropolitan	1. Penetapan kawasan agropolitan 2. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan agropolitan 3. Peningkatan usaha agrobisnis 4. Penguatan kelembagaan pengembangan kawasan agropolitan 5. Pengembangan jejaring pemasaran agropolitan	1. Pemantapan prasarana dan sarana kawasan agropolitan 2. Pengembangan usaha dan produk olahan Peningkatan usaha agrobisnis 3. Pemantapan kelembagaan pengembangan kawasan agropolitan 4. Pemantapan jejaring pemasaran agropolitan

**Sasaran 4 : Terwujudnya Kehidupan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
1	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip <i>good governance</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.</li> <li>2. Penetapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik.</li> <li>3. Fasilitasi peningkatan pemerintah desa/kelurahan.</li> <li>4. Peningkatan kualitas pembangunan daerah yang partisipatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesionalisme aparatur dan peningkatan pelayanan publik.</li> <li>2. Pemantapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik.</li> <li>3. Penguatan fasilitasi kelembagaan pemerintah desa/kelurahan dalam pelayanan publik.</li> <li>4. Peningkatan kelembagaan partisipasi masyarakat ditingkat desa/kelurahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan publik melalui <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan.</li> <li>2. Terwujudnya pelayanan publik berdasarkan SPM.</li> <li>3. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.</li> <li>4. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan promosi daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana <i>e-government</i> dalam pelayanan public.</li> <li>2. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.</li> <li>3. Pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.</li> <li>4. Pemantapan kerja sama antar daerah dalam peningkatan daya saing daerah.</li> </ol>
2	Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan manajemen pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan belanja daerah secara efisiensi dan efektif.</li> <li>2. Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan</li> <li>3. Penggalian sumber-sumber pembiayaan pembangunan diluar PAD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan manajemen pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang mengarah pada efisiensi dan efektif.</li> <li>2. Optimalisasi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah</li> <li>3. Peningkatan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan diluar PAD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi manajemen pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien</li> <li>2. Optimalisasi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah</li> <li>3. Pengembangan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan diluar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan manajemen pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif dan efisien .</li> <li>2. Penguatan penerimaan sumber-sumber keuangan daerah</li> <li>3. Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan diluar PAD.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III PAD.	Tahap RPJMD IV
3	Perwujudan masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran partai politik dan lembaga perwakilan rakyat.</li> <li>2. Fasilitasi pendidikan politik masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi politik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan peran partai politik dan lembaga perwakilan rakyat.</li> <li>2. Peningkatan pendidikan politik masyarakat dalam mewujudkan partisipasi politik yang tinggi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi peran partai politik dan fungsi lembaga perwakilan rakyat.</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya budaya masyarakat yang demokratis.</li> <li>2. Terwujudnya kelembagaan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.</li> </ol>
4	Peningkatan Pembangunan komunikasi dan informasi melalui perwujudan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi terhadap kebutuhan informasi publik</li> <li>2. Pelayanan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah</li> <li>3. Fasilitasi prasarana dan sarana jaringan informasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi</li> <li>2. Pelayanan informasi multi media.</li> <li>3. Perluasan jaringan prasarana dan prasarana informasi seluruh kecamatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan tingkat kesadaran masyarakat terhadap terpenuhinya informasi pemerintahan secara luas dan transparan</li> <li>2. Peningkatan kualitas Pelayanan informasi multi media.</li> <li>3. Peningkatan akses jaringan dan layanan informasi seluruh wilayah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya masyarakat sadar informasi pemerintahan dan pembangunan secara luas dan transparan.</li> <li>2. Terpenuhinya dan terjaminnya hak masyarakat atas informasi publik</li> <li>3. Perluasan jaringan dan layanan informasi di tingkat masyarakat.</li> </ol>



No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
5	Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mewujudkan suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan dan fasilitasi sistem dan kelembagaan keamanan dan ketertiban lingkungan</li> <li>2. Peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum</li> <li>3. Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum di Daerah.</li> <li>4. Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sistem dan kelembagaan keamanan dan ketertiban lingkungan</li> <li>2. Pengembangan kerjasama antar lembaga penegak hukum</li> <li>3. Pemantapan Profesionalisme aparat penegak.</li> <li>4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi sistem dan kelembagaan keamanan dan ketertiban lingkungan</li> <li>2. Pengembangan sistem deteksi dini dalam keamanan dan ketertiban lingkungan.</li> <li>3. Pengembangan sistem keamanan berbasis masyarakat (<i>community policing</i>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan sistem dan kelembagaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.</li> <li>2. Optimalisasi sistem keamanan berbasis masyarakat.</li> </ol>
6	Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sistem Administrasi Kearsipan yang memenuhi standar kualitas.</li> <li>2. Peningkatan kualitas operator penyelenggaraan pelayanan kearsipan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pengelolaan dokumen/arsip daerah.</li> <li>2. Optimalisasi kualitas operator penyelenggaraan pelayanan kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip.</li> <li>2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kearsipan yang berkualitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan informasi kearsipan daerah yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.</li> <li>2. Pelestarian kesadaran (pembudayaan) pentingnya pemeliharaan dan pelestarian arsip.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
7	Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan <i>website</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi.</li> <li>2. Peningkatan kesadaran aparat dalam keterbukaan informasi publik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika.</li> <li>2. Peningkatan kapabilitas lembaga penyiaran dalam menyusun program siaran sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program.</li> <li>3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam keterbukaan informasi publik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya lembaga penyiaran yang mempunyai ijin penyelenggaraan penyiaran.</li> <li>2. Perwujudan kelembagaan keterbukaan informasi publik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kerjasama informasi dengan Mass Media yang memenuhi kebutuhan akan informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas lembaga penyiaran.</li> <li>3. Implementasi keterbukaan informasi publik.</li> </ol>

### Sasaran 5: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
1	Pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi, inventarisasi dan pemetaan potensi SDA terbarukan secara berkesinambungan</li> <li>2. Pemetaan dan inventarisasi kerusakan SDA terbarukan</li> <li>3. Peningkatan kerjasama dengan <i>stakeholders</i> dalam menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan SDA terbarukan.</li> <li>4. Penyusunan regulasi pengelolaan sumberdaya alam terbarukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan SDA terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya</li> <li>2. Pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA terbarukan.</li> <li>3. Rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA terbarukan.</li> <li>4. Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang terbarukan</li> <li>5. Penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang terbarukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemanfaatan SDA terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya</li> <li>2. Peningkatan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA terbarukan.</li> <li>3. Peningkatan upaya rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA terbarukan</li> <li>4. Peningkatan upaya Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang terbarukan</li> <li>5. Diseminasi penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang terbarukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan SDA yang terbarukan secara lestari dan berkelanjutan.</li> <li>2. Optimalisasi keberdayaan masyarakat dalam mendukung kelestarian SDA yang terbarukan.</li> <li>3. Terwujudnya pengelolaan SDA terbarukan yang berwawasan lingkungan.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
2	Pendayagunaan sumberdaya alam tak terbarukan dengan memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi, inventarisasi dan pemetaan potensi SDA tak terbarukan secara periodik</li> <li>2. Pemetaan dan inventarisasi kerusakan SDA tak terbarukan</li> <li>3. Peningkatan kerjasama dengan <i>stakeholders</i> dalam menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan SDA tak terbarukan.</li> <li>4. Penyusunan regulasi pengelolaan sumberdaya alam tak terbarukan</li> <li>5. Studi potensi kawasan CAT (Cekungan Air Tanah) dan pemetaan zona hidrogeologi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan SDA tak terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya</li> <li>2. Pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA tak terbarukan.</li> <li>3. Rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA tak terbarukan.</li> <li>4. Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang tak terbarukan</li> <li>5. Penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang tak terbarukan.</li> <li>6. Pemberdayaan masyarakat lokal sekitar perusahaan kawasan sumber daya alam tak terbarukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemanfaatan SDA tak terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya</li> <li>2. Peningkatan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA tak terbarukan.</li> <li>3. Peningkatan upaya rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA tak terbarukan</li> <li>4. Peningkatan upaya Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang tak terbarukan</li> <li>5. Diseminasi penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang tak terbarukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan SDA yang tak terbarukan secara lestari, efisien dan berkelanjutan.</li> <li>2. Optimalisasi keberdayaan masyarakat dalam mendukung kelestarian SDA yang tak terbarukan.</li> <li>3. Terwujudnya pengelolaan SDA tak terbarukan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat lokal</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
			7. Pemanfaatan air tanah dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.	6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal sekitar perusahaan kawasan SDA yang tak terbarukan  7. Pelestarian sumber daya air tanah dengan mempertahankan fungsi daerah tangkapan air.	
3	Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui berbagai upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan kawasan rawan bencana dan kawasan lahan kritis</li> <li>2. Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana.</li> <li>3. Peningkatan penyediaan kelengkapan sarana prasarana tanggap darurat bencana</li> <li>4. Penyadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta konservasi lahan kritis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.</li> <li>2. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan bencana di kawasan rawan bencana.</li> <li>3. Pelibatan peran aktif dan keswadayaan masyarakat dalam penanganan bencana alam secara mandiri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.</li> <li>2. Pengembangan upaya pencegahan dan penanganan bencana di kawasan rawan bencana.</li> <li>3. Peningkatan partisipatif, peran aktif dan keswadayaan masyarakat dalam penanganan bencana alam secara mandiri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan bencana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.</li> <li>2. Optimalisasi keberdayaan masyarakat dalam mendukung pencegahan dan penanganan bencana secara mandiri.</li> <li>3. Optimalisasi pengintegrasian pengelolaan mitigasi bencana</li> <li>4. Pemantapan pembangunan hutan rakyat dan rehabilitasi hutan mangrove serta Penertiban dan penegakan regulasi di kawasan sempadan pantai dan sungai.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
		<p>5. Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam setiap aktivitas pembangunan.</p> <p>6. Pengembangan hutan rakyat dan rehabilitasi hutan mangrove</p>	<p>4. Peningkatan upaya Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam setiap aktivitas pembangunan.</p> <p>5. Penanganan lahan kritis melalui rehabilitasi dan konservasi lahan</p> <p>6. Peningkatan pengembangan hutan rakyat dan rehabilitasi hutan mangrove serta penyusunan regulasi tatabangunan di kawasan sempadan pantai dan sungai.</p>	<p>4. Pengembangan upaya Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam setiap aktivitas pembangunan.</p> <p>5. Peningkatan penanganan lahan kritis melalui rehabilitasi dan konservasi lahan</p> <p>6. Optimalisasi pembangunan hutan rakyat dan rehabilitasi hutan mangrove serta Penertiban dan penegakan regulasi di kawasan sempadan pantai dan sungai.</p> <p>7. Pengembangan kearifan lokal dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan bencana dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.</p>	

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
4	Pengembangan energi melalui diversifikasi energi utama maupun energi terbarukan untuk pemerataan dan pemenuhan distribusi energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan distribusi energi dan pengembangan energi alternatif (bersih) yang terbarukan.</li> <li>2. Pemetaan potensi dan cadangan energi baru serta penganekaragaman pemanfaatan energi baru terbarukan (energi alternatif).</li> <li>3. Peningkatan penyediaan dan pemerataan distribusi energi alternatif yang ramah lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan rasio elektrifikasi.</li> <li>2. Pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri.</li> <li>3. Pengembangan upaya penyediaan dan pemerataan energi alternatif yang ramah lingkungan.</li> <li>4. Peningkatan teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan rasio elektrifikasi</li> <li>2. Peningkatan pengembangan dan pemerataan distribusi energi alternatif yang ramah lingkungan.</li> <li>3. Peningkatan upaya pemanfaatan bio energi yang ramah lingkungan.</li> <li>4. Pengembangan upaya pemanfaatan teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi rasio elektrifikasi di wilayah Kabupaten Rembang</li> <li>2. Optimalisasi pemanfaatan bio energi dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan.</li> </ol>
5	Peningkatan nilai tambah dan manfaat usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan diversifikasi usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral serta menerapkan <i>good mining practice</i> di lokasi tambang yang sudah ada dengan selalu memperhatikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan serta terjadinya alih teknologi yang ramah lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan dan diversifikasi produksi usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
		<p>2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan.</p> <p>3. Peningkatan nilai tambah usaha pertambangan rakyat.</p> <p>4. Penyusunan regulasi penatausahaan tambang</p>	<p>2. Pengembangan upaya peningkatan diversifikasi usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup</p> <p>3. Penegakan regulasi tentang pengelolaan usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>4. Penerapan teknologi usaha pertambangan yang ramah lingkungan</p>	<p>2. Pengendalian kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi sumber daya mineral.</p> <p>3. Peningkatan penegakan regulasi tentang pengelolaan usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>4. Pengembangan upaya penerapan teknologi usaha pertambangan yang ramah lingkungan</p> <p>5. Peningkatan manfaat sosial usaha pertambangan bagi masyarakat lokal.</p>	<p>2. Optimalisasi penegakan dan penertiban usaha pertambangan.</p>



No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
6	Pengelolaan hutan secara lestari melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Kelembagaan masyarakat sekitar hutan</li> <li>2. Pengembangan Kemitraan antara pengelola hutan negara dan masyarakat lokal sekitar</li> <li>3. Pengendalian kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia</li> <li>4. Peningkatan komitmen stakeholders dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat sekitar hutan</li> <li>2. Pengembangan Jaringan Kerja Kemitraan antara pengelola hutan negara dan masyarakat lokal sekitar</li> <li>3. Peningkatan upaya pengendalian kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia</li> <li>4. Peningkatan partisipasi dan upaya penyadaran masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian hutan</li> <li>5. Peningkatan manajemen pengelolaan hutan yang semakin profesional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan lestari.</li> <li>2. Optimalisasi jaringan kerja kemitraan pengelolaan hutan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan</li> <li>3. Optimalisasi upaya pengendalian kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia</li> <li>4. Optimalisasi peningkatan manajemen pengelolaan hutan secara lestari sesuai fungsinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantapnya kelembagaan, keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan lestari.</li> <li>2. Pemantapan jaringan kerja kemitraan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan</li> <li>3. Pemantapan sistem pengendalian kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia</li> <li>4. Pemantapan manajemen pengelolaan hutan yang berkelanjutan</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
7	Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi kelautan yang berbasis ekosistem dan sesuai dengan daya dukung kelautan.</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.</li> <li>3. Peningkatan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.</li> <li>4. Peningkatan kelembagaan usaha produksi kelautan melalui pemberdayaan industri pengolahan hasil perikanan dan kluster pengolahan.</li> <li>5. Peningkatan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan dalam pengelolaan pesisir dan laut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan fokus pada peningkatan ekstensifikasi (ekspansi <i>fishing ground</i>) dan pengembangan budidaya perikanan sesuai dengan daya dukung lingkungan.</li> <li>2. Peningkatan upaya penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan teknologi kelautan perikanan yang ramah lingkungan hidup.</li> <li>3. Peningkatan upaya diversifikasi usaha kelautan dan perikanan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.</li> <li>4. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan pesisir dan laut, serta pengembangan kluster pengolahan perikanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan upaya peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan.</li> <li>2. Pengembangan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya rumput laut</li> <li>3. Pengembangan upaya diversifikasi usaha kelautan dan perikanan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan</li> <li>4. Peningkatan peran kelembagaan di bidang perikanan dan kelautan dalam pengelolaan pesisir dan laut sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat pesisir</li> <li>5. Pengembangan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan dalam pengelolaan pesisir dan laut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi produksi kelautan dan perikanan melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan.</li> <li>2. Optimalisasi pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan</li> <li>3. Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.</li> <li>4. Optimalisasi peran kelembagaan di bidang kelautan dan perikanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>5. Peningkatan ekspor produk kelautan dan perikanan melalui penguatan jaringan pemasaran.</li> </ol>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
		<p>6. Perbaikan kondisi wilayah pesisir dan laut dengan fokus pada konservasi lingkungan kelautan.</p> <p>7. Penyusunan regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.</p>	<p>5. Peningkatan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan dalam pengelolaan pesisir dan laut.</p> <p>6. Peningkatan perbaikan kondisi wilayah pesisir dan laut dengan fokus pada pengembangan kawasan konservasi sumberdaya pesisir dan zona perlindungan laut.</p> <p>7. Penetapan kawasan minapolitan sebagai upaya pengembangan potensi kelautan perikanan</p> <p>8. Penetapan kawasan budidaya rumput laut dalam rangka pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan</p> <p>9. Penetapan kawasan sentra pengolahan ikan dalam rangka pengembangan kluster pengolahan ikan</p>	<p>6. Perbaikan kondisi wilayah pesisir dan laut dengan fokus pada pengembangan peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan kawasan pesisir dan zona perlindungan laut.</p> <p>7. Pengembangan daya saing produk perikanan dan kelautan melalui diversifikasi produk dengan teknologi modern.</p> <p>8. Pengembangan kawasan sentra pengolahan ikan dalam rangka pengembangan kluster pengolahan ikan.</p> <p>9. Pengembangan kawasan minapolitan dalam rangka pengembangan potensi kelautan dan perikanan secara optimal.</p>	

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
			<p>10. Peningkatan daya saing produk perikanan dan kelautan melalui diversifikasi produk dengan teknologi modern.</p> <p>11. Peningkatan promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan melalui penguatan jaringan pemasaran produk yang ramah lingkungan.</p> <p>12. Penegakan regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>	<p>10. Pengembangan promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan melalui penguatan jaringan pemasaran produk yang ramah lingkungan.</p>	
8.	Optimalisasi tata guna lahan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan, penegakkan hukum pertanahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib administrasi pertanahan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan	<p>1. Pengembangan sistem administrasi pelayanan pertanahan</p> <p>2. Peningkatan penegakkan hukum dan administrasi pertanahan serta penanganan kasus-kasus sengketa tanah secara adil dan proporsional</p>	<p>1. Peningkatan teknologi sistem pelayanan administrasi pertanahan dan kerjasama multi pihak dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan administrasi pertanahan</p> <p>2. Peningkatan media sosialisasi produk hukum dan administrasi pertanahan baik melalui media cetak maupun elektronik</p>	<p>1. Pengembangan sistem pelayanan administrasi pertanahan dan kerjasama multi pihak dalam penegakkan hukum, dan administrasi pertanahan.</p> <p>2. Pengembangan penertiban sistem administrasi pelayanan pertanahan.</p>	<p>1. Optimalisasi sistem pelayanan prima administrasi pertanahan</p> <p>2. Optimalisasi tertib administrasi pertanahan dengan melibatkan peran masyarakat dalam mempertahankan daya dukung lingkungan.</p>

No	Arah Pembangunan 2005-2025	Tahapan Prioritas			
		Tahap RPJMD I	Tahap RPJMD II	Tahap RPJMD III	Tahap RPJMD IV
		3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum dan administrasi pertanahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	3. Pengembangan kapasitas masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan.	3. Pengembangan kapasitas masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan.	

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**